

L
A
P
K
I
N



B
B
P
O
M

D
I

J
A
K
A
R
T
A

2
0
2
0

LAPORAN
AKUNTABILITAS | 2020
KINERJA

BALAI BESAR POM DI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2020. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2020, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) dan target tahun 2020 (awal periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 08 Januari 2021

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes

BADAN POM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2020.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2020 diukur terhadap 28 indikator kinerja utama yang akan dicapai. Pada tahun 2020, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan, dengan 28 indikator. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator mencapai target dengan kriteria “**sangat baik**” ($110\% < x \leq 120\%$); 17 (tujuh belas) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 2 (dua) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$). Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada tahun 2020 semua sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta telah dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya. Empat sasaran strategis telah memenuhi kriteria “sangat baik” ($110 \leq x \leq 120$) yaitu sasaran strategis ke-dua, ke-empat, ke-tujuh dan ke-sembilan. Tujuh sasaran strategis lainnya dengan capaian indikator kinerja “baik” ($90 \leq x < 110$).

Capaian indikator kinerja tertinggi pada “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan” sebesar 169,91%. Capaian indikator kinerja terendah “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 82,70%.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Besar POM di Jakarta sebagian besar efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) berkisar antara 0,00 hingga 0,21. Kegiatan yang mempunyai nilai TE 0,21 adalah Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa. Sebagian besar kegiatan memiliki nilai TE dengan kategori efisien karena sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan dan sejalan dengan penyerapan anggaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp44.512.826.000,00 (empat puluh empat milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Kemudian terdapat perubahan pagu anggaran setelah revisi DIPA untuk kegiatan KIE menjadi Rp44.553.826.000,00 (empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Karena kondisi darurat kesehatan COVID-19, ditetapkan APBN-P sehingga pagu anggaran menjadi Rp32.626.736.000,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp32.259.089.806,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,84%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar aman dari bahan berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Jakarta.

HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penggalangan Komitmen Pelaku Usaha



Fasilitasi UMKM Pangan Tahun 2020 yang diawali dengan kegiatan Penggalangan Komitmen Pelaku Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2020 di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha berkeinginan dan memiliki komitmen penuh untuk mengikuti kegiatan Fasilitasi UMKM tahun 2020 sampai selesai untuk menyelesaikan program fasilitasi UMKM pangan ini sampai dengan tuntas yakni terbitnya nomor izin edar dari Badan POM yang merupakan salah satu syarat beredarnya pangan olahan di Indonesia. Pelaku usaha diberikan pembekalan bagaimana cara mendapatkan nomor izin edar maupun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan nomor izin edar tersebut.

2. Kontribusi BBPOM di Jakarta dilaksanakan dalam pengujian COVID-19

Koordinasi internal dan eksternal dalam rangka perlindungan pegawai dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Kontribusi BBPOM di Jakarta dilaksanakan dalam pengujian COVID-19:

- a. Melakukan koordinasi dengan laboratorium yang ditunjuk pemerintah di wilayah Jakarta untuk melakukan pengujian COVID-19 secara PCR yaitu : Labkesda DKI, BBLK dan BBTKLPP. Berdasarkan hasil koordinasi, BBPOM di Jakarta akan

meminjamkan alat *realtime PCR* kepada BBTKLPP dan memberikan informasi terkait ketersediaan reagen pengujian COVID-19

- b. Berkoordinasi dengan penyedia alat dan reagen untuk pengujian COVID-19, yaitu: PT. Genecraft, PT. Merck, PT. Indolab, PT. Elokarsa dan PT. Enigma Saintia. Hasil koordinasi: hampir semua reagen yang diperlukan *indent* 4-12 minggu, khusus PT Indolab menginformasikan bahwa dapat menyiapkan reagen secepat mungkin apabila diperlukan. Informasi ini telah disampaikan ke BBTKLPP via *Whatsapp*.
- c. Melakukan kajian terhadap penyiapan laboratorium pengujian COVID-19. Hasil kajian : laboratorium BBPOM di Jakarta tidak akan meningkatkan sarana dan prasarana menjadi laboratorium BSL2/3 (merupakan persyaratan pengujian COVID-19).

3. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2020

Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes beserta Tim melakukan audiensi ke Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada 04 Juni 2020. Pertemuan yang dibuka oleh Bapak Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Uus Kuswanto S.Sos, M.AP. ini juga dihadiri oleh OPD terkait meliputi Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM), Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perumda Pasar Jaya. Pada kesempatan ini, Kepala Balai Besar POM di Jakarta memperkenalkan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu Kegiatan GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan), PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), dan PABB (Pasar Aman dari Bahan Berbahaya). Dengan adanya Program ini diharapkan akan terbentuk Desa/ Kelurahan Pangan Aman, Sekolah Pangan Aman dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

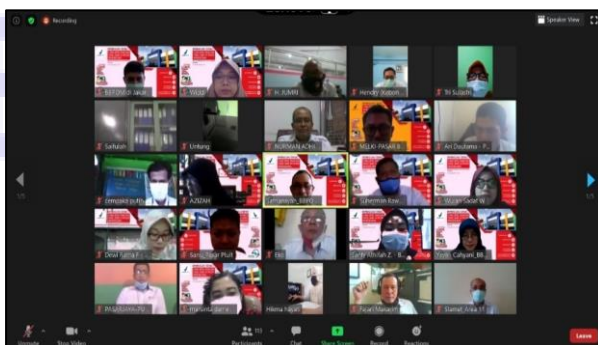
4. Balai Besar POM di Jakarta menerbitkan *e-book*

Untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan akses informasi Layanan Sertifikasi khususnya Komoditi Kosmetika, Balai Besar POM di Jakarta menerbitkan *e-book*. *E-book* ini merupakan media informasi yang efektif bagi pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman terhadap proses sertifikasi dalam rangka permohonan rekomendasi penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) bagi Industri Kosmetika. *E-book* ini dapat diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun melalui website <https://bit.ly/LayananSertifikasiBBPOMJakarta>. Layanan Sertifikasi juga ditujukan untuk Komoditi Obat Tradisional khususnya bagi UKOT dan UMOT.

5. Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Sarana Distribusi Obat

Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Sarana Distribusi Obat pada Kamis 16 April 2020. Di tengah pandemi yang sedang dihadapi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya tidak menyurutkan semangat para Inspektur CDOB BBPOM di Jakarta untuk menimba ilmu secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Narasumber berasal dari Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor Badan POM. Pada kesempatan ini dibahas langkah-langkah efektif dan efisien yang bisa diterapkan para Inspektur CDOB untuk meningkatkan kualitas Inspeksi sarana Distribusi obat dan meningkatkan kualitas tindak lanjut Pemeriksaan.

6. Sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional



Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) di Pasar Tradisional, secara virtual pada Rabu, 30 September 2020 yang dihadiri pengelola pasar dan pedagang pasar tradisional di

lingkungan Perumda Pasar Jaya, di Provinsi DKI Jakarta. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Divisi Regional 2 Perumda Pasar Jaya, Bapak Nurman Adhi Permana, SE., MM dan dibuka secara resmi oleh

Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Bapak Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. Pada sosialisasi ini disampaikan materi Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional oleh Kepala Bidang Infokom BBPOM di Jakarta, Ibu Yayan Cahyani, S.Si, Apt. dan dilanjutkan dengan materi Pasar Sehat oleh Bapak Rismanaadji, SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pengelola pasar dan pedagang terkait dapat menerapkan prinsip prinsip CRPB di pasar tradisional dan pasar sehat sehingga dapat sinergi dan mendukung Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

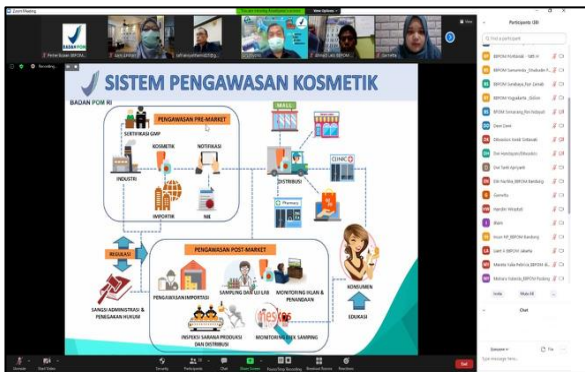
7. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah



Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap pangan jajanan yang aman, Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk

Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 24 September 2020 secara daring. Kegiatan yang merupakan tahapan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) ini dihadiri oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, perwakilan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I & II Kota Administrasi Jakarta Timur dan Komunitas sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru UKS dan pengelola kantin dari 12 sekolah yang diintervensi tahun 2020.

8. Bimtek Inspektur Kosmetika



Pada tanggal 14 hingga 18 September 2020, Balai Besar POM di Jakarta berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM telah menginisiasi pelaksanaan Bimtek Inspektur Kosmetika Senior sesuai

penjenjangan setelah mengikuti Bimtek Inspektur Kosmetik Junior. Bimtek diikuti oleh 10 (sepuluh) orang peserta internal dari Bidang Pemeriksaan; 3 (tiga) orang peserta dari Direktorat Pengawasan Kosmetik; 15 (lima belas) orang peserta perwakilan dari Balai/Balai Besar POM di Bandar Lampung, Bandung, Denpasar, Makassar, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Yogyakarta; serta 2 (dua) orang peserta dari Loka POM di Kabupaten Tangerang.

9. Sosialisasi Pemanfaatan Smart-POM

Sosialisasi dan penyegaran kembali pemanfaatan Smart-POM yang dihubungkan dengan SIPT versi 3 dari Pusat Data dan Informasi BPOM kepada Petugas BBPOM di Jakarta dan Dinas/Suku Dinas Kesehatan wilayah DKI Jakarta dilakukan secara berkelanjutan. Tanggal 24 September 2020 telah dilaksanakan pertemuan virtual guna sosialisasi dan penyegaran kembali pengoperasian aplikasi Smart-POM yang menghasilkan rekomendasi berupa : (1) SIPT versi 3 yang dikoneksikan ke Smart-POM masih dalam tahap pengembangan; (2) tindak lanjut hasil pengawasan IRTP dari BBPOM di Jakarta kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk sementara dilakukan secara manual; dan (3) sehubungan masa pandemi COVID-19, pembinaan terhadap sarana IRTP sesuai usulan tindak lanjut BBPOM di Jakarta akan dilakukan secara virtual. Selain itu didapat kesepakatan tentang Tindak Lanjut hasil pengawasan BBPOM di Jakarta guna mendukung pencapaian IKU Bidang Pemeriksaan.

10. Desk Denah Dalam Rangka Percepatan Fasilitasi UMKM



Selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah nafas Balai Besar POM di Jakarta, oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta menginisiasi kegiatan dalam rangka percepatan fasilitasi UMKM Pangan pada tahun 2021

berupa desk denah hasil dari Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan sebelumnya bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang berlangsung tanggal 16 Desember ini, bertujuan untuk menjangkau calon pelaku usaha yang dapat dimasukkan dalam program fasilitasi UMKM Pangan tahun berikut agar lebih cepat berproses di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi serta memperoleh NIE dari Badan POM.

11. Bimbingan Teknis Pengujian: Tindakan Korektif (*Corrective Action*) terkait Audit dalam Rangka Pemenuhan Standar ISO/IEC 17025:2017



Dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja laboratorium pengujian, Balai Besar POM di Jakarta mengadakan bimbingan teknis mengenai tindakan korektif terkait audit dalam rangka pemenuhan standar ISO/IEC 17025:2017. Bimbingan teknis

diadakan secara daring dengan menghadirkan narasumber Dra. Diana Boes, M.M dari Avogadro Inovasi Indonesia. Bimbingan teknis dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 10-11 Desember 2020 dengan dihadiri oleh peserta dari bidang pengujian Balai Besar POM di Jakarta.

12. Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Terpadu di Provinsi DKI Jakarta



Mengakhiri kegiatan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan di tahun 2020, Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan Workshop Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Keamanan Pangan Terpadu di Provinsi DKI Jakarta, pada hari Kamis, 3 Desember 2020. Program Keamanan Pangan Terpadu terdiri dari Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB). Ketiga program ini dilaksanakan serentak dan saling bersinergi satu sama lain sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan di masyarakat. Dengan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh saran dan masukan yang bermanfaat bagi pelaksanaan program kedepannya. Dengan demikian, hasil yang diperoleh lebih baik serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

13. Reakreditasi Daring Dalam Rangka Pemenuhan Standar ISO 17025:2017 Bidang Pengujian Balai Besar POM di Jakarta



Untuk tetap menjamin mutu, keabsahan hasil pengujian serta peningkatan kinerja di laboratorium, Balai Besar POM di Jakarta mengadakan reakreditasi dengan mengajukan proses sertifikasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) secara berkala. Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, penilaian dilaksanakan secara jarak jauh atau dikenal dengan *remote assessment* secara daring. Untuk pertama kalinya

pula, Balai Besar POM di Jakarta mengadakan reakreditasi secara remote assessment. Kegiatan reakreditasi berlangsung selama dua hari pada tanggal 30 November-01 Desember 2020.

14. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SAKIP Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020



Balai Besar POM di Jakarta mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi penerapan SAKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 pada tanggal 27 November 2020. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan

perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan evaluasi keberhasilan, pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor, menyelaraskan integrasi manajemen keuangan dan manajemen kinerja (anggaran berbasis kinerja) serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kinerja.

15. Kosmetik Ilegal Senilai Lebih dari 5,8 Miliar Rupiah Disita oleh Balai Besar POM di Jakarta



Sejalan dengan upaya memberantas kejahatan Obat dan Makanan ilegal, PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya pada Kamis, 26 November 2020 berhasil mengamankan

kosmetik ilegal yang dijual secara online melalui situs e-commerce di toko online di wilayah Jakarta Selatan. Perkiraan nilai keekonomian mencapai lebih dari 5,8 Miliar rupiah. Produk kosmetik ilegal yang ditemukan untuk selanjutnya disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan kosmetik TIE

melanggar pasal 197 jo pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

16. Bimtek Iklan Dan Penandaan Kosmetika Sebagai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Balai Besar POM di Jakarta secara intensif melakukan pengawasan kepada sarana produksi dan distribusi. Pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk Iklan dan Penandaan juga dilakukan secara Rutin. Dari hasil pengawasan Iklan

dan Penandaan Kosmetika ditemukan ketidak sesuaian dengan aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi kesalahan yang berulang, terhadap sarana yang melakukan pelanggaran dilakukan Bimtek Iklan dan Penandaan Kosmetika. Kegiatan dilakukan pada tanggal 6 November 2020 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 81 pelaku usaha terdiri dari 31 Importir Kosmetika dan pemberi kontrak yang sedang dalam proses mendapatkan Nomor Notifikasi dan 50 Produsen Importir dan pemberi kontrak yang telah mempunyai nomor Notifikasi. Narasumber Dra. Kenik Sintawati, Apt dari Direktorat Pengawasan Kosmetika.

17. Hasil Nyata Fasilitasi UMKM Olahan Susu



Balai Besar POM di Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan olahan susu di wilayah Pondok Rangan. Berbagai Rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam

memfasilitasi olahan susu tersebut sampai mendapat ijin edar. Mulai dari pembangunan tempat produksi, Fasilitasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Fasilitasi pengendalian mikroba pada bahan baku dan tempat

produksi, Pengujian bahan baku dan produk susu, sampai kepada pendampingan proses e-registrasi Pangan OLahan. Pada tanggal 14 November 2020 dilakukan acara penyerahan Nomor Ijin Edar Produk OLahan susu untuk 5 produk. Total produk yang diproduksi ada 8 produk. Tetapi 3 produk masih dalam proses pengujian. Penyerahan NIE dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta kepada plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian dan selanjutnya diserahkan kepada kelompok Swadaya. Pada kegiatan ini sekaligus diadakan Ekspose Sapi Perah dan komunikasi virtual antara wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan berkomunikasi langsung Wakil Walikota Jakarta Selatan, Kepala Balai Besar POM di Jakarta dan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian dan para peternak serta pelaku usaha OLahan susu.

18. Pertemuan Perkuatan Koordinasi Dan Peningkatan Kinerja PPNS

Balai Besar POM di Jakarta



Balai Besar POM di Jakarta menggelar kegiatan forum koordinasi PPNS pada Rabu, 18 November 2020, dengan mengusung tema “Pertemuan Perkuatan Koordinasi Dan Peningkatan Kinerja PPNS Balai Besar POM Di Jakarta”. Kegiatan

diselenggarakan secara luring dan daring diikuti oleh peserta dari Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Direktorat Penyidikan, Balai Besar POM Bandung dan Balai Besar POM Serang. Diharapkan dengan kegiatan tersebut akan semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi PPNS Balai Besar POM di Jakarta dengan CJS terkait serta dukungan dalam upaya penyelesaian berkas Perkara yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Jakarta.

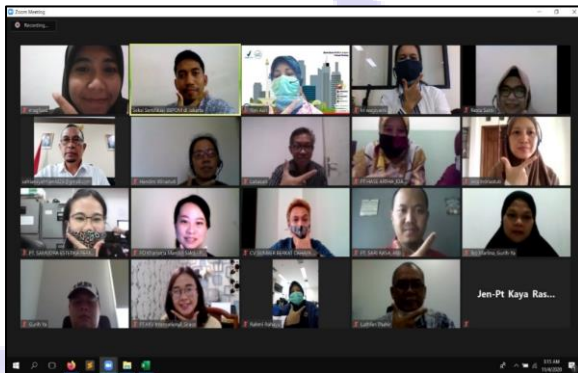
19. Balai Besar POM di Jakarta Menyongsong Akhir Tahun 2020 dengan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kebijakan Keuangan



Kamis tanggal 12 November 2020, BBPOM di Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2020 yang dilaksanakan melalui daring dikarenakan masih dalam

kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020. Peserta terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan pengelola keuangan lainnya.

20. Pelayanan Prima Desk CAPA



Pada masa Pandemi Covid-19, Balai Besar POM di Jakarta terus melakukan pelayanan prima. Pelayanan prima yang dilakukan yaitu *Desk CAPA* yang bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan rekomendasi oleh

Balai Besar POM di Jakarta dalam rangka Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB) yang diperlukan oleh sarana produksi maupun sarana distribusi dalam mengajukan permohonan Nomor Izin Edar di Badan POM. Kegiatan *desk CAPA* ini merupakan kegiatan desk CAPA keempat di tahun 2020 dan merupakan *desk CAPA* kedua yang diselenggarakan secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 4 November 2020 mengundang 14 sarana distribusi dan/atau produksi serta diikuti oleh 10 sarana distribusi dan/atau produksi.

21. *Fraud Control Plan (FCP)* Tematik Penilaian Risiko Kecurangan di Balai Besar POM di Jakarta



Implementasi *Fraud Control Plan (FCP)* Tematik Penilaian Risiko Kecurangan atas Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 pada Balai Besar POM di Jakarta telah dilaksanakan

dengan pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2020. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan Sosialisasi FCP kepada seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta pada tanggal 21 Oktober dengan narasumber dari BPKP Provinsi DKI Jakarta. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyampaian kuesioner persepsi pegawai terhadap risiko *fraud* kepada seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebagai bahan *desk* Kertas Kerja *Fraud Risk Analysis* pada tanggal 3 November 2020 yang menggali risiko *fraud* pada bisnis proses di Balai Besar POM di Jakarta.

22. Edukasi Masyarakat Dengan Talkshow di Media Elektronik



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan, BBPOM di Jakarta mengadakan Talkshow di RRI pada Kamis, 5 November 2020 dengan menghadirkan Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Drs.

Safriansyah, Apt, M.Kes, selaku narasumber. Dalam Talkshow tersebut Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes menyampaikan tentang Obat Tradisional yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah jamu sebagai minuman tradisi leluhur bangsa Indonesia. Disampaikan juga tentang Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Melalui kegiatan pemberian informasi dan edukasi ini diharapkan masyarakat dapat memilih dan mengonsumsi

khususnya obat tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu, disamping itu juga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap obat tradisional yang beredar di pasaran atau yang dikonsumsi.

23. Balai Besar POM di Jakarta Sita Puluhan Ribu Kosmetik Ilegal Senilai Lebih dari 4 Miliar Rupiah



Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya berhasil menyita lebih dari 27.000 pcs kosmetik ilegal di sebuah ruko di Jakarta Utara, Kamis, 5 November 2020. Kosmetik ilegal tanpa izin edar / TIE tersebut dijual secara *online* melalui situs *e-commerce*. Perkiraan nilai keekonomian mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Produk kosmetik ilegal yang ditemukan untuk selanjutnya disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan kosmetik TIE melanggar pasal 197 jo pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

24. Kupas Lartas Kosmetik/Obat & Makanan Dengan BBPOM Di Jakarta (Sosialisasi PERBPOM No 15 Tahun 2020)



Balai Besar POM di Jakarta menjadi narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Bea dan Cukai Pos Pasar Baru yang bertajuk “Kupas Lartas Kosmetik/Obat & Makanan Dengan Balai Besar POM Di Jakarta” pada Kamis, 22 Oktober 2020 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Peserta acara adalah petugas BC di wilayah Indonesia dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut sekaligus untuk mensosialisasikan peraturan terbaru BPOM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

25. Menciptakan Pasar Kramat Jati Sebagai Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya



Balai Besar POM di Jakarta pada Rabu 14 Oktober melakukan aksi Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai tahap akhir dari Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, setelah dilakukan sebelumnya beberapa tahap meliputi bimbingan teknis kepada pengelola pasar, penyuluhan pedagang dan pengujian sampel pangan di pasar Kramat Jati. Kampanye ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara khusus kepada masyarakat sebagai konsumen.

26. Puluhan Ribu Butir Trihexyphenidyl dan Tramadol Disita Balai Besar POM di Jakarta



Sejalan dengan upaya memberantas kejahatan Obat dan Makanan ilegal, PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya pada Rabu malam, 7 Oktober 2020 berhasil mengamankan puluhan ribu obat Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar (TIE) yang dijual bebas secara online pada toko yang menjual kosmetik di daerah Kemayoran Jakarta Pusat. Obat-obat tertentu tersebut dijual melalui e-commerce dengan modus menyamarkan nama obat menjadi nama-nama suku cadang/ spare part otomotif. Dari hasil penindakan tersebut ditemukan

hampir 36.000 butir obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar, serta berbagai macam obat yang dikemas dalam paket siap kirim. Petugas Balai Besar POM di Jakarta berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti untuk diproses selanjutnya sesuai dengan Pasal 196 dan 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 62 Jo Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

27. Tetap mengedukasi ditengah Pandemi, Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi CRPB di Pasar Tradional



BBPOM di Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional, secara virtual pada Rabu, 30 September 2020 yang dihadiri pengelola pasar dan pedagang pasar tradisional di lingkungan Perumda Pasar Jaya, di

Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pengelola pasar dan pedagang terkait dapat menerapkan prinsip prinsip CRPB di pasar tradisional dan pasar sehat sehingga dapat sinergi dan mendukung Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

BADAN POM

Keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan **fungsi pengawasan obat dan makanan** pada tahun 2020 dapat dilihat pada kegiatan berikut:

1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bersama Tokoh Masyarakat telah dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Maret 2020 di Masjid Al-Hikmah, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh 250 (dua ratus lima puluh) orang masyarakat. Materi mengenai Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Keamanan Pangan.
- 
2. Sejalan dengan upaya memberantas kejahatan Obat dan Makanan ilegal, PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya pada Kamis, 5 Maret 2020 berhasil mengamankan ribuan kosmetik ilegal - tanpa izin edar (TIE) - dari sebuah rumah di wilayah Jakarta Barat,. Kosmetik ilegal yang sebagian besar merupakan kosmetik Korea, didistribusikan melalui media online. Hasil dari penindakan tersebut ditemukan lebih dari 9000 pieces produk kosmetik TIE dalam berbagai macam merk dan kemasan. Peredaran kosmetik ilegal melanggar pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah

BADAN POM

3. Selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, Balai Besar POM di Jakarta hadir dalam kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan mulai dari hulu hingga ke hilir. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 27 April 2020 hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H dengan cakupan sarana berupa distribusi pangan (importir/distributor, toko, *supermarket*, *hypermarket*, pasar tradisional, para pembuat dan atau penjual parsel) serta pangan berbuka puasa (takjil). Fokus pengawasan diutamakan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan/atau kemasan bocor).



1. Balai Besar POM di Jakarta melakukan kegiatan *sampling* jajanan ramadhan (Takjil

a. Kamis, 14 Mei 2020 bersama tim terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai bagian dari intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadhan dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut berlokasi di Kelurahan Johar baru dan Jl. D, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat.



- b. Sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Jakarta dalam melindungi Masyarakat dari Pangan yang mengandung Bahan Berbahaya, Kamis, 7 Mei 2020 Balai Besar POM di Jakarta melakukan kegiatan *sampling* jajanan ramadhan (Takjil) sebagai bagian dari intensifikasi pengawasan pangan.
- c. Pada Kamis, 30 April 2020, Balai Besar POM di Jakarta kembali melaksanakan pengawasan Jajanan Takjil di Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Pengawasan juga dilakukan di sepanjang jalan depan pasar Kramat Jati Pengawasan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan Ramadhan, dengan tujuan untuk memastikan jajanan takjil dan pangan lainnya aman dari bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Dilakukan pengambilan sampel produk pangan yang diduga mengandung empat macam bahan berbahaya, yang dilakukan pengujian menggunakan *rapid test kit* ; Formalin, Boraks, Metanil *Yellow* dan Rhodamin B dan tidak ditemukan takjil yang mengandung bahan berbahaya yang diuji.

1. PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Polda Metro Jaya pada Kamis, 16 Juli 2020 berhasil mengamankan puluhan ribu kosmetik, obat, dan obat tradisional (OT) ilegal / mengandung bahan yang dilarang dari sebuah rumah di



wilayah Jakarta Barat. Kosmetik dan obat ilegal tersebut didistribusikan melalui media penjualan daring / *online* (*e-commerce*). Dari hasil penindakan tersebut ditemukan hampir 60.000 pieces produk kosmetik, obat, dan OT ilegal / TIE dalam berbagai macam merk dan kemasan. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai lebih dari 2,5 Miliar rupiah. Peredaran ketiga jenis produk ini

melanggar pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Untuk menciptakan Balai Besar POM di Jakarta yang bersih akuntabel transparan dan berkomitmen mengawal **reformasi birokrasi** maka selama tahun 2020 dilakukan kegiatan berikut:

1. Komitmen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta terhadap Jaminan Kualitas Pelayanan Publik dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.



2. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu dari 763 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK serta WBBM dan diundang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Jakarta.



3. Peningkatan kompetensi SDM melalui:

- a. *Training liquid handling (The Fundamental of Pippeting)* :

Melaksanakan kegiatan pelatihan liquid handling dengan narasumber PT. Elokarsa yang diikuti oleh penguji, penyelia, Kepala Seksi dan Kepala Bidang Pengujian pada tanggal 28 Januari 2020;

- b. Pelatihan Jejaring laboratorium pengujian pangan tahun 2020 (Deteksi DNA spesifik *Porcine* pada sampel yang mengandung DNA rendah menggunakan *realtime PCR*):
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan jejaring laboratorium pangan dengan mengirimkan satu penguji sebagai peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan di PPPOMN pada tanggal 24-27 Februari 2020, diseminasi hasil pelatihan dilaksanakan melalui laporan hasil penugasan yang di *share* di grup komunikasi laboratorium mikrobiologi.
- d. *Training* bagi personil baru di laboratorium
Telah dilakukan pelatihan internal bagi personil baru di laboratorium (CPNS atau mutasi dari bidang maupun dari unit lain). Instruktur pelatihan adalah penyelia atau penguji senior.
- e. *Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu*:
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu Integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 secara virtual. Narasumber pada kegiatan bimtek adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ibu Riati Anggriany S.H, M.Hum, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dra Yunida Nugrahanti Soedarto dan Kepala Sub Bagian Tata Laksana, Deasywati, S.Si, M.Si. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa integrasi Sistem Manajemen Mutu ini telah diimplementasikan secara tepat dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta. Karena manual mutu Badan POM yang berisi pedoman pelaksanaan QMS yang mengintegrasikan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 ditetapkan pada 3 Maret 2020 dan diterapkan pelaksanaannya di BBPOM di Jakarta.

f. *Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SIPT*

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SIPT dilaksanakan tanggal 26 Mei 2020 untuk seluruh pegawai BBPOM di Jakarta dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Badan POM. Karena Teknologi Informasi merupakan unsur penting yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan penugasan agar dapat memenuhi tuntutan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (*E-government*) agar segala kemudahan dapat difasilitasi untuk melayani masyarakat secara optimal dan tetap terhubung dengan rekan kerja, atasan atau bawahan.

4. Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2020

Balai Besar POM di Jakarta selama 2 (dua) hari melaksanakan Audit Internal. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penilaian awal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Pelaksanaan audit internal diawali dengan *entry meeting*, Senin 11 Mei 2020, dihadiri oleh pejabat struktural, Tim Manajemen Representatif, Tim Satgas SPIP, Tim Auditor internal, dan penyelia laboratorium. Dalam upaya kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19, *entry meeting* dan *exit meeting* dilaksanakan melalui *video conference*.

BADAN POM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
<i>Highlight</i> Kinerja Balai Besar POM di Jakarta	vi
Daftar Isi	xxvii
Daftar Tabel.....	xxviii
Daftar Gambar	xxxi
Daftar Lampiran.....	xxxv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Isu Strategis	9
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	18
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2020	35
2.3. Perjanjian Kinerja	39
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	40
2.5. Metode Pengukuran.....	47
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	49
3.2. Realisasi Anggaran	220
3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan	223
Bab IV Penutup	
4.1. Kesimpulan	233
4.2. Saran	234

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	21
Tabel 2 Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020.....	35
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020.....	38
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020.....	41
Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja	47
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020	49
Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja	51
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020	59
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020	63
Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020.....	76
Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020	86
Tabel 12. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020	90
Tabel 13. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020.....	101
Tabel 14. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	107
Tabel 15. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020.....	111
Tabel 16. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020.....	118
Tabel 17. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	123
Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2020.....	128

Tabel 19. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2020 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	131
Tabel 20. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020.....	164
Tabel 21. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020	168
Tabel 22. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020	173
Tabel 23. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2020.....	188
Tabel 24. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020	192
Tabel 25. Kategori Penilaian SAKIP	194
Tabel 26. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020	200
Tabel 27. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar <i>GLP</i> tahun 2020	204
Tabel 28. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2020	208
Tabel 29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020	212
Tabel 30. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020.....	216
Tabel 31. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2020	221
Tabel 32. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2020.....	225
Tabel 33. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	228

BADAN POM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta.....	4
Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020	8
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	10
Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020.....	11
Gambar 5. Peta Strategi <i>BSC</i> Level II Balai Besar POM di Jakarta.....	20
Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	25
Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2017-2020	60
Gambar 8. Perbandingan realisasi persentase Obat yang MS tahun 2020 dengan Balai lain	61
Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017-2020	65
Gambar 10. Perbandingan realisasi persentase makanan yang MS tahun 2020 dengan Balai lain	66
Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2017-2020	68
Gambar 12. Perbandingan realisasi persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 dengan Balai lain	69
Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.....	72
Gambar 14. Perbandingan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.....	73
Gambar 15. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dan tahun 2019.....	79
Gambar 16. Perbandingan Indeks kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020 dengan Balai Lain	88

Gambar 17. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara.....	93
Gambar 18. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2019 dan 2020	104
Gambar 19. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan 3 (tiga) Balai lain	105
Gambar 20. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.....	114
Gambar 21. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.....	121
Gambar 22. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.....	122
Gambar 23. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.....	129
Gambar 24. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.....	130
Gambar 25. Perbandingan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara.....	149
Gambar 26. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020.....	165
Gambar 27. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020.....	169
Gambar 28. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2020 dengan Balai lain.	177
Gambar 29. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2020 dibandingkan target nasional.	178
Gambar 30. Realisasi Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017-2020	195

Gambar 31. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.....	196
Gambar 32. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019.....	205
Gambar 33. Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.....	206
Gambar 34. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2019	220
Gambar 35. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev.....	231



BADAN POM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	235
Lampiran 2.....	261
Lampiran 3.....	273
Lampiran 4.....	253
Lampiran 5.....	261
Lampiran 6.....	273
Lampiran 7.....	277
Lampiran 8.....	279
Lampiran 9.....	261



BADAN POM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Tugas

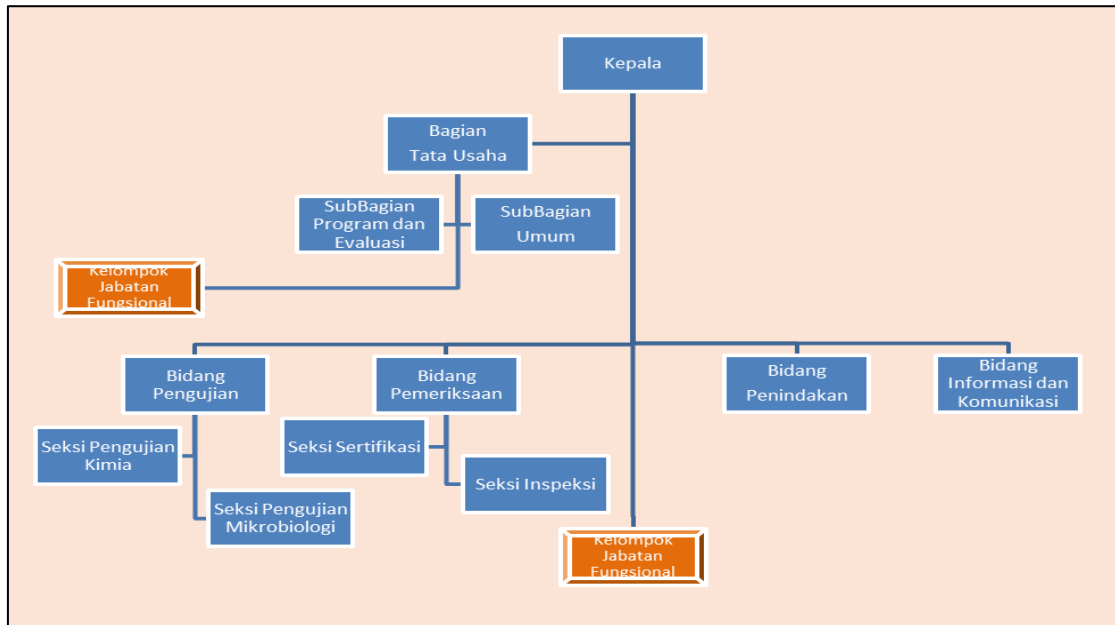
Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

a. **Bidang Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- 1) Seksi Pengujian Kimia;
- 2) Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. **Bidang Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- 1) Seksi Inspeksi
- 2) Seksi Sertifikasi
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. **Bidang Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Bidang Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- 1) Subbagian Program dan Evaluasi
- 2) Subbagian Umum
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

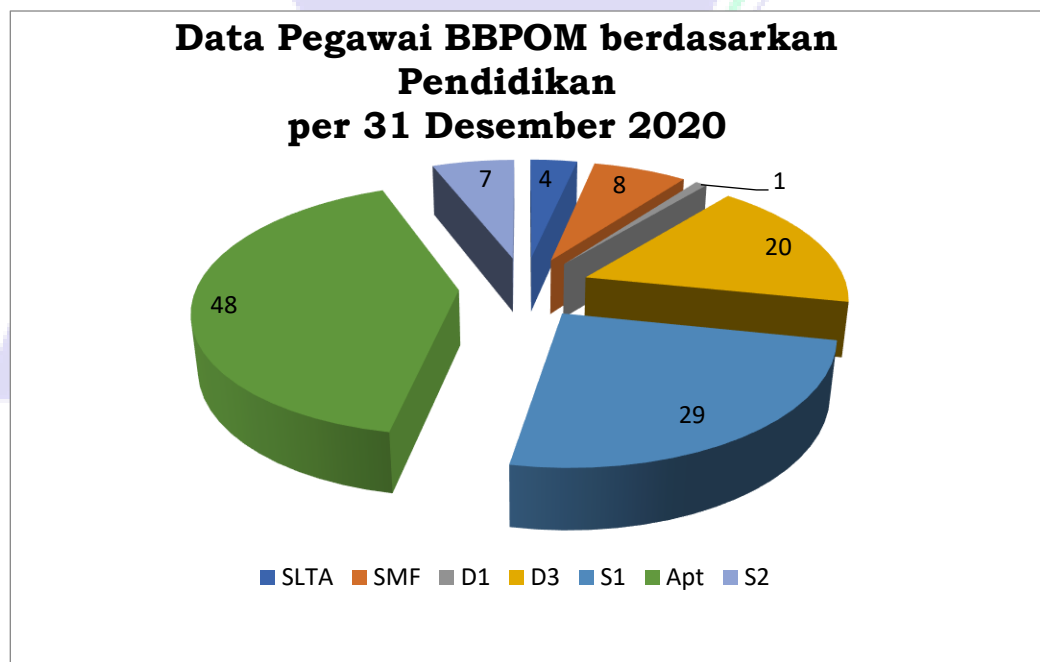
Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di No. sebanyak 114 orang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2**

Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:



Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di No. hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di No. memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Laboratorium Keliling telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017.

4. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di No. bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ 2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 sebesar 44.512.826.000,00 (empat puluh empat milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.

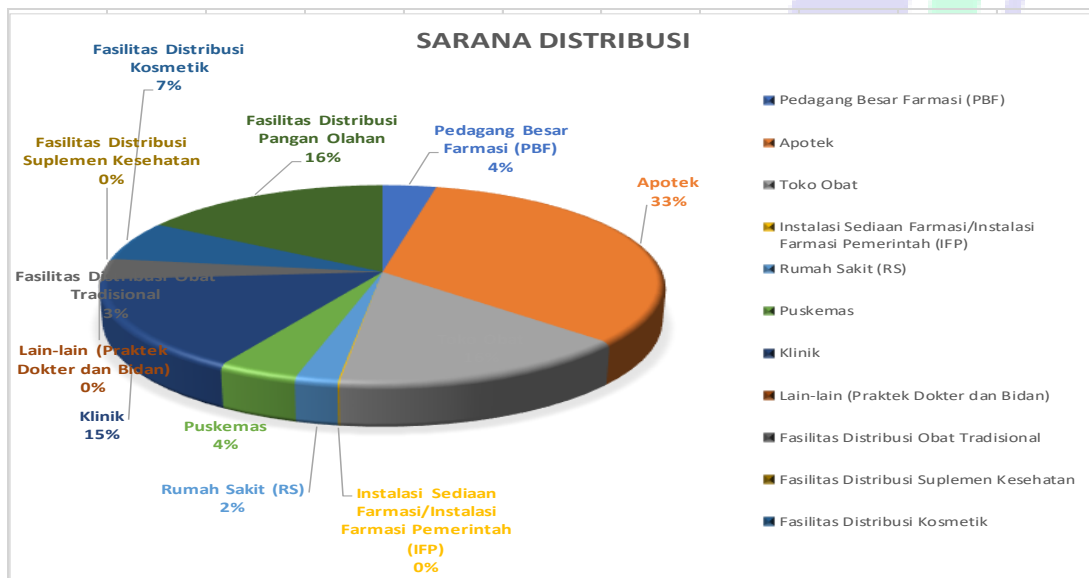
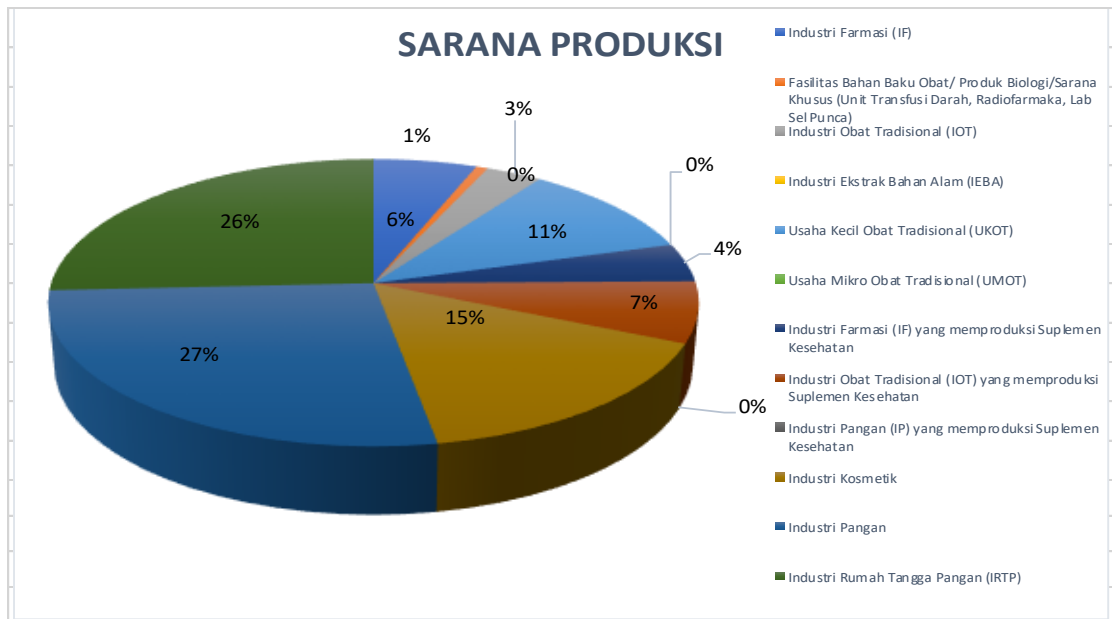


Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada **Gambar 4** di bawah ini.

BADAN POM



Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis - Integrasi beberapa sistem

makanan

- **Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB**
- **Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup *premarket* dan *postmarket***
- **Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas**
- **Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan**
- ***Mobile lab* dan mini laboratorium**
- **Integritas pelayanan publik**
- **Fasilitas laboratorium yang memadai**
- **Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media *online*, cetak dan media sosial**
- **Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha**
- **Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum,**
- **Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai**
- ***Networking* yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah**
- **Laboratorium telah terakreditasi**

mutu belum efisien

- **Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian**
- **ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu**
- **Sarana prasarana belum optimal**
- **Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal**
- **Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi**
- **Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum**
- **Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes**

<p>ISO 17025 : 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015 	
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara <i>online</i> - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i> - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> - Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024 - Peningkatan daya saing pelaku usaha - Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi

<p>pengawasan dan pembinaan obat dan makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Perkembangan iklan yang begitu ceoat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan 	<p>obat dan makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modus pelanggaran semakin kompleks - Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan - Adanya program Nasional (JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan
--	---

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya.

Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization (WHO)* dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui

pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan

pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah,

untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Pandemi COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (*work from home/WFH*). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dalam rangka tetap melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta

BADAN POM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

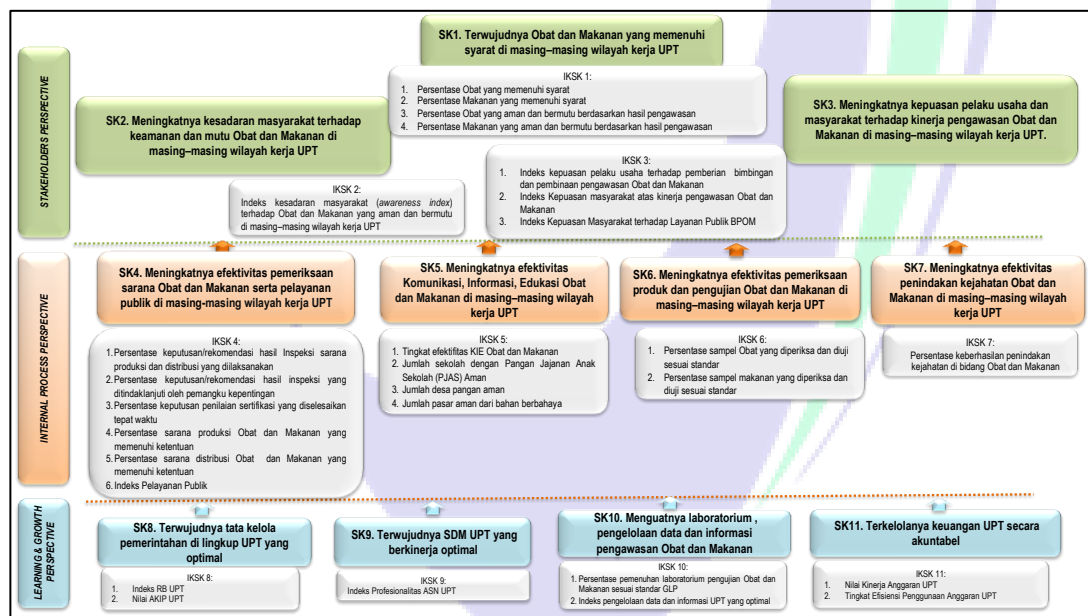
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang

dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

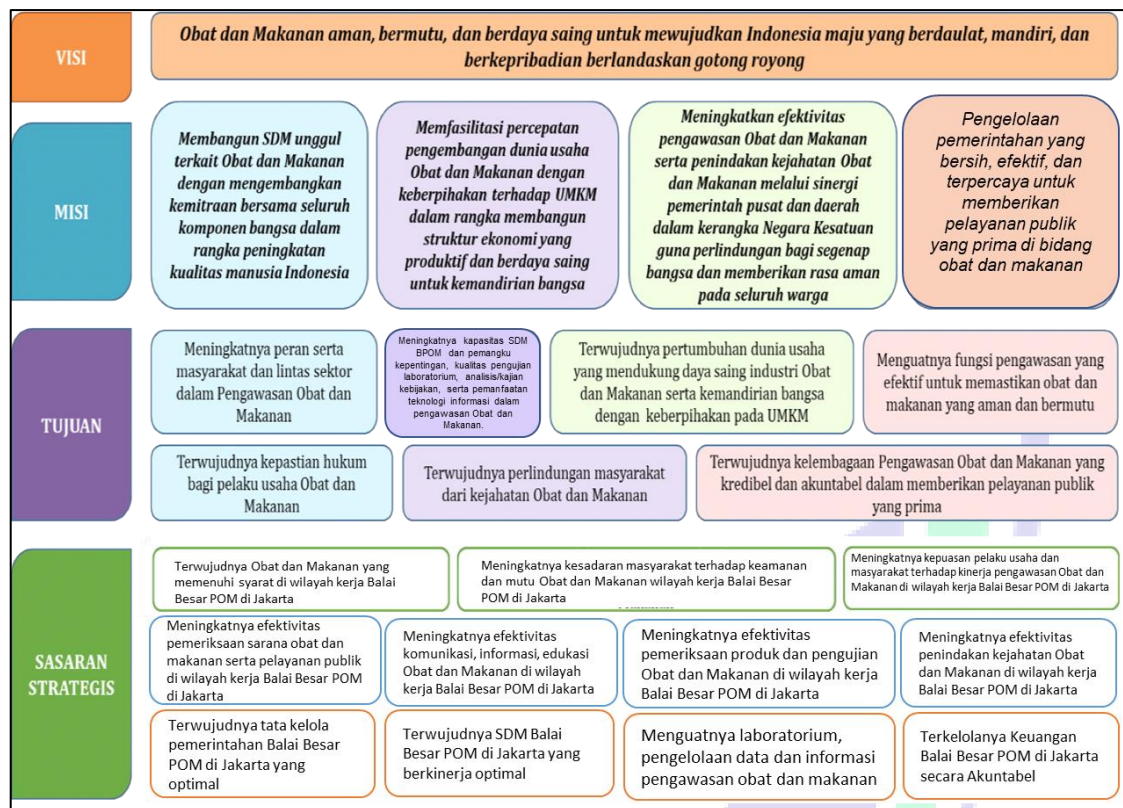
Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta		Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78	80	83	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan	82	84	86	87,5	89

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
		Internal Process					

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jakarta yang optimal						
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus

dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta.. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang *disampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan

pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2020 ditargetkan sebesar 86%**
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2020 ditargetkan sebesar 78%**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2020 ditargetkan sebesar 86%**
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2020 ditargetkan sebesar 78%**

b. Sasaran Strategis Ke-2: *Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha

mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 75 pada akhir tahun 2020.

c. Sasaran Strategis Ke-3: *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk

mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 82 di tahun 2020;**
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 72 di tahun 2020;**
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 88,5 di tahun 2020.**

Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-4: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 87% pada akhir tahun 2020**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 55,5% pada akhir tahun 2020**
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 83% pada akhir tahun 2020**

- (4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 46% pada akhir tahun 2020**
 - (5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 55% pada akhir tahun 2020**
 - (6) **Indeks pelayanan publik, dengan target 3,51 pada akhir tahun 2020**
- b. Sasaran Strategis Ke-5: *Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta***

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- (1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 89,21 pada akhir tahun 2020**
- (2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 16 pada akhir tahun 2020**
- (3) **Jumlah desa pangan aman dengan target 4 pada akhir tahun 2020**
- (4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 1 pada akhir tahun 2020**

- c. Sasaran Strategis Ke-6: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta***

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM

di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

(1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90% pada akhir tahun 2020

(2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 89% pada akhir tahun 2020

d. Sasaran Strategis Ke-7: *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 32% pada akhir 2020.**

Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat

mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 88 pada akhir tahun 2020

(2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 81 pada akhir tahun 2020

b. Sasaran Strategis Ke-9: *Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal*

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan

dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 75 di tahun 2020**

c. Sasaran Strategis Ke-10: *Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan*

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

(1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 82% pada 2020

(2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 1,51 pada tahun 2020

d. Sasaran Strategis Ke-11: *Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel*

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan

Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 93 sebesar pada tahun 2020**
- (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target Efisien (95%) pada tahun 2020**

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2020

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 2 Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	05-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82

	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		17-Jumlah desa pangan aman	4
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32
8.		22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88

	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 44.512.826.000,00 (empat puluh empat milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2020 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	05-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.5
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,21
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		17-Jumlah desa pangan aman	4
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32
8	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88
		23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
9	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	informasi pengawasan obat dan makanan	26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51
11	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja tiwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86%	86,00%	86,00%	86,00%	331.779.000
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	78,00%	78,00%	78,00%	192.812.900
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	86,00%	86,00%	86,00%	331.779.000
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	78,00%	78,00%	78,00%	192.812.900
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	05-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta				75	122.037.300

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				82	83.176.500
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan				72	122.037.300
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				88,5	1.592.766.000
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	87%	87%	87%	207.941.250
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil	55,50%	55,50%	55,50%	55,50%	207.941.250

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	83%	83%	181.250.000
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	46%	46%	46%	82.056.000
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	55%	250.650.000
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta					125.735.400
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	89,21	89,21	89,21	780.180.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman				16	256.976.000
		17-Jumlah desa pangan aman				4	659.498.000
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya				1	85.000.000
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	90%	284.382.000
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	89%	165.268.200
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8%	16%	24%	32%	1.176.427.000
8		22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88			88	176.250.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81			81	182.398.500
	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75			75	23.246.822.000
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82%	82%	82%	82%	1.026.016.000
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	1,51	1,51	1,51	204.094.000
11		7-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	45	55	75	93	176.250.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	182.398.500



BADAN POM

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019, membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada tahun 2020 Balai Besar POM di Jakarta semua sasaran strategis telah dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya.

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	98,86	BAIK
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	110,04	SANGAT BAIK
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101,92	BAIK

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	110,78	SANGAT BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101,07	BAIK
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	96,79	BAIK
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	120	SANGAT BAIK
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	93,75	BAIK
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	111,92	SANGAT BAIK
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	105,55	BAIK
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	100,62	BAIK

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
1	Stakeholder	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	76,74%	89,23	89,23	CUKUP
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95,26%	122,13	120,00	SANGAT BAIK
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	71,12%	82,70	82,70	CUKUP
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80,75%	103,53	103,53	BAIK
		2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja	75	82,53	110,04	110,04	SANGAT BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		kerja Balai Besar POM di Jakarta	Balai Besar POM di Jakarta					
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	85,53	104,30	104,30	BAIK
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	73,30	101,81	101,81	BAIK
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	88,19	99,65	99,65	BAIK
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	87	85,24%	97,98	97,98	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,50	75,49%	136,02	120,00	SANGAT BAIK
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00	77,00%	92,77	92,77	BAIK
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	55,94%	121,61	120,00	SANGAT BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	72,61%	132,02	120,00	SANGAT BAIK
			Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4,00	113,96	113,96	SANGAT BAIK
2	Internal Process	5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	93,02	104,27	104,27	BAIK
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	12	100,00	100,00	BAIK
			Jumlah desa pangan aman	4	5,0	100,00	100,00	BAIK
			Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	100,00	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	92,29%	102,54	102,54	BAIK
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	81,03%	91,04	91,04	BAIK
		7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54,37%	163,30	120,00	SANGAT BAIK
3	Learning and Growth	8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	80,17	91,10	91,10	BAIK
			Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	78,08	96,40	96,40	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		Besar POM di Jakarta yang optimal						
		9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	83,94	111,92	111,92	SANGAT BAIK
		10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	74,70%	91,10	91,10	BAIK
			Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2,08	137,75	120,00	SANGAT BAIK
		11. Terkelolanya Keuangan UPT Balai	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	90	89,264	95,98	95,98	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26	105,26	BAIK

*) Dihitung terhadap target sesuai target APBN-P



BADAN POM

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator mencapai target dengan kriteria “**sangat baik**”, 17 (tujuh belas) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**”, target dengan 2 (dua) indikator mencapai kategori “cukup”.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner* dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86	76,74	89,24	Cukup

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Obat yang *disampling* sesuai dengan pedoman *sampling* tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- (2) Produk kadaluarsa
- (3) Produk rusak
- (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan

pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

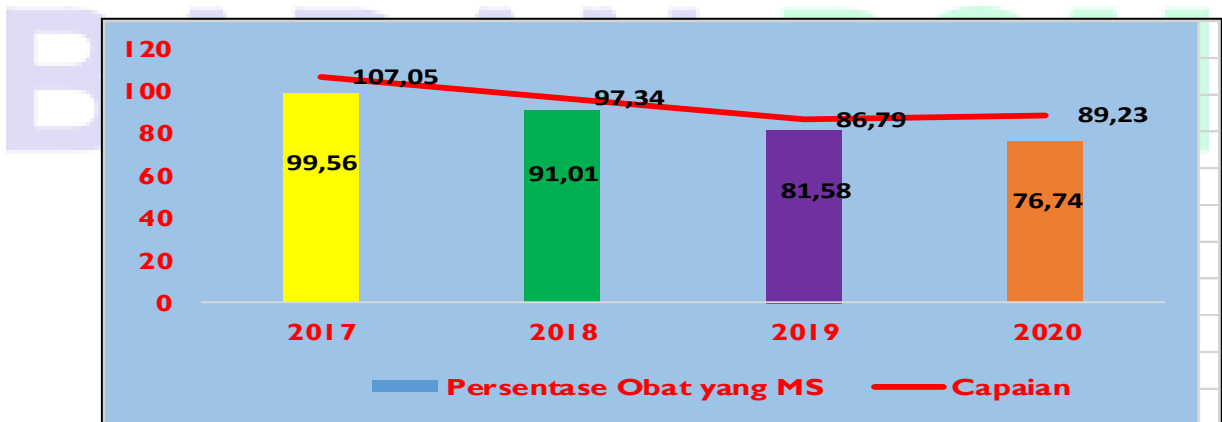
$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yaitu **89,24 %** dengan kriteria “**Cukup**”.

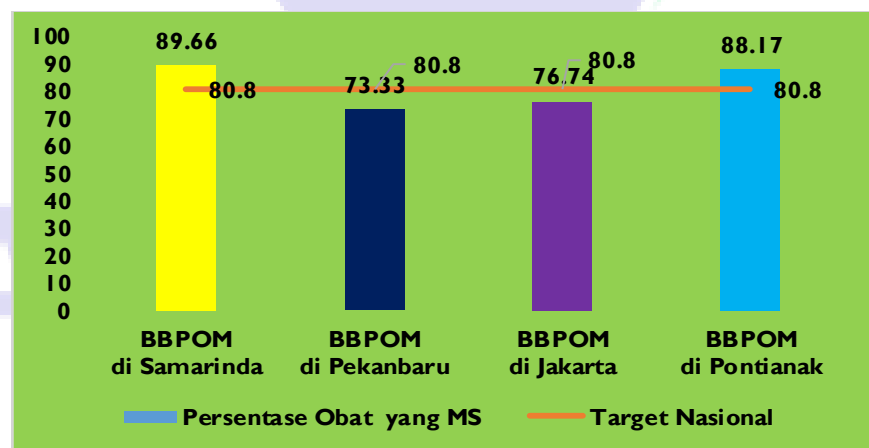
b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019-2017*



Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2017-2020

Terdapat perubahan definisi operasional untuk Indikator Kinerja Utama “persentase obat yang memenuhi syarat” mulai tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, persentase obat yang memenuhi syarat hanya diperhitungkan dari hasil pengujian komoditi obat yang disampling secara targeted dan juga tidak memperhitungkan evaluasi penandaan. Untuk tahun 2019, persentase obat yang memenuhi syarat masih tetap diperhitungkan dari hasil pengujian komoditi obat saja tetapi samplingnya secara acak dan targeted serta sudah memperhitungkan hasil evaluasi penandaan. Sedangkan di tahun 2020, persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan gabungan sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disampling secara acak. Dengan adanya perubahan definisi operasional yang sangat signifikan untuk Indikator Kinerja Utama “persentase obat yang memenuhi syarat” dari tahun 2018 sampai 2020, maka capaian di tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

- c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 8. Perbandingan realisasi persentase Obat yang MS tahun 2020 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Pekanbaru masih berada di bawah target nasional, sedangkan 2 balai lainnya yang setara berada **di atas** target nasional 80,8%.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri Farmasi di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Kendala operasional laboratorium untuk program pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena sudah dilaksanakannya program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor). sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya. Program ini diharapkan dapat terlaksana untuk tahun tahun yang akan datang

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

- a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	78	95,26	122,2	Tidak Dapat Disimpulkan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- (2) Produk kadaluarsa
- (3) Produk rusak
- (4) Tidak memenuhi ketentuan label
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk kriteria 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel makanan yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

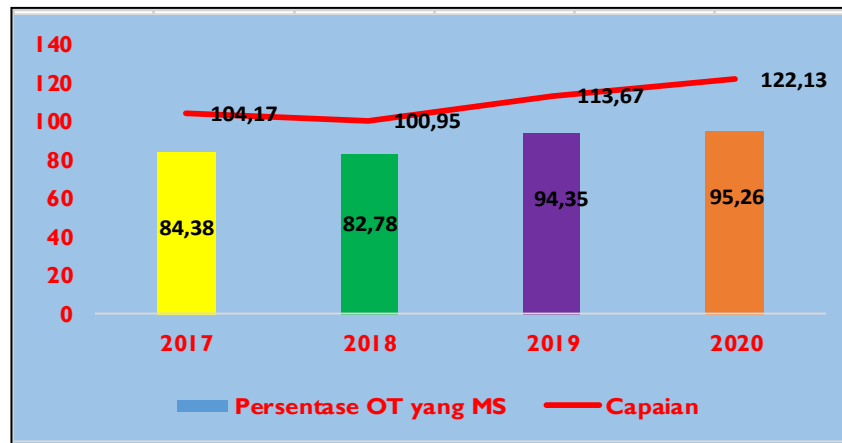
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Capaian persentase pangan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta 2020 Triwulan IV sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 122,12% dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan”**.

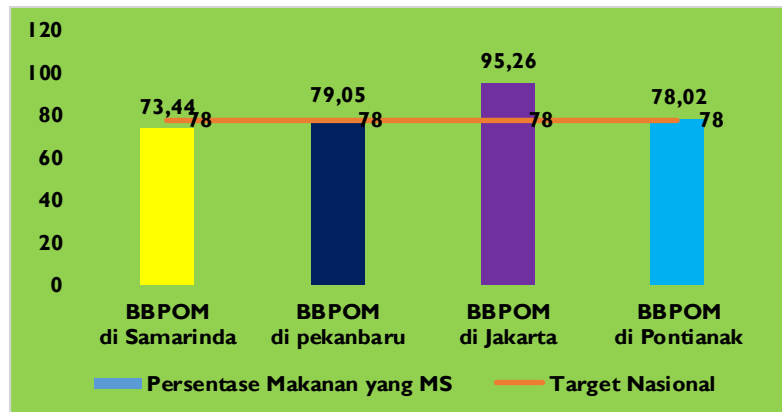
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019-2017



Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017-2020

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2019. Terdapat sedikit perubahan cara perhitungan indicator ini. Jika pada tahun 2019, capaian dihitung terhadap hasil sampling acak dan targeted, di tahun 2020 capaian persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung hanya terhadap hasil sampling acak. Hal ini mungkin menjadi penyebab capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan empat mengalami kenaikan sedikit dibanding tahun sebelumnya.

- c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 10. Perbandingan realisasi persentase makanan yang MS tahun 2020 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Jakarta dan 2 balai lainnya yang setara berada **di atas** target nasional 78%. Dan ada satu Balai Besar POM yang mempunyai realisasi nya di bawah target nasional.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 sudah melebihi target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi ketentuan penandaan. Tingginya capaian disebabkan penetapan target tahun 2020 terlalu rendah, namun penetapan target tahun 2020 sudah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik.

Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

- Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi makanan yang Baik (CPMB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi telah dilaksanakan di tahun 2020, sehingga berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja.
- Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman
- Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	71,12	82,69	Cukup

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

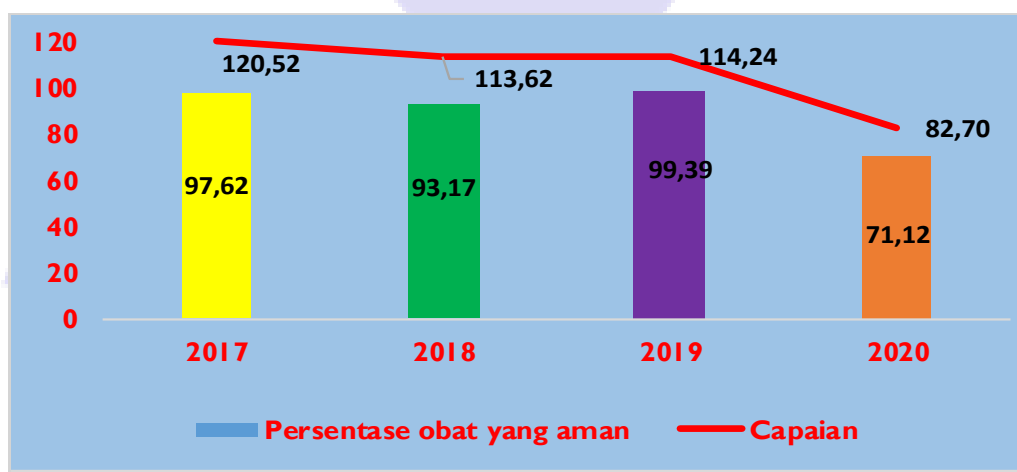
$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:
a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yaitu 82,69% dengan kriteria “**cukup**”.

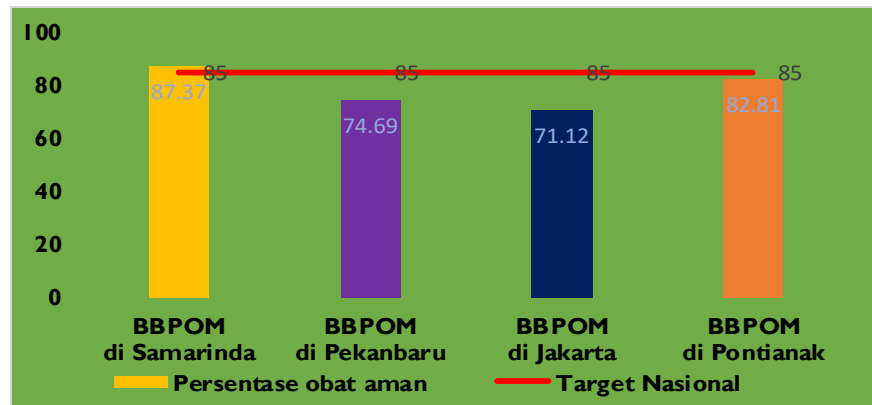
b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019-2017*

Indikator kinerja utama “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan di tahun 2020. Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang disampling secara targeted. Dengan demikian data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.



Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2017-2020

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 12. Perbandingan realisasi persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 dengan Balai lain

Gambar **12** tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai Besar POM di Jakarta dan 2 Balai Besar POM yang setara berada **di bawah** target nasional 85% dan untuk Balai Besar POM di Samarinda berada di atas target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2020 sudah melebihi target dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi ketentuan penandaan. Tingginya capaian disebabkan penetapan target tahun 2020 terlalu rendah, namun penetapan target tahun 2020 sudah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi

produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang aman dan bermutu, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri Farmasi di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Peningkatan frekuensi penyuluhan dan penyebaran informasi tentang keamanan obat dan makanan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Karena indikator kinerja utama “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator kinerja utama yang baru ditetapkan di tahun 2020, maka belum ada rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	78	80,75	103,52	Baik

Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

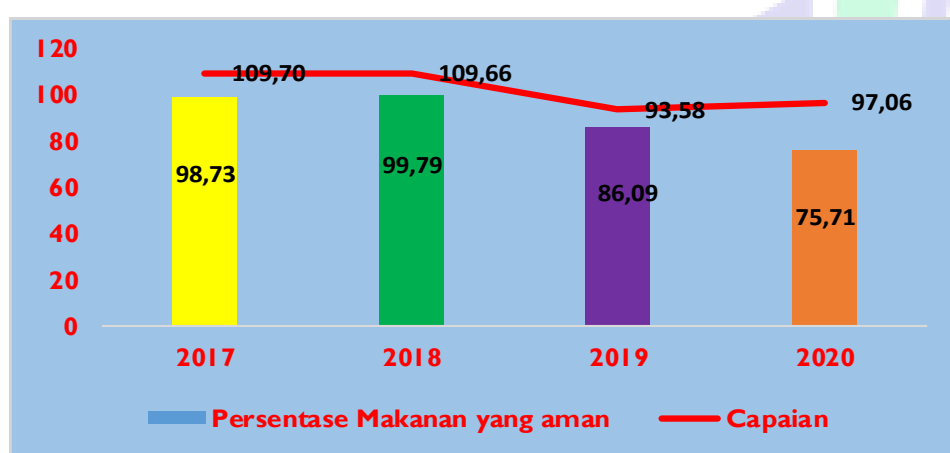
Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 103,52% dengan kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019-2017

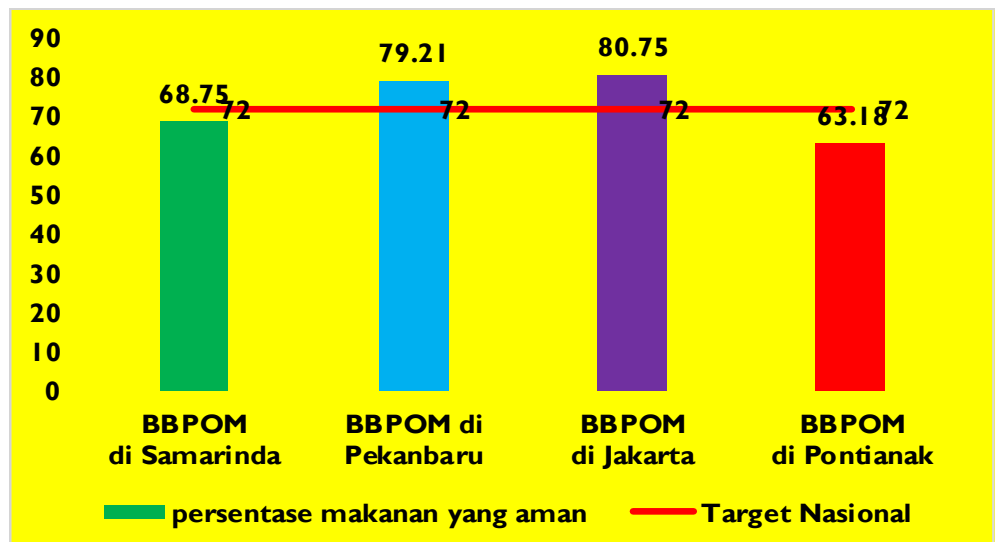
Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan di tahun 2020. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Dengan demikian data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.



Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.

BADAN POM

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/ setara*



Gambar 14. Perbandingan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM Pekanbaru berada diatas target nasional 72% dan untuk Balai Besar POM di Samarinda dan Pontianak berada di bawah target nasional.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Persentase Makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,52% dengan kriteria baik. Untuk tahun 2019, pemeriksaan sampel Makanan yang aman dan bermutu tidak memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Perubahan cara pengukuran pemeriksaan sampel Makanan yang aman dan bermutu diterapkan sepenuhnya pada tahun 2020, sehingga target sampel Makanan yang aman dan bermutu menurun di tahun 2020 78%. Persentase Makanan

yang aman dan bermutu di tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya karena perubahan cara pengukuran capaian tersebut, namun masih melebihi target yang ditetapkan, sementara temuan makanan ilegal di Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang tersampling mungkin belum sepenuhnya mewakili populasi makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan teknik *sampling* acak yang lebih representatif.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi makanan yang Baik (CPMB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi telah dilaksanakan di tahun 2020, sehingga berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja.
- Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman
- Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Karena indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator kinerja utama yang baru ditetapkan di tahun 2020, maka belum ada rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS} = \frac{89,24\% + 122,12\% + 82,69\% + 103,52\%}{4}$$

$$\text{NPS} = 99,39\%$$

Dengan NPS 99,39%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

BADAN POM

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

5. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	82,53	110,04	Sangat Baik

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam memilih Obat dan Makanan. Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu **pengetahuan, sikap dan perilaku.**

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman

dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% dan dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata

provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap target responden. Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan termasuk dalam Daftar Sampel Rumah Tangga (DSRT) dalam Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) sebanyak 1.157 blok sensus. Setiap blok sensus berjumlah 10 responden dan total berjumlah 11.570 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel telah dilakukan pengacakan oleh pihak BPS sehingga tingkat keterwakilan dan keacakan (*random*) sampel sangat tinggi. Untuk responden rumah tangga, unit sampling terkecil dalam survei ini adalah rumah tangga sesuai Blok Sensus BPS. Pada pengukuran IKM tahun 2020, komposisi sampel responden di Provinsi DKI Jakarta tersebar di 5 kabupaten/kota, terdiri dari 17 kelurahan dan masing-masing kelurahan terdiri dari 10 rumah tangga sehingga jumlah sampel adalah 170 rumah tangga. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 - 60
Cukup Baik	60 - 75
Baik	75 - 90
Sangat Baik	\geq 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus :

$$\text{Indeks} = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

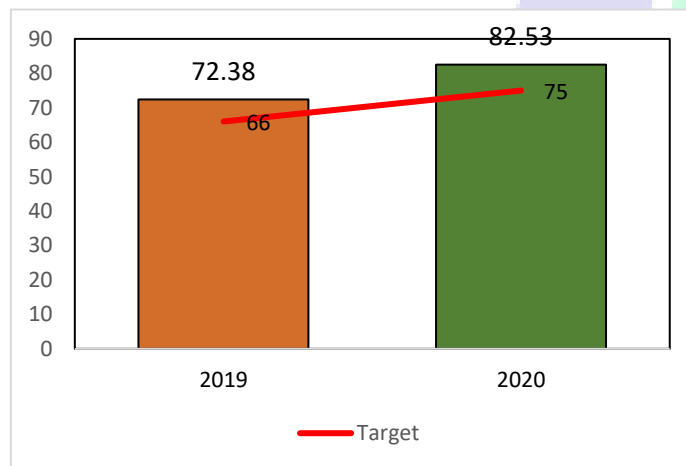
I_{\min} = skor faktor minimal

I_{\max} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2020, sehingga pada triwulan ke-3 belum ada realisasi dan capaian.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



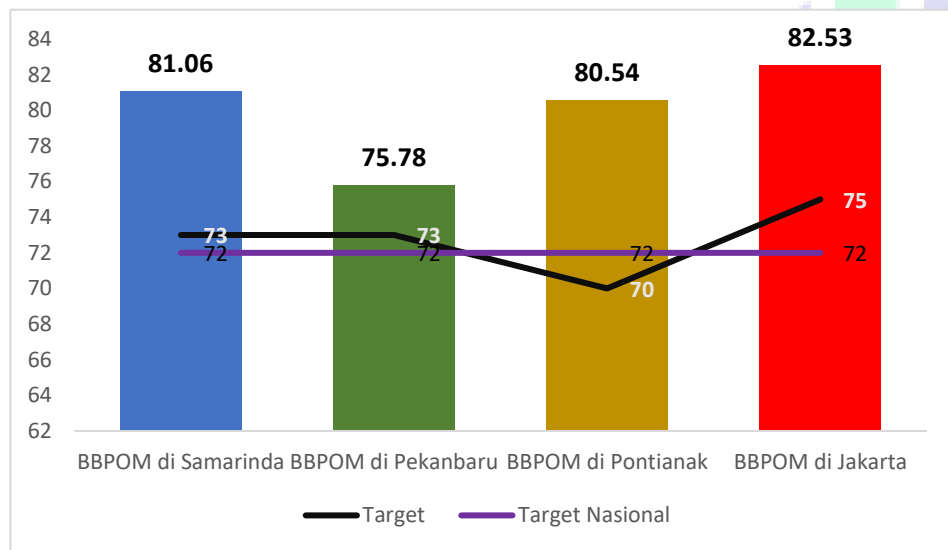
Gambar 15. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat

(*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dan tahun 2019

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019, indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar 72.38 masih bernilai Cukup Baik namun

sudah melampaui target sebesar 66. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 sebesar 82.53 bernilai Baik dan juga telah melampaui target sebesar 75.

- c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 16. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta telah melampaui target kinerja dan target nasional. Begitu pula dengan hasil indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Pontianak sudah melampaui target dan target nasional yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hasil indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 telah melampaui target kinerja dan target nasional serta menunjukkan hasil yang signifikan bila dibandingkan dengan nilai indeks tahun sebelumnya. Nilai indeks kesadaran masyarakat yang diperoleh tahun 2020 ialah sebesar 82.53 (baik) dengan rincian indeks pengetahuan 83.38 (baik), indeks sikap 84.87 (baik) dan indeks perilaku 79.35 (baik). Bila dibandingkan dengan indeks kesadaran masyarakat yang diperoleh tahun 2019 sebesar 72.38 (cukup baik) dengan rincian indeks pengetahuan 75.74 (baik), indeks sikap 83.05 (baik) dan indeks perilaku 58.36 (kurang baik), terdapat peningkatan yang signifikan dari segala aspek, terutama aspek perilaku. Bila dibandingkan dengan indeks kesadaran masyarakat yang diperoleh tahun 2019, terdapat peningkatan dari ketiga aspek yang terlibat, terutama aspek pengetahuan dan perilaku. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diduga dapat terjadi karena KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan efektif. Survei efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas KIE mencapai 93.02 (104.27%). Perilaku masyarakat mengenai cara menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur serta mengenai produk aman dan bermutu meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan sikap terhadap Obat dan Makanan yang bermutu. Dari seluruh responden yang disurvei, sekitar 90% responden menunjukkan sikap yang positif terhadap Obat dan Makanan yang ditunjukkan dari pendapat mereka yang menganggap penting kondisi kemasan produk, mengetahui efek samping produk,

membaca petunjuk penggunaan, mengetahui petunjuk penyimpanan, produk harus terdaftar di BPOM, dan mengetahui tanggal kedaluwarsa produk serta mengimplementaskannya dalam keseharian melalui perilaku.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan peningkatan kinerja meliputi kegiatan KIE Obat dan Makanan dengan berbagai format kegiatan dan menasar berbagai kalangan masyarakat antara lain:

- Telah dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Obat dan Makanan yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan ibu rumah tangga, komunitas sekolah, komunitas masyarakat, dan pelaku usaha di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Diselenggarakannya KIE melalui pameran IFBC Expo 2020 (sebelum pandemi Covid-19) sebagai media edukasi terkait Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan serta mengenai informasi terkait layanan sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk Pangan/Kosmetika/Obat Tradisional, izin produksi Kosmetika/Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan audit sertifikasi pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik untuk izin sarana distribusi obat (PBF) kepada para pengunjung dari berbagai kalangan, yaitu pejabat di lingkungan provinsi DKI Jakarta, PNS/Swasta, mahasiswa, pelaku usaha, pelajar, dan ibu rumah tangga.
- Telah diselenggarakannya sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat Anggota DPR RI Komisi IX, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 11 titik baik sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan kombinasi penyelenggaraan acara secara luring dan daring terhadap berbagai kelompok masyarakat, yaitu Ibu Rumah Tangga dan Karang Taruna.
- Terselenggaranya KIE dalam rangka pencegahan Covid-19 di Kelurahan intervensi Desa Pangan Aman bersama Kader

Keamanan Pangan serta di Pasar Rakyat Aman. Kegiatan KIE ini dilakukan melalui pemasangan poster tentang himbauan *Physical Distancing*, untuk tetap di rumah saja, pola hidup sehat, berjualan dengan sehat, himbauan untuk selalu pakai APD dengan menggunakan bahasa Betawi di lokasi strategis seperti ATM Bank di Kelurahan, dan dengan membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung pasar.

- Adanya intensifikasi pengawasan pangan jajanan Ramadhan (takjil) dan KIE Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi tentang bahan berbahaya dan membagikan leaflet dan pemberian masker kepada pedagang yang belum menggunakan masker agar dapat memutus rantai penularan Covid-19.
- Diselenggarakannya KIE Sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional dan Ritel Modern yang bertujuan agar para pengelola pasar dan pedagang dapat menerapkan prinsip prinsip CRPB di pasar tradisional dan pasar sehat sehingga dapat sinergi dan mendukung Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya serta agar pengelola dan pelaku usaha ritel mengetahui dan menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik dan dapat memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi persyaratan aman dan bermutu sebelum dikonsumsi oleh konsumen.
- Adanya penyelenggaraan edukasi masyarakat mengenai Obat dan Makanan melalui *Talkshow* di Radio. Dalam *talkshow* tersebut, Drs. Safriansyah, Apt, M. Kes menyampaikan tentang Obat Tradisional serta Bahaya dari Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta menyampaikan agar masyarakat tidak salah memilih atau mengonsumsi Obat Tradisional dan agar selalu Cek KLIK sebelum membeli Obat dan Makanan yaitu Cek Kemasan, cek Label, cek Izin Edar, cek Kedaluwarsa.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil kinerja indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta, antara lain adalah penyebaran informasi menggunakan Platform media sosial secara *live*, misalnya *Youtube*, *Live Instagram*, dll.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 antara lain:

- 1) Intensifikasi penggunaan media sosial (*Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube*) sebagai media KIE dan penyebaran informasi mengenai Obat dan Makanan. Kemajuan teknologi dan berkembangnya penggunaan media sosial menyebabkan akses informasi mengenai Obat dan Makanan semakin mudah. Hal ini menjadi salah satu bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif dengan cara menyajikan informasi yang menarik mengenai Obat dan Makanan yang bermutu dalam bentuk infografis, video, *podcast*, dan *talkshow* yang dapat diakses tanpa ada batasan tempat dan waktu. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku semakin meningkat.
- 2) Adanya program prioritas nasional intervensi keamanan pangan yang meliputi program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang berfokus pada program pemberdayaan masyarakat agar kemandirian pangan dan praktik keamanan pangan dapat terwujud hingga tingkat individu. Tahapan kegiatan penunjang dalam program intervensi ini seperti Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan, Bimtek Komunitas Desa, Bimtek PJAS, Bimtek Pengelola Pasar, Kampanye Pasar Aman memberikan

dampak positif bagi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Selain itu, adanya program Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan dalam Program Desa Pangan Aman dapat secara langsung melakukan pendampingan terhadap praktik keamanan pangan kepada komunitas desa memberikan dampak yang positif pula terutama terhadap aspek perilaku.

- 3) Adanya inisiasi program donasi oleh BBPOM di Jakarta terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak Covid-19, mengingat DKI Jakarta merupakan episentrum pandemi. Melalui kegiatan ini, BBPOM di Jakarta juga berupaya untuk lebih dekat ke masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi salah satu media KIE dan penyebaran informasi mengenai praktik hygiene sanitasi serta Obat dan Makanan yang bermutu yang penting bagi kesehatan masyarakat.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi pada pencapaian kinerja indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2019 yaitu berupa upaya untuk memperbanyak kegiatan KIE dan penyebaran informasi kepada masyarakat, terutama melalui pemanfaatan media social (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*). Terlebih hal ini sangat efektif mengingat adanya pengalihan beberapa program KIE dari sebelumnya tatap muka menjadi daring di tengah situasi pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini. Upaya ini akan terus ditingkatkan ke depannya, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan meningkatkan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masa mendatang.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	85,53	104,30	Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Target dinyatakan dalam angka. Indeks kepuasan Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Melalui survei dengan metode *multistage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10%.

Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun

Kriteria yang digunakan adalah:

Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):

$$\text{Indeks} = (I_i - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min}) \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots,$$

n.

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

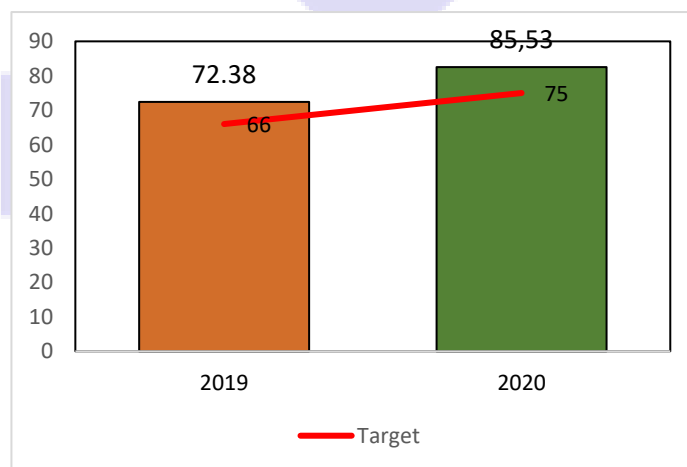
I_{\min} = skor faktor minimal

I_{\max} = skor faktor maksimal

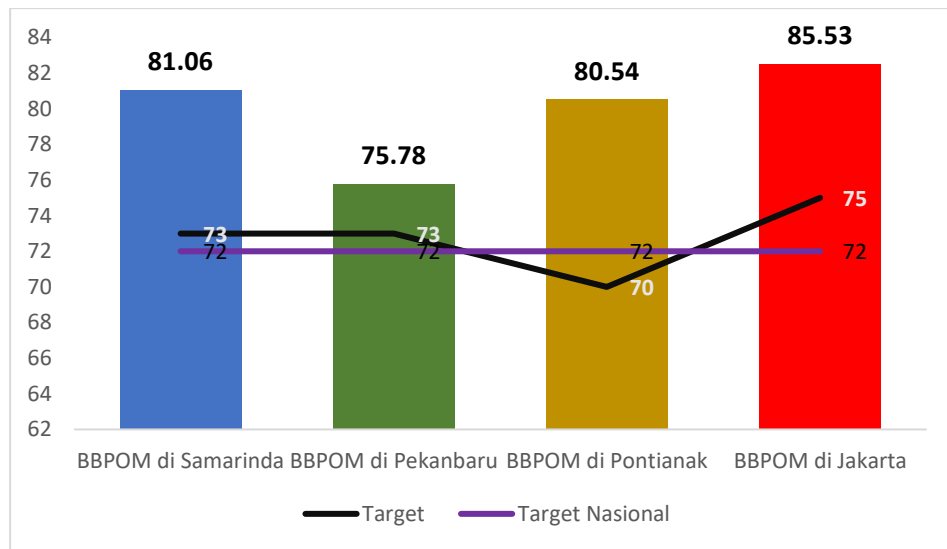
n = banyaknya responden

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 sebesar 85,53 bernilai Baik dan juga telah melampaui target sebesar 82.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 16. Perbandingan Indeks kepatuhan (*Compliance Index*) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020 dengan Balai Lain

Berdasarkan Gambar 16 diketahui bahwa realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Pekanbaru dan Balai Besar POM di Pontianak di atas target nasional.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh kegiatan pembinaan pelaku usaha antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan desk CAPA.

- e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah pembinaan penerapan CPPOB secara bertahap kepada UMKM di Bidang Pangan oleh petugas Balai Besar POM di Jakarta telah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik di DKI Jakarta. Melalui pendampingan secara berkesinambungan, diharapkan UMKM Pangan tersebut dapat menerapkan aspek-aspek CPPOB secara bertahap.

- f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang ada. Untuk pengujian sampel pihak ketiga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Untuk layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor Balai Besar POM di Jakarta maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon ataupun media sosial seperti *instagram, facebook, dan twitter*.

Layanan informasi melalui *Whatsapp* meningkatkan jumlah layanan informasi dan pengaduan di Balai Besar POM di Jakarta dan meningkatkan kecepatan respon yang diberikan. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Jakarta.

7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 12. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	72	73,3	101,81	Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dari BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan.

Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan.

Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis

sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap target responden. Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan termasuk dalam Daftar Sampel Rumah Tangga (DSRT) dalam Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) sebanyak 1.157 blok sensus. Setiap blok sensus berjumlah 10 responden dan total berjumlah 11.570 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel telah dilakukan pengacakan oleh pihak BPS sehingga tingkat keterwakilan dan keacakan (*random*) sampel sangat tinggi. Untuk responden rumah tangga, unit sampling terkecil dalam survei ini adalah rumah tangga sesuai Blok Sensus BPS. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 - 60
Cukup Baik	60 - 75
Baik	75 - 90
Sangat Baik	\geq 90

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan meliputi lima indikator pengukuran, yaitu: (1) *Reliability*, kemampuan pengawasan Obat dan Makanan; (2) *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan; (3) *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk; (4) *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman; (5) *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya. Lingkup pertanyaan kuesioner kepuasan masyarakat meliputi kepuasan terhadap kinerja dan layanan BPOM serta pertanyaan tambahan terkait Covid-19.

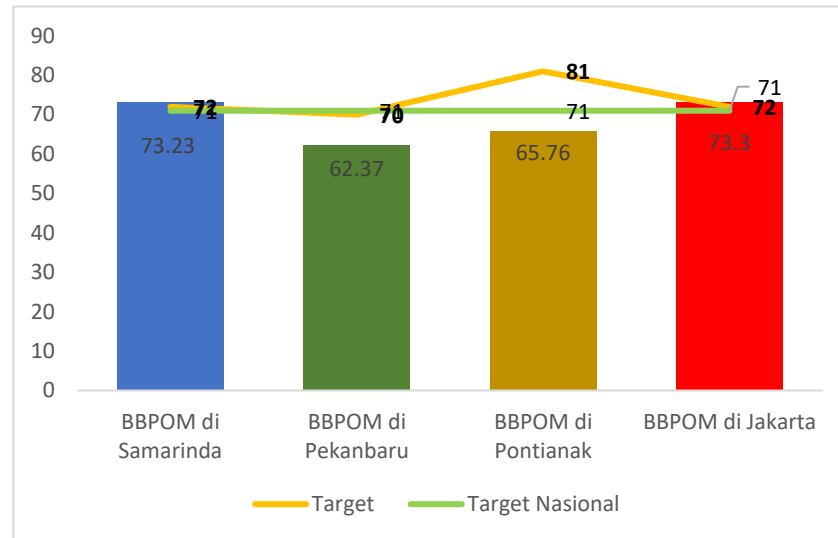
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 diperoleh sebesar 73,30 (Cukup Baik). Apabila dibandingkan dengan target sebesar 72, maka realisasi ini telah melampaui dengan capaian sebesar 101,81% (Baik).

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 merupakan indikator yang baru diukur tahun 2020, sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2019.

BADAN POM

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 17 Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah melampaui target kinerja dan target nasional. Begitu pula dengan hasil indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda. Sedangkaiannya capaian indeks yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Pontianak masih berada di bawah target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi melalui berbagai format dan media, yaitu sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat, pameran, *talkshow* di radio, dan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*).
- 2) Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan yang meliputi pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP).
- 3) Pelaksanaan program-program yang meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang sekaligus bertujuan untuk penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu.
- 4) Pelaksanaan kegiatan Advokasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait program keamanan pangan terpadu di provinsi DKI Jakarta (PJAS, PABB, GKPD) dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Pelaksanaan program intensifikasi pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan menjelang Hari Raya dan Nataru bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait.
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha melalui berbagai program, seperti Kuliah *Whatsapp* mengenai informasi terkait

proses registrasi Obat dan Makanan serta fasilitasi UMKM Pangan dalam rangka memperoleh nomor izin edar BPOM.

- 7) Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain peningkatan pelaksanaan KIE Obat dan Makanan melalui berbagai *platform* media sosial, seperti *Youtube* dan *Live Instragram* serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi Obat dan Makanan melalui *Whatsapp* serta media sosial (*Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*).

- e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 ialah adanya penerapan inovasi pelayanan publik meliputi LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi *Whatsapp*), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi *Online*), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru) yang memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di BBPOM di Jakarta tanpa terbatas waktu dan tempat terlebih dengan adanya pembatasan-pembatasan layanan secara tatap muka selama pandemi Covid-19 sehingga indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

dapat meningkat. Selain itu, peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan diduga dapat terjadi karena kegiatan KIE Obat dan Makanan serta kegiatan pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik yang dilaksanakan efektif. Survei efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas KIE mencapai 93.02 (104,27%). Serta capaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dinilai sangat baik (115,93%).

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja ialah penguatan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Penerapan dan peningkatan inovasi pelayanan publik juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas KIE yang akan berdampak pada tingkat kepuasan dan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

BADAN POM

7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

b. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	88,5	88,19	99,65	Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Target dinyatakan dalam angka.

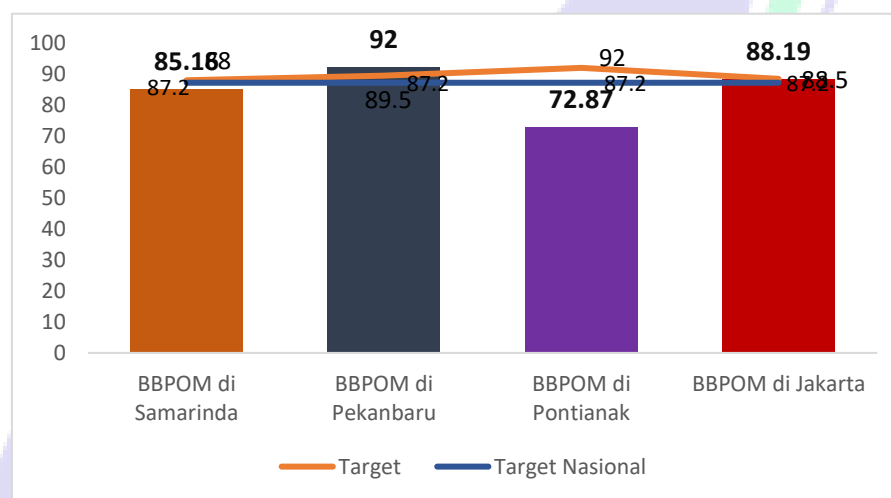
Indeks kepuasan Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10%.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang baru diukur tahun 2020, sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 18 Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 (88.19) telah melampaui target nasional (87.2) dan memiliki capaian kinerja 99.65%. Hasil indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru telah melampaui

baik target maupun target nasional. Sedangkan, hasil indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak masih berada di bawah target dan target nasional.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Hasil indeks kepuasan terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 masuk kategori Baik, walaupun nilainya lebih rendah dari target. Keberhasilan ini diduga disebabkan antara lain oleh:

- 1) Penambahan opsi media layanan informasi dan pengaduan secara non tatap muka. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, BBPOM di Jakarta menyediakan layanan informasi dan pengaduan non tatap muka menggunakan aplikasi *Whatsapp* dan *Google form*. Kedua aplikasi ini dipilih karena populer di masyarakat dan mudah digunakan.
- 2) Penyediaan fasilitas untuk pemenuhan protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkunjung
Sejak pandemi terjadi, pelaksanaan layanan informasi dan pengaduan dilakukan secara kombinasi antara tatap muka dan non tatap muka. Ketika dimungkinkan dilakukan layanan tatap muka, BBPOM di Jakarta menyediakan fasilitas higiene sanitasi bagi masyarakat yang berkunjung sesuai dengan protokol kesehatan. Penyediaan fasilitas ini diduga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- 3) Penggunaan media sosial secara lebih optimal
Masing-masing platform media sosial memiliki kekhasan tersendiri. BBPOM di Jakarta berupaya memanfaatkan fasilitas yang tersedia di masing-masing media sosial untuk memberikan opsi tambahan bagi layanan publik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil kinerja indeks kepuasan terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020, antara lain adalah fitur-fitur yang tersedia di masing-masing *platform* digunakan dengan lebih optimal sehingga masyarakat dapat menjangkau layanan publik dengan lebih mudah.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 antara lain:

1) Unit Layanan Pengaduan Konsumen

Layanan Informasi dan Pengaduan menggunakan kombinasi antara tatap muka dan non tatap muka. Layanan non tatap muka dilakukan melalui aplikasi Whatsapp. Aplikasi ini cukup populer digunakan oleh masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi obat dan makanan.

2) KIE Obat dan Makanan

Informasi tentang media layanan publik BBPOM di Jakarta dapat dilakukan melalui KIE Obat dan Makanan. Pada umumnya, setelah pelaksanaan KIE, peserta kegiatan akan diberi informasi tentang layanan publik dan media komunikasi yang tersedia. Dengan demikian, semakin banyak KIE yang dilakukan, semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang ada, antara lain:

1) Layanan Informasi dan Pengaduan

Untuk meningkatkan layanan informasi dan pengaduan, pada tahun berikutnya diharapkan dapat mengoptimalkan subsite BBPOM di Jakarta. Pada *subsite* tersebut, dapat diinformasi layanan publik yang disediakan, media komunikasi yang digunakan, profil petugas, fasilitas pemantauan tindak lanjut, dan lain sebagainya.

2) Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Untuk meningkatkan Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada tahun berikutnya diharapkan dapat disediakan fasilitas pembayaran PNPB secara cashless di kantor BBPOM di Jakarta, informasi prosedur, tarif, dan waktu layanan; serta fasilitas pemantauan secara daring.

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

8. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 13. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	85,24	97,98	BAIK

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Pelaku usaha;

Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan
= (A+B+C+D)/4

- (1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

- (2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

- (3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

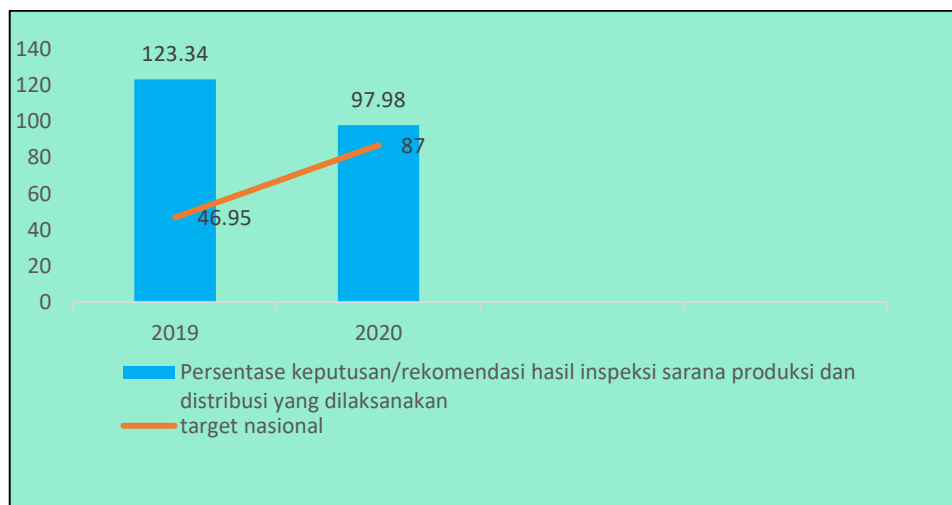
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- (4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2020 kurang dari target yang ditetapkan yaitu 97,98 % dengan kriteria **BAIK**.

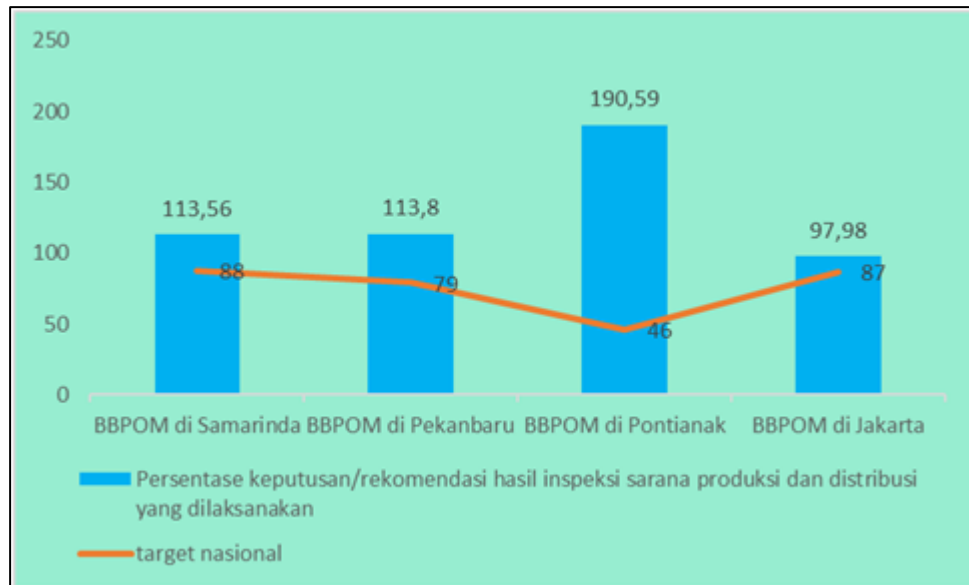
b. Perbandingan Capaian Tahun 2020 dengan Tahun 2019



Gambar 18. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2019 dan 2020

Persentase capaian tahun 2019 sebesar 123,34 % (realisasi 57,91 % dari target 46,95 %) dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, sedangkan persentase capaian tahun 2020 sebesar 97,98 % dengan kriteria “Baik”. Capaian tahun 2020 **lebih tinggi** dibandingkan tahun 2019 sehubungan dengan meningkatnya target yang ditetapkan sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur karena belum terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Target tahun 2019 46,95% sementara tahun 2020 target 87%. Kenaikan target cukup signifikan karena melihat capaian dari dua tahun terakhir. Dari capaian yang ada tahun 2019 realisasi 57,91% sementara tahun 2020 realisasi 85,24%. Jika dibandingkan realisasi 2019 dengan 2020, maka terjadi peningkatan pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara



Gambar 19. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan 3 (tiga) Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta belum mencapai target nasional. Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi tertinggi diantara Balai Besar lain yang setara. Penyebab belum tercapainya target di Balai Besar POM di Jakarta dipengaruhi oleh respon pusat terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai Besar POM di Jakarta hanya sebesar 44.23%. Di tahun 2021 akan dilakukan kontrol lebih ketat terhadap seluruh tindak lanjut pengawasan yang dilaksanakan, terutama untuk respon dari pusat terhadap rekomendasi dan tindak lanjut dari laporan hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti pusat, untuk surat teguran dari pusat ke sarana akan dimintakan tembusan ke BBPOM di Jakarta yang selama ini belum seluruhnya ditembuskan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Masih kurangnya capaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh:

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan. Sehingga data masih berjalan hingga akhir tahun dengan bertambahnya surat tindak lanjut yang dikirim ke pelaku usaha. Meningkatnya pengiriman Surat Tindak lanjut ini karena meningkatnya komitmen dari petugas untuk membuat tindak lanjut tepat waktu. Selain itu adanya beberapa inovasi terkait tata kelola di Bidang Pemeriksaan tahun 2020 memudahkan pemantauan capaian dari masing-masing petugas dan telah ada sistem warning bagi petugas untuk membuat Tindak lanjut.
- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan. Rekomendasi dari Pusat, rekomendasi dari Balai lain dan rekomendasi dari lintas sector terkait telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Jakarta secara cepat dan konsisten.
- Masih belum semua rekomendasi dari Balai Besar POM di Jakarta dilaksanakan oleh pusat. Penyebabnya karena tindak lanjut yang sudah dilakukan pusat tetapi tidak ditembuskan ke Balai Besar POM di Jakarta. Faktor lainnya karena pandemi yang sedang berlangsung, untuk turun ke sarana yang berkasus agak terhambat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Adanya inovasi Si DOEL, form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.

- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.
- Perlu adanya sistem monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 14. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	55,5	75,49	136,02	120%	SANGAT BAIK

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepalalintas sektor}} \times 100\%$$

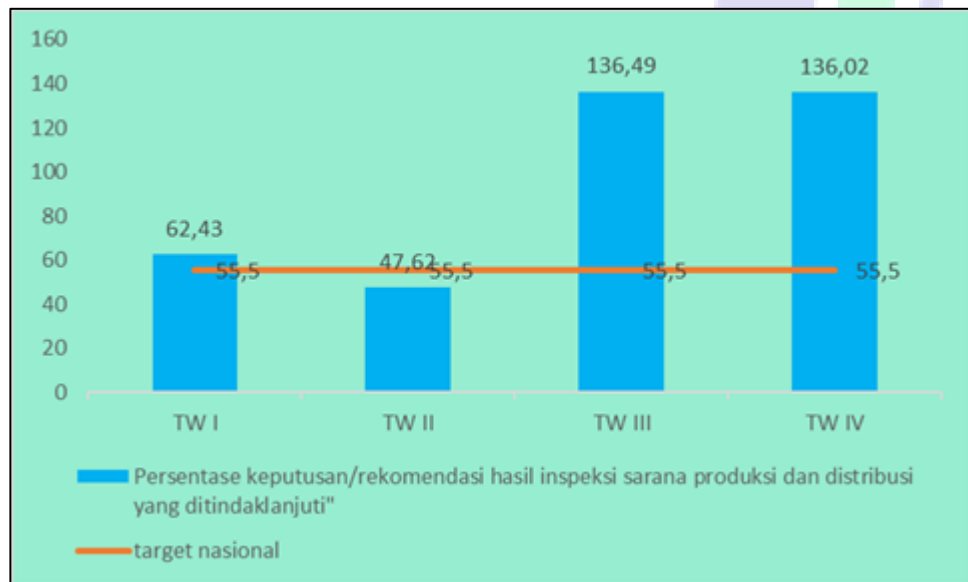
Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta sebesar 75,49% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu lebih dari 55,5%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 136,02% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” karena melebihi dari 120% capaian.

Tetapi setelah disesuaikan capaian tahun 2020 menjadi 120% dengan kategori Sangat Baik.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019*

Capaian pada indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2019, dikarenakan untuk tahun 2019 tidak terdapat indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 18 Perbandingan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah mencapai target nasional sama dengan Balai Besar POM di Samarinda, Pekanbaru dan Pontianak, dan Balai Besar POM di Jakarta memiliki realisasi tertinggi diantara Balai Besar POM di Samarinda, Pekanbaru dan Pontianak.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Semakin banyak jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin tinggi capaian indikator kinerjanya.
- Semakin banyak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin tinggi juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, telah beroperasinya aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta di TW IV menyebabkan capaian tindak lanjut pengawasan yang ditindaklanjuti lintas sektor tercapai 100%.
- Banyak sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi dan cara distribusi yang baik sehingga kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan semakin tinggi
- Peningkatan konsistensi petugas untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha
- Koordinasi lintas sektor yang secara kontinyu dilakukan terutama untuk pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan sehingga lintas sektor semakin paham bahwa rekomendasi dari Balai Besar POM dilaksanakan dengan cepat karena terkait mutu dan keamanan produk yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Semakin dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan retail kecil di pasar tradisional maupun pinggiran wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat rekomendasi (hardcopy) kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana

selain mengirimkan tindak lanjut rekomendasi pembinaan di aplikasi SMART-POM.

10. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	77,00	92,77	Baik

Tabel 15. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK
- (7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 77% dari target yang ditetapkan 83%, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan keempat tahun 2020 sebesar 92,77% dengan kriteria “baik”. Secara umum untuk hasil capaian sampai triwulan empat ini, semua proses dalam rangka menerbitkan rekomendasi tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan empat 2020 sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) yang seluruhnya memenuhi time line yang telah ditetapkan. Sebanyak 276 keputusan merupakan kumulatif dari penyelesaian permohonan tahun 2019 dan 2020 yang terdiri dari 74 (tujuh puluh empat) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2019 dan 202 (dua ratus dua) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2020.

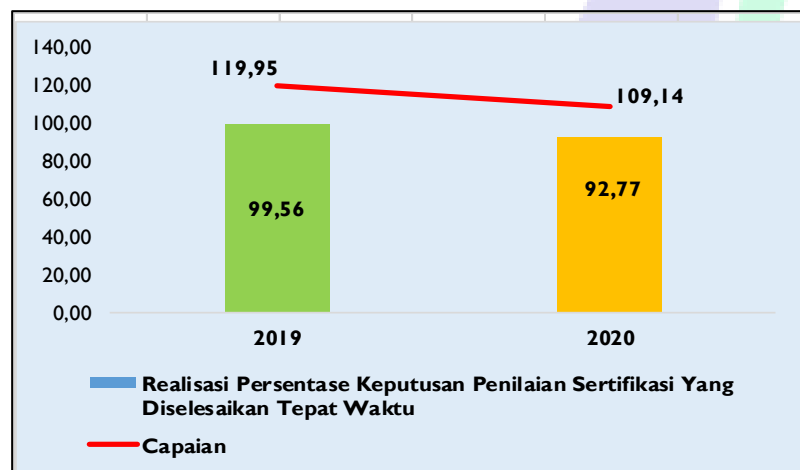
Pada tahun 2020 terdapat 309 (tiga ratus sembilan) permohonan yang diterima di BBPOM di Jakarta dan telah diterbitkan keputusan sebanyak 202 (dua ratus dua) sehingga jumlah sarana yang prosesnya *carry over* ke tahun 2021 sebanyak 109 (seratus sembilan). Dari 109

yang carry over terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) sarana dalam proses CAPA dan 15 (lima belas) sarana belum dilakukan audit di tahun 2020.

Sarana yang masih dalam proses CAPA karena beberapa hal, antara lain, karena pengiriman CAPA dari sarana yang terlalu lama dan audit dilakukan di akhir tahun 2020 sehingga sarana belum mengirimkan berkas perbaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari batas waktu penerbitan keputusan yang tidak pernah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Sarana yang masih belum diaudit sampai tahun 2020 karena permohonan diterima pada minggu terakhir bulan Desember 2020 dan akan dijadwalkan audit pada bulan Januari 2021

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

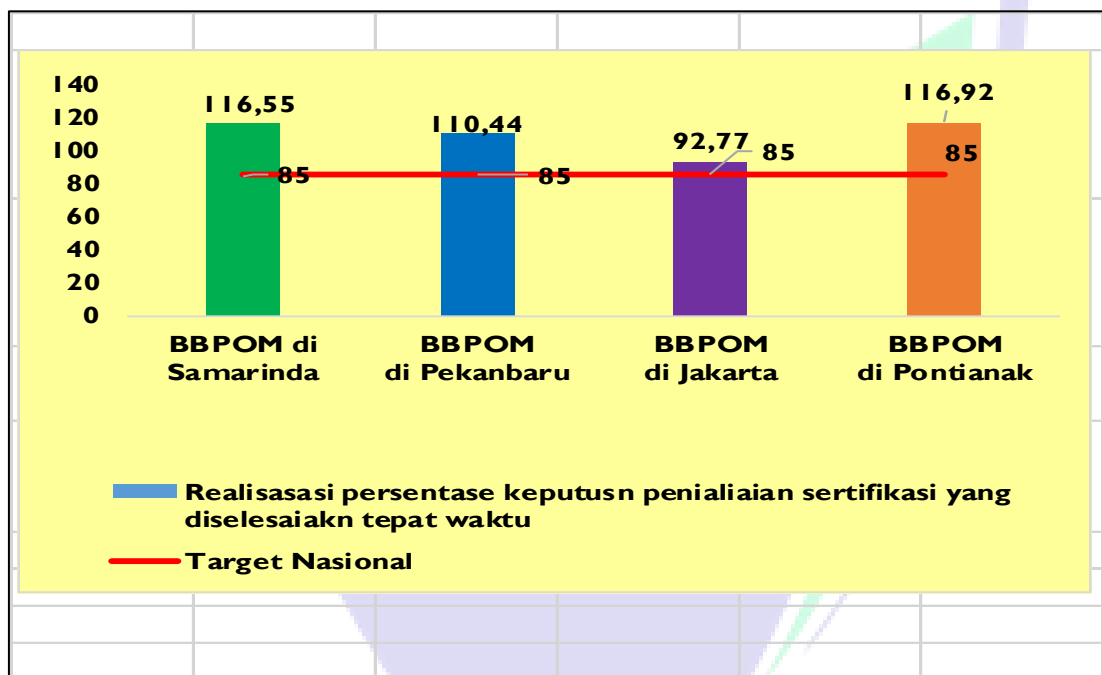


Gambar 24. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2020

Berdasarkan tabel di atas realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 **menurun** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja dalam hal penilaian sertifikasi di Balai Besar POM di Jakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan **Error! Reference source not found.** diketahui bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta dan balai lain yang setara melebihi target nasional, Balai Besar POM di Pontianak memiliki **realisasi tertinggi** dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.



Gambar 20. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan

batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari seksi Inspeksi.

Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2020 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain:

1. Fasilitasi UMKM Pangan secara simultan meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM Pangan OLahan membuat proses yang terjadi pada UMKM lebih cepat. Bukan hanya rekomendasi yang tepat waktu untuk pemeriksaan sarana Balai akan tetapi ijin edar produk Pangan MD juga dapat dipercepat diperoleh oleh pelaku usaha. Fasilitasi tahun 2020 lebih cepat progressnya jika dibanding dengan fasilitasi tahun 2019.
2. Adanya Inovasi None Sisi sangat membantu pelaku usaha untuk layanan konsultasi secara online sehingga tidak terbatas waktu dan tempat layanan. Pada masa pandemic saat ini layanan konsultasi tetap bias dilaksanakan. Dan pelaku usaha bias kontak langsung secara online dengan petugas layanan sertifikasi untuk pemenuhan persyaratan dan kekurangan dari hasil audit sertifikasi.

3. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Desk CAPA secara intensif dan berkala dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang datang ke Balai Besar POM Jakarta untuk dilakukan desk antara petugas dengan masing-masing pelaku usaha sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Desk CAPA pada triwulan empat dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 dengan peserta desk diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan
4. Tantangan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan ramah tentunya telah menjadi tuntutan masyarakat kini. Balai Besar POM di Jakarta sangat menyadari hal ini dan perlu didukung oleh kompetensi yang mumpuni dari setiap orang yang bertugas memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut maka beberapa kali dilakukan pelatihan dan diseminasi oleh peserta pelatihan
5. Adanya *e-book* yang diterapkan pada tahun 2020 sehingga membantu pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik pada sarannya, serta pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk disudit sertifikasi dengan mudah.
6. Kekurangan sumber daya yang ada dapat diatasi dengan beberapa tindakan terobosan yaitu Sistem rekap sarana dan system warning terhadap pelaku usaha yang bisa disetting secara *online* sehingga

tidak harus ada petugas khusus yang membuat surat satu persatu secara manual. Selain itu inovasi *e-book* Pangan membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan penerapan cara produksi dan distribusi yang baik tanpa harus antri konsultasi sehingga mengurangi antrian konsultasi dan mempercepat proses.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

2. Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
3. Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.
4. Kekurangan sumber daya dari petugas Balai POM di Jakarta juga membuat pelayanan kurang optimal karena beban kerja yang berlebih

Untuk peningkatan kinerja tahun tahun berikutnya akan dikembangkan beberapa hal:

- a. Evaluasi program *desk CAPA* yang telah dilakukan pada tahun ini dan melakukan desk CAPA setiap triwulan. Mengingat keterbatasan sumberdaya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA
- b. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Infokom

- c. Melakukan simpifikasi SOP dan dokumen atau formulir yang digunakan pada saat melakukan audit maupun pelaporan dan penerbitan keputusan sertifikasi
- d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara online dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik
- e. Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
- f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Pada tahun 2019 telah dilakukan reuiu Renstra 2020 - 2024 seiring dengan terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat. Setelah dilakukan reuiu pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.

11. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 16. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	46	55.94	121,61	120	SANGAT BAIK

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

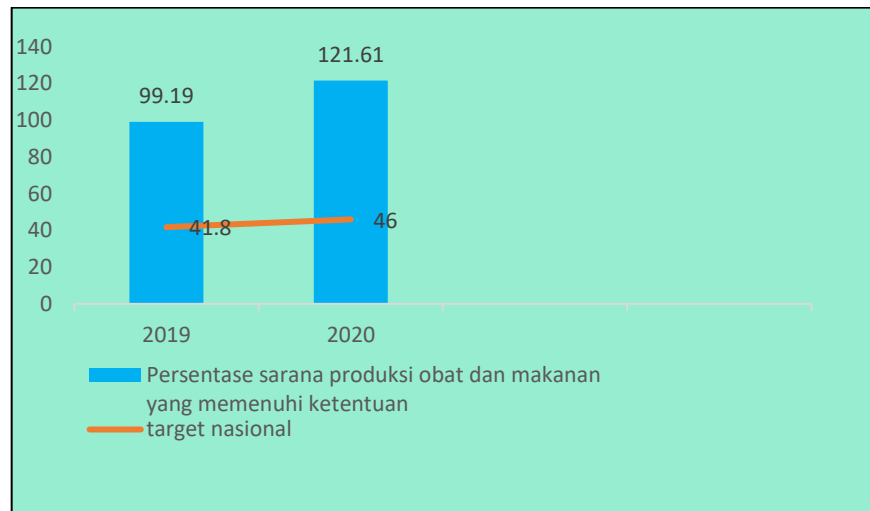
$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu lebih dari 46% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Oleh karena itu, dapat dinyatakan

bahwa sebanyak 55,94% sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah berhasil memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan Badan POM yaitu sebesar 121,61%. Setelah disesuaikan, capaian menjadi 120% dengan kategori Sangat Baik

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

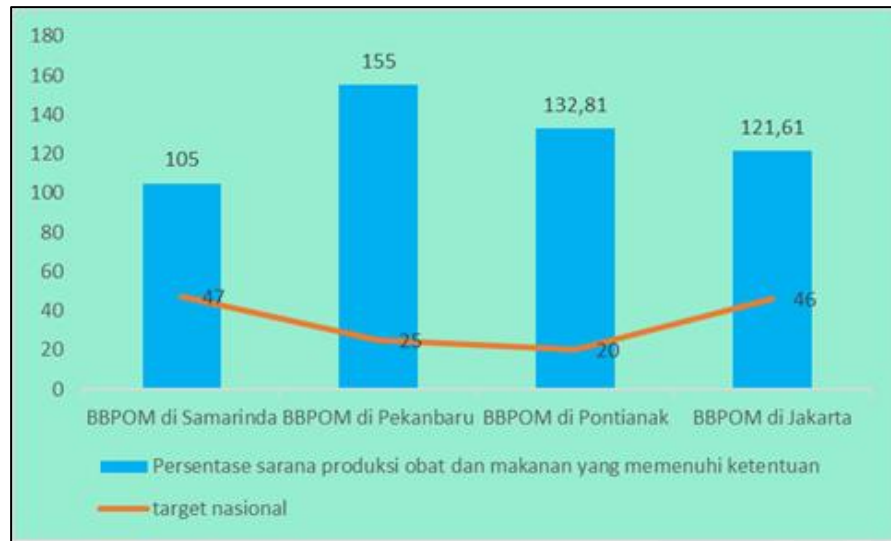


Gambar 21. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Capaian tahun 2020 **lebih tinggi** dibandingkan tahun 2019. Pada tahun sebelumnya realisasi persentase sarana memenuhi ketentuan cukup banyak dan meningkat pada tahun 2020 karena meningkatnya target yang ditetapkan.

BADAN POM

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 22. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target nasional, dan Balai Besar POM di Samarinda, Pekanbaru dan Pontianak juga sudah melebihi target. Balai Besar POM di Jakarta memiliki target pemeriksaan sarana produksi lebih besar jika dibandingkan dengan 3 Balai lainnya sehingga faktor pembagi dalam perhitungan akan lebih besar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 55.94% **sudah melebihi target** yang ditentukan. Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	14	11	3
2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	4	4	0
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	8	5	3
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	44	32	12
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	2	0
7.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	2	2	0
8.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	2	2	0
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Kosmetik	60	21	39
11.	Industri Pangan	87	55	32
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	44	18	26
TOTAL		267	152	115

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Perubahan penetapan kategori Memenuhi Ketentuan dan Tidak Memenuhi Ketentuan pada Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Fasilitasi UMKM yang dilakukan mulai tahun 2019 untuk UMKM Pangan sangat meningkatkan kemampuan UMKM untuk memenuhi Cara Produksi yang Baik

3. Koordinasi lintas sektor yang gencar dilakukan pada tahun 2020 secara online untuk memfasilitasi UMKM
4. Bimbingan teknis Cara Produksi yang Baik, Bimbingan Teknis Label dan Kemasan secara online dapat meningkatkan sasaran peserta serta jumlah peserta yang ikut serta sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang penerapan cara produksi yang baik
5. Meningkatnya pemahaman petugas PTSP yang menerbitkan ijin edar Industri Rumah Tangga Pangan terhadap pemenuhan ketentuan penerbitan ijin secara teknis dengan pertemuan intens dengan Balai Besar POM di Jakarta

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.
2. Melakukan pertemuan secara intens dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menegaskan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemberian ijin sarana terutama untuk Industri Rumah Tangga Pangan sehingga yang diberi Ijin adalah yang benar-benar memenuhi kriteria sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan, misalnya untuk produk yang tidak bisa diproduksi oleh Industri rumah tangga pangan seperti olahan daging, *frozen food*, minuman untuk tidak dikeluarkan lagi ijin PIRTnya dan diarahkan untuk mendaftarkan produk ke Badan POM untuk mendapatkan MD sehingga pengendalian cara produksi yang baik akan meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.
3. Melakukan FGD dengan Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP beserta PTSP tingkat kota/kab dan PTSP kecamatan seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta tentang

pembinaan dan perijinan sarana di Jakarta, permasalahan yang ada, solusi pemecahan masalah serta mencari akar penyebab sehingga bisa diatasi permasalahan tersebut seperti banyak sarana yang tidak memenuhi ketentuan karena faktor kesalahan pada pemberian ijin diawal sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan. Hal positif dan intensnya pertemuan dengan PTSP adalah ketepatan petugas PTSP dalam mengeluarkan Ijin telah menjadi nilai kinerja bagi petugasnya sehingga petugas akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan ijin sehingga sesuai ketentuan dan rajin untuk berkomunikasi dengan petugas Balai Besar POM Jakarta dan Dinas Kesehatan serta Suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah provinsi DKI Jakarta.

4. Melakukan advokasi terkait Usaha Kecil dan Usaha Mikro Obat Tradisional agar bisa dikeluarkan IUMK di Kawasan perumahan sehingga tetap bisa memproduksi di Kawasan perumahan dan tidak harus relokasi ke Kawasan Industri. Sebelumnya di wilayah DKI Jakarta UKOT dan UMOT tidak bisa keluar ijinnya karena sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak bisa keluar IUMK. Karena intensnya advokasi dan komunikasi serta pertemuan dengan PTSP hingga keluar kebijakan bahwa UKOT dan UMOT bisa memperoleh IUMK sehingga tidak harus relokasi. Dengan kepastian ijin yang bisa diperoleh di Kawasan perumahan membuat pemenuhan cara produksi yang baik lebih meningkat.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM. Hal ini dari 2 tahun terakhir sudah diusulkan untuk revisi form 166 pemeriksaan sarana produksi pangan. Telah ada solusi dan inovasi dari Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang untuk membuat form 69 untuk UMKM akan tetapi form ini

belum dapat diimplementasikan karena belum final dan belum disahkan.

- ✓ Kemampuan Sumberdaya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah.
- ✓ Belum seragamnya persepsi petugas terkait “pedoman cara produksi yang baik” misalnya CPKB sehingga diperlukan penambahan pengalaman dan pelatihan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi dan keseragaman persepsi.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya:

1. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait di pusat dan secara aktif mengusulkan solusi permasalahan form pemeriksaan sarana produksi pangan.
2. Peningkatan kompetensi petugas Pembina Industri Rumah Tangga Pangan pada suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah DKI Jakarta sehingga akan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan sendirinya akan menurunkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Pembuatan media online untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan cara Produksi yang baik seperti pembuatane-book

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan CPOTB, Bimbingan Teknis

Pengawasan Peredaran Obat tradisional dan Suplemen Makanan. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.

- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
 - *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
 - *Kegiatan Fasilitasi UMKM secara online berupa bimtek Cara Produksi, Kuliah Whats App secara konsisten*
 - Sistem online dalam pembinaan pelaku usaha meningkatkan jumlah sarana yang dijadikan target peserta karena pelaku usaha mengikuti kegiatan dari rumah dan meminimalisir perjalanan sehingga meningkatkan animo pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan
 - Meningkatnya sarana yang memenuhi ketentuan salah satu faktornya adalah inspeksi dilakukan secara online. Ada hal-hal tertentu yang tidak bias tergambar jika secara online. Hal ini tentunya kan meningkatkan kewaspadaan untuk penetapan target pada tahun berikutnya. Inspeksi online bias dilaksanakan pada masa pandemic, tetapi bagi pelaku usaha yang nakal hal ini tentu menjadi celah dalam menyembunyikan sesuatu dari petugas. Inspeksi online efektif dilakukan untuk pelaku usaha yang telah mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemenuhan pertauran perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Produksi yang Baik.
- f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi

ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 4 tahun 2020, capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Sehingga dengan hasil ini belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja.

12. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	55	72,61	132,02	120%	SANGAT BAIK

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

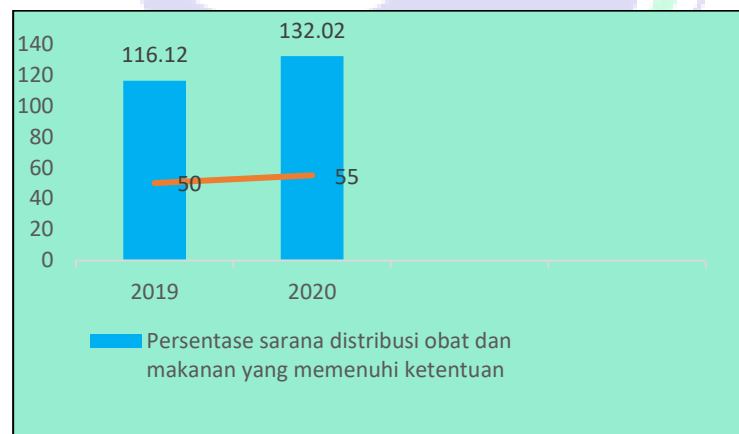
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 55% dengan kriteria “Baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 72,61 % sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan POM.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019*

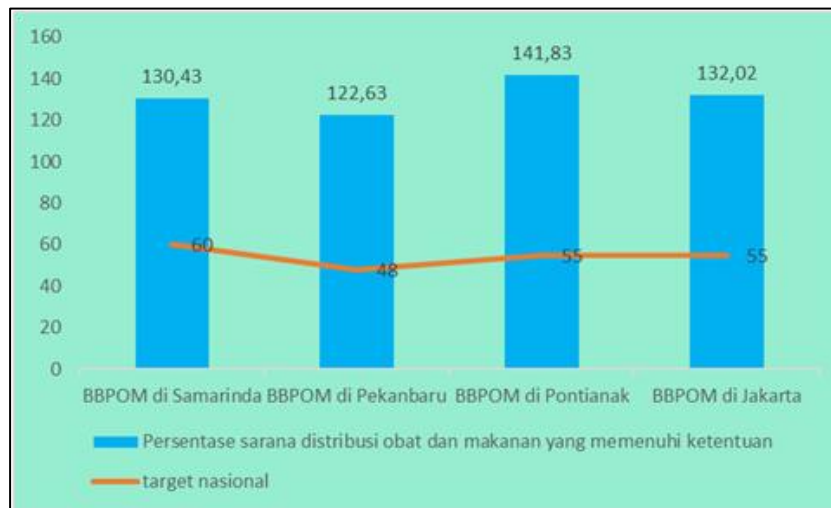


Gambar 23. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2020-2024 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat menyebabkan realisasi tahun 2020 **meningkat** dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar

POM di Jakarta **berhasil meningkatkan** persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga melebihi target nasional.

- c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 24. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target nasional (dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”). Balai lain yaitu Balai Besar POM di Samarinda, Pekanbaru dan Pontianak juga sudah mencapai target nasional yang ditentukan.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2020 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	104	77	27
2.	Apotek	173	106	67
3.	Toko Obat	55	33	22
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	7	7	0
5.	Rumah Sakit (RS)	5	5	0
6.	Puskemas	29	17	12
7.	Klinik	31	17	14
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	72	56	16
10.	Fasilitas Distribusi Suplemen	8	8	0
11.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	191	168	23
12.	Fasilitas Distribusi Pangan	325	231	94
TOTAL		1000	725	275

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang

melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.

- Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sehingga sebagian besar pemeriksaan dilakukan secara online/virtual
- Berubahnya kriteria pedoman Tindak Lanjut sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi yaitu kategori tindak lanjut berupa Peringatan masih dinyatakan Memenuhi Ketentuan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan:

- a. Peningkatan pembinaan dengan penerapan pembinaan ditempat dengan kata lain jika dilakukan pemeriksaan selain melakukan inspeksi dilakukan pembinaan secara intens.
- b. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan apotek yang mengadakan obat dari jalur tidak resmi diberikan sanksi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan) walau pengadaannya hanya beberapa kali dan terutama pengadaan dari pasar Pramuka
- c. Pembinaan kepada stake holder misalnya fasilitasi pelatihan terkait distribusi CCP (vaksin) dan pelatihan lain
- d. Lebih memusatkan pengawasan kepada sarana yang dicurigai memiliki potensi untuk mengedarkan produk tidak sesuai ketentuan.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan distribusi dan pengadaan obat antar apotek, misalnya jaringan apotek grup
- ✓ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti toko obat dan sarana distribusi retail terkait peraturan yang berlaku
- ✓ Ketidaksiapan *stake holder* terkait misalnya Puskesmas dan Suku Dinas Kesehatan terkait kurangnya anggaran sehingga tindak lanjut CAPA hasil pemeriksaan yang menyangkut perbaikan sarana

dan prasarana belum bisa dilakukan. Anggaran tahun 2020 sebagian besar dialihkan untuk penanganan Covid-19

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Peningkatan pembuatan media online untuk pelaku usaha untuk semakin konsisten menerapkan Cara distribusi yang Baik
 2. Memaksimalkan penerapan sistem online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
 3. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian *output*.
 4. Koordinasi lebih intensif dengan stake holder terkait
- e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Adanya Samson (Satu Jam Saja Sharing Online) antar petugas Pemeriksaan di Balai Besar POM di Jakarta sehingga meningkatkan kompetensi dan pengalaman petugas dalam melakukan inspeksi dan trik menghadapi sarana agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten menerapkan cara distribusi yang baik sehingga ditemukan cara efektif untuk pelaku usaha menindaklanjuti hasil pengawasan.
- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik tingkat junior dan senior. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

- Sistem dalam penetapan target pemeriksaan yang lebih tepat dengan menggempur pendistribusian dari sarana legal ke sarana ilegal.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 4 tahun 2020, capaian sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, hasil ini belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja.

13. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) *Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);*
- 2) *Profesionalitas SDM (18%);*
- 3) *Sarana Prasarana (15%);*
- 4) *Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);*
- 5) *Konsultasi dan Pengaduan (15%);*
- 6) *Inovasi (7%).*

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

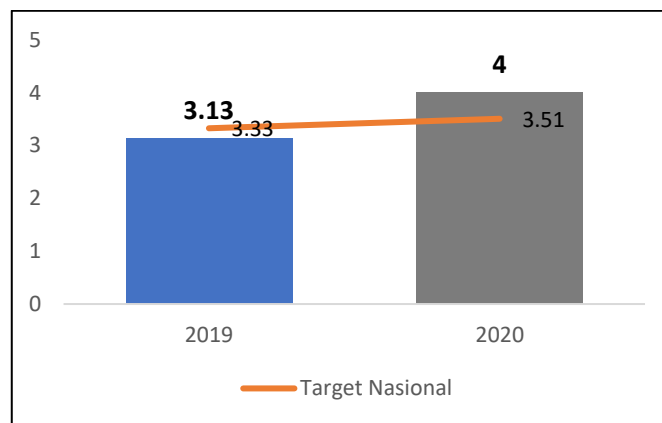
Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	B	Pelayanan Prima

Tabel 21 Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	3,51	4,00	113,96	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penilaian UPP BPOM, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BBPOM di Jakarta diperoleh sebesar 4.00 (B/ Baik). IPP yang diperoleh BBPOM di Jakarta melebihi dari target tahun 2020, yaitu 3.51 dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 113.96%, sehingga diperoleh kinerja dengan kriteria sangat baik. Nilai yang diperoleh ini sama dengan nilai rata-rata UPP pada UPT BPOM Tahun 2020.

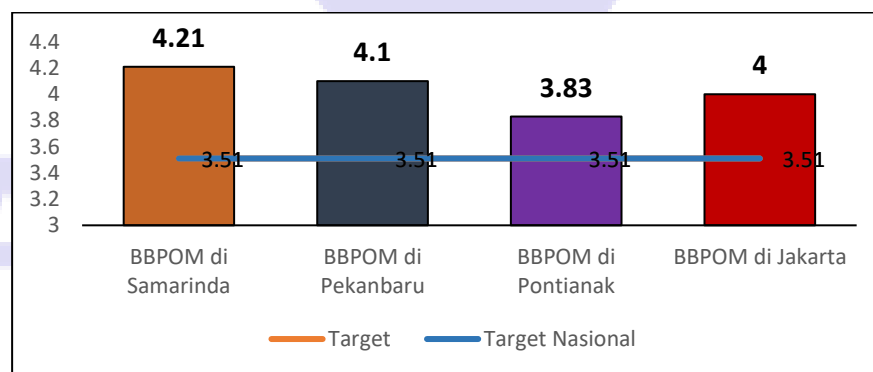
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



Gambar 32. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan tahun 2019

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019, indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Jakarta sebesar 3.13 masih bernilai Baik (dengan catatan) dan belum melampaui target nasional sebesar 3.33. Indeks pelayanan publik tahun 2020 sebesar 4.00 bernilai Baik dan juga telah melampaui target nasional sebesar 3.51.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 33. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta sudah melampaui target nasional

(3.51) dengan indeks sebesar 4 (kategori “Baik”). Hasil indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Samarinda (4.21) dan Balai Besar POM di Pekanbaru (4.1) juga sudah melampaui target nasional dengan kategori “Sangat Baik”, sedangkan hasil indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak (3.83) melampaui target nasional dengan kategori “Baik” seperti Balai Besar POM di Jakarta.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target indeks pelayanan publik. Dengan adanya penilaian internal kinerja UPP ini dapat mendorong UPP di lingkungan BPOM untuk melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju pelayanan prima sebagai persiapan UPP BPOM untuk penilaian evaluasi kinerja BPOM oleh KemenPANRB berdasarkan PANRB Nomor 17 Tahun 2017.

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta bernilai **Baik** antara lain:

- 1) Sudah menerapkan Kebijakan Pelayanan berupa Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
- 2) Sarana prasarana yang memadai (tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi/*nursery*, arena bermain anak, *front office*, dan toko ATK).
- 3) Peningkatan kemudahan akses pelayanan publik di Balai Besar POM di Jakarta melalui berbagai media, seperti papan pengumuman dan media sosial (*Instagram, twitter, facebook, youtube*), dan juga layanan informasi dan pengaduan melalui *whatsapp*.
- 4) Sudah dilakukan penerapan inovasi pelayanan publik berupa *e-book* pedoman tata laksana sertifikasi bagi pelaku usaha di

BBPOM Jakarta dan “None Sisi” layanan konsultasi online seksi sertifikasi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil kinerja indeks pelayanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta meliputi:

- 1) Menyediakan layanan terintegrasi berupa loket pelayanan untuk layanan informasi dan pengaduan, layanan sertifikasi/PSB, dan layanan penerimaan sampel/pengujian.
- 2) Menyediakan informasi berupa leaflet/ *stand* etiket yang berisi profil petugas pelayanan publik yang dipublikasi di ruang pelayanan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan informasi non elektronik yang mendukung pelayanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

- 1) Sistem sistem *reward* dan *punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta sebagai aturan perilaku kode etik pelaksana layanan.
- 2) Pelatihan petugas pelayanan publik tentang Penerapan Budaya Prima untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
- 3) Intensifikasi penggunaan media sosial, layanan informasi dan pengaduan melalui *whatsapp* sehingga respon terhadap pertanyaan masyarakat dapat cepat diterima dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 4) Peningkatan inovasi pelayanan publik agar dapat diterapkan secara optimal untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menerima layanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Nilai indeks pelayanan publik tahun 2020 ini berhasil meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun beberapa kelemahan dan rekomendasi terkait penilaian indeks pelayanan public tahun 2020 ini meliputi:

- **Aspek Kebijakan Pelayanan**

Kelemahan pada aspek ini meliputi masih digunakannya PerBPOM No 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM yang belum mencakup komponen jumlah pelaksana dan kecepatan tindak lanjut hasil SKM.

Rekomendasi yang terkait meliputi monev terhadap Standar Pelayanan, pemanfaatan masukan hasil monev pengaduan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik dan pemasangan Standar Pelayanan Publik yang dapat dibaca dengan mudah di ruang pelayanan berupa leaflet/banner, media cetak dan *website*.

- **Aspek Profesionalisme SDM**

Rekomendasi yang terkait aspek ini meliputi implementasi penggunaan atribut berupa PIN/logo Unit Pelayanan serta profil pelaksana yang dipublikasi di ruang pelayanan dan data dukung penerapan kode etik pelayanan dan penerapan sanksi yang telah ditetapkan.

- **Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik**

Rekomendasi berupa *subsite* UPP BPOM dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga serta data sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik berupa sistem data informasi pelayanan yang mengacu *subsite*, aplikasi proses bisnis mengacu qms.pom.go.id, sistem pengelolaan pengaduan mengacu Simpel LPK, SKM mengacu Simolekdesi, dan SDM mengacu SIASN.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan
Rekomendasi berupa penambahan data dukung dokumen/arsip untuk tamu yang datang langsung serta rekapitulasi hasil pengaduan sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
- Aspek Inovasi
Rekomendasi berupa implementasi inovasi secara terus-menerus dan monev berkelanjutan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan selanjutnya dapat direplikasi serta diikutsertakan dalam Kompetisi Pelayanan Publik dan/ atau penghargaan lainnya.

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

14. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survei*. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar. KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Eektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Tabel 22 Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	89.21	93,02	104,27	Baik

Indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan di wilayah BBPOM di Jakarta diukur melalui survei sepanjang periode Triwulan II-IV tahun 2020, dengan menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan untuk setiap UPT oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan

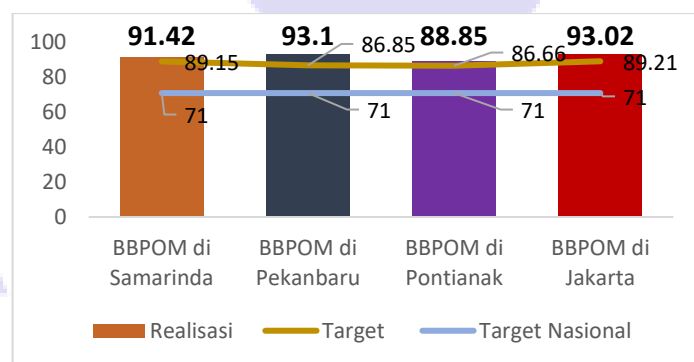
Strategis (http://bit.ly/EFF_KIE_Jakarta) terhadap responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media dalam 3 bulan terakhir pada setiap triwulan.

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 ialah merupakan hasil rata-rata dari nilai yang diperoleh pada Triwulan II (93.67), III (92.36), dan IV (93.02), sehingga diperoleh nilai sebesar 93.02, yang menandakan bahwa kegiatan KIE Obat dan Makanan yang dilakukan melalui berbagai media Sangat Efektif. Media KIE Obat dan Makanan yang termasuk dalam survei terdiri atas berbagai macam media cetak maupun elektronik, seperti brosur, majalah, koran, televisi, media online, CFD, pameran, penyuluhan, media sosial, virtual, dan *talkshow*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang baru diukur tahun 2020, sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 34. Perbandingan tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi kinerja BBPOM di Jakarta dibandingkan dengan Balai lain yang sejenis/setara, yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Pontianak. Hasil perbandingan persentase realisasi kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020 sebagaimana pada grafik di atas. Capaian BBPOM di Jakarta, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Pontianak berhasil melebihi target nasional (71%), berturut-turut adalah 93.02%;91.42%;93.1%; dan 88.85%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap keberhasilan pencapaian target Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Media KIE yang beragam

BBPOM di Jakarta melaksanakan KIE Obat dan Makanan menggunakan beragam media informasi, baik secara langsung/tatap muka maupun tidak langsung. Kegiatan KIE secara langsung/tatap muka, antara lain adalah penyuluhan, bimbingan teknis, dan pameran; sedangkan KIE secara tidak langsung menggunakan infografis atau video pendek yang diunggah melalui media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube). Infografis/video pendek tersebut berisi informasi praktis mengenai keamanan obat dan makanan yang mudah untuk dipahami dan dapat mencapai berbagai kalangan masyarakat.

2. Ketersediaan data calon responden

Pasca pelaksanaan KIE, BBPOM di Jakarta senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat penerima KIE; terdiri dari kader dan komunitas pada program intervensi Keamanan Pangan (Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya), maupun peserta kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui grup *whatsapp* maupun komunikasi personal. Adanya komunikasi ini memudahkan pelaksana survei dalam menyebarkan *link* kuesioner sehingga dapat diperoleh respon yang cepat dari para calon responden.

3. Kerja sama tim yang efektif dan efisien

Perencanaan, penyusunan materi hingga evaluasi KIE melibatkan tim yang solid dan didukung dengan perlengkapan yang memadai sehingga dihasilkan pelaksanaan KIE yang efektif.

4. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang efektif

Pemantauan jumlah data responden dapat dilakukan secara rutin melalui *link* yang disediakan. Dengan demikian, tim pelaksana survei dapat mengevaluasi pelaksanaan dan memastikan capaian responden terpenuhi sesuai waktu yang ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan hasil efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dapat disebabkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan KIE baik secara daring, menggunakan media elektronik, maupun secara tatap muka, yaitu antara lain: (1) pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, video, dan kuis, (2) KIE melalui *talk show* di radio, dan (3) kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI Komisi IX dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Ketersediaan data peserta KIE memudahkan tim pelaksana survei untuk menyebarkan *link* survei. Selain itu, ketersediaan *link* pemantauan survei juga memudahkan tim pelaksana untuk memantau perkembangan jumlah responden serta mengetahui ada/tidaknya responden yang mengisi lebih dari satu kali. Arahkan pelaksanaan survei cukup jelas sehingga penentuan responden tidak mengalami kesulitan.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja ialah meningkatkan koordinasi dan *engagement* dengan responden KIE sehingga metode KIE yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keterlibatan responden dalam survei. Variasi konten KIE juga dapat dilakukan guna meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat bagi responden. Selain itu, tindak lanjut berupa monitoring untuk memastikan tidak ada duplikasi data responden perlu dilakukan. Untukantisipasi diperlukan pengambilan data sebanyak mungkin responden sehingga di akhir mengurangi adanya jumlah data yang berkurang akibat proses *cleaning*.

15. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 23. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	12	12	100	Baik

Sasaran intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA yang berada di lokus intervensi *stunting* Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta, yaitu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan intervensi adalah memastikan sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki

kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Jumlah sekolah yang akan diintervensi program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan target yang ditetapkan (12 sekolah). Hasil audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 4 Juni 2020, sekolah-sekolah berikut ini:

- 1) SDN Kebon Manggis 01
- 2) SDN Jatinegara Kaum 01
- 3) SMPN 52
- 4) SMPN 07
- 5) SMAN 103
- 6) SMAN 11
- 7) SDN Kalisari 01
- 8) SDN Bambu Apus 01
- 9) SMPN 126
- 10) SMPN 150
- 11) SMAN 14
- 12) SMKN 24

Realisasi Kegiatan Intervensi PJAS dihitung berdasarkan *progress* tahapan, terdiri dari:

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS (bobot 20%)
2. Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah (bobot 30%)
3. Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) (bobot 30%)
4. Audit Surveilans PBKPKS (bobot 15%)
5. Lomba Sekolah Pangan Aman (bobot 5%)

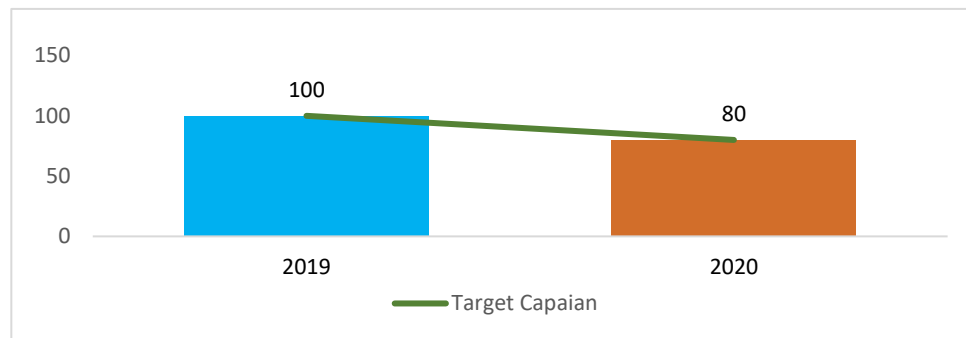
Adapun, terdapat revisi *progress* tahapan pada tatanan normal baru karena banyak sekolah yang tidak beroperasi khususnya kantin sekolah, terdiri dari:

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS (bobot 20%)
2. Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah (bobot 20%)
3. Pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan (bobot 15%)
4. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah (bobot 10%)
5. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 1 (bobot 15%)

BBPOM di Jakarta telah menindaklanjuti hasil audiensi dengan melaksanakan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu yang telah dilaksanakan secara virtual pada 23 Juni 2020 yang melibatkan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Timur serta perwakilan sekolah. Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah juga telah dilaksanakan secara daring pada 24 September 2020 dan dihadiri oleh Kepala Sudindik Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Timur, perwakilan dari Sudindik Wilayah I & II Kota Administrasi Jakarta Timur dan Komunitas sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru UKS dan pengelola kantin dari 12 sekolah yang diintervensi tahun 2020. Penyerahan paket edukasi/produk informasi keamanan pangan serta monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah telah diselesaikan pada Triwulan IV. BBPOM Jakarta telah memberikan penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan, menyediakan PJAS aman serta mampu memenuhi persyaratan keamanan pangan yaitu pemberian Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman. Sehubungan keadaan pandemi Covid-19, maka pentahapan kegiatan dalam rangka mencapai predikat Sekolah dengan PJAS aman melalui Sertifikasi level 1 (penggalangan komitmen sekolah).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

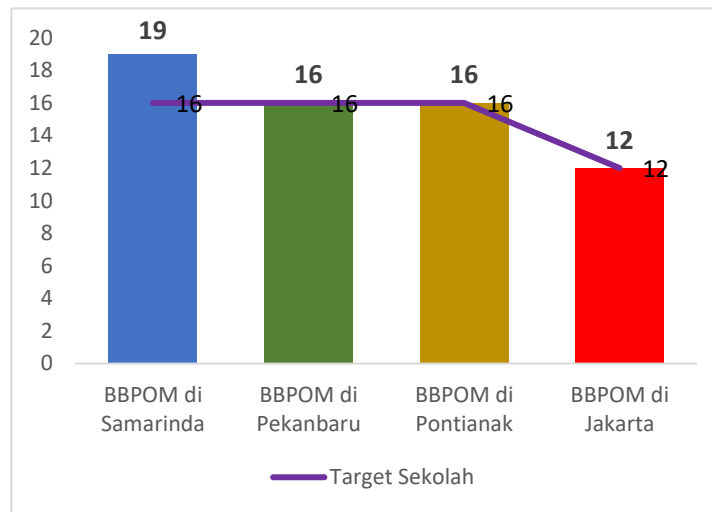
Gambar 35. Perbandingan presentase capaian tahapan intervensi



PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2019 dan 2020

Jumlah sekolah yang diintervensi tahun 2019 adalah 663 sekolah di Provinsi DKI Jakarta sedangkan jumlah sekolah yang diintervensi tahun 2020 adalah 12 sekolah di lokus intervensi Kota Administrasi Jakarta Timur. Penentuan jumlah sekolah intervensi tahun 2020 ini berdasarkan jumlah sekolah yang mengikuti Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah pada tahun 2019 yang berada di lokus intervensi Kota Administrasi Jakarta Timur. Realisasi presentase capaian tahapan intervensi program PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 sebesar 80%, sedangkan capaian realisasi tahun 2019 ialah 100%. Penurunan realisasi capaian pada tahun 2020 ini karena adanya penyesuaian pelaksanaan tahapan kegiatan pada tahun 2020 di masa pandemic Covid-19, yaitu tidak adanya program PBKPKS dan Lomba Sekolah Pangan Aman. Artinya, dengan realisasi sebesar 80%, hasil ini menunjukkan semua tahapan intervensi PJAS sesuai dengan target tahapan pada juknis pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 25 Perbandingan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah sebanyak 12 (duabelas) sekolah. Hasil ini telah sesuai dengan target sekolah intervensi program PJAS yang telah ditetapkan secara nasional, sama halnya dengan jumlah realisasi oleh BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Pontianak yaitu 16 (enambelas) sekolah. Sedangkan, realisasi jumlah sekolah intervensi PJAS oleh BBPOM di Samarinda sebanyak 19 (sembilanbelas) sekolah melampaui target sekolah intervensi yang telah ditetapkan sebanyak 16 sekolah.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS pada tahun 2020 ini yaitu adanya komitmen dan komunikasi yang baik dengan tim keamanan pangan sekolah dalam pelaksanaan program PJAS, sehingga apabila terjadi kendala langsung dapat diatasi.

- e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan sekolah intervensi PJAS mengenai pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah serta intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader dilakukan melalui media *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga informasi dan respon dapat diberikan dan diterima secara cepat. Selain itu, koordinasi melalui komunikasi yang efektif ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program intervensi PJAS.

- f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PJAS diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

- 1) Kader terkendala dalam menyiapkan dokumen karena kantin sekolah tidak beroperasi dan beberapa hal yang kurang dimengerti,
- 2) Kader sekolah terkendala dalam menyelesaikan dokumen, karena sekolah melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),
- 3) Pengumpulan dokumen mundur dari awalnya pertengahan November menjadi Desember, karena ada beberapa sekolah yang belum mengumpulkan dokumen dengan lengkap.

16. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

- a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 24. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai besar POM di Jakarta	5	5	100	Baik

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi *stunting*, desa kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Jenis desa ditentukan oleh Indeks Desa (IDM) yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan $\leq 0,815$, sedangkan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0,599$ dan $\leq 0,707$.

Rangkaian kegiatan intervensi program Desa Pangan Aman meliputi Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan Kelengkapan (Gimmick, Rapid Test Kit, dll), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi, dan Lomba Desa Pangan Aman.

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2020 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 5 (lima) kelurahan yang meliputi Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kelurahan Pondok Ranggan, Kelurahan Kramat Jati, dan Kelurahan Kalisari.

Realisasi Kegiatan Intervensi Desa Pangan Aman dihitung berdasarkan *progress* tahapan:

1. Advokasi Kelembagaan Desa (bobot 20%)
2. Pengadaan Gimmick, Rapid Test Kit, dll (bobot 5%)
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (bobot 15%)
4. Bimtek Komunitas (bobot 15%)
5. Fasilitasi Keamanan Pangan (bobot 10%)

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (bobot 10%)
7. Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (bobot 10%)
8. Pengawasan (bobot 10%)
9. Lomba Desa Pangan (bobot 5%).

Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu yang dilaksanakan secara virtual pada 23 Juni 2020 telah dihadiri oleh Tim Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan dari masing-masing kelurahan intervensi untuk menggalang komitmen dalam mewujudkan program kegiatan untuk mencapai desa pangan aman di wilayahnya.

Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dilakukan di 5 kelurahan intervensi dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Kelurahan	Lokasi Pertemuan
1.	Rabu-Kamis, 1-2 Juli 2020	Cipinang Besar Utara	Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara
2.	Selasa-Rabu, 7-8 Juli 2020	Utari Kayu Utara	Kantor Kelurahan Utari Kayu Utara
3.	Kamis-Jumat, 9-10 Juli 2020	Pondok Ranggon	Kantor Kelurahan Pondok Ranggon
4.	Senin-Selasa, 13-14 Juli 2020	Kramat Jati	Kantor Kelurahan Kramat Jati
5.	Kamis-Jumat, 16-17 Juli 2020	Kalisari	Kantor Kelurahan Kalisari

Kegiatan Bimtek Komunitas dilaksanakan pada 28 September 2020 secara daring dengan dihadiri oleh masing-masing 50 orang Komunitas, 15 orang Kader Keamanan Pangan, dan 4 orang Tim Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dari 5 Kelurahan yang diintervensi tahun 2020.

Fasilitasi Keamanan Pangan dilakukan oleh 15 orang Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) terhadap 50 orang Komunitas Desa di Kelurahan pada Oktober-November melalui observasi langsung terhadap praktik pengolahan pangan ke sarana komunitas dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat perubahan dan tindak lanjut atas rekomendasi pasca observasi yang telah dilakukan.

Tahapan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan dengan Pengambilan dan Pengujian Sampel dengan Mobil Laboratorium Keliling Pre dan Post Intervensi dan telah dilaksanakan pada bulan November 2020.

Workshop (Pertemuan) Lintas Sektor dalam Rangka Monev dilakukan secara *luring* dan *daring* dengan mengundang Pemda dan beberapa Lintas Sektor terkait program keamanan pangan pada Kamis, 3 Desember 2020 dan dihasilkan Dokumen Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Tahun 2021 di kelurahan intervensi. Lomba Desa Pangan Aman dilaksanakan pada Januari 2021 dengan juknis Lomba yang diedarkan oleh Direktorat PMPU sebagai penyelenggara pada Desember 2020. BBPOM di Jakarta ikut serta dalam Lomba Desa Pangan Aman dengan mengirimkan Profil Kelurahan Kalisari sebagai nominator Desa Pangan Aman yang mewakili Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Berdasarkan pembobotan progress tahapan kegiatan, Realisasi Kegiatan Intervensi Program Desa Pangan Aman Tahun 2020 ini ialah 100% yang artinya semua tahapan kegiatan intervensi Program Desa Pangan Aman tahun 2020 di wilayah kerja BBPOM di Jakarta telah dilaksanakan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019



Gambar 37. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2019 dan 2020

Jumlah realisasi desa/kelurahan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada tahun 2019 ialah sebanyak 5 sekolah begitu pula realisasi pada tahun 2020. Penentuan jumlah desa intervensi pada tahun 2019 dilakukan berdasarkan *road map* Desa Pangan Aman 2015-2019, sedangkan pada tahun 2020 dilakukan berdasarkan *roadmap* 2020-2024 dan masih merupakan program prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 serta mendukung program nasional percepatan penurunan dan pencegahan *stunting*. Realisasi presentase capaian tahapan intervensi program Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 sebesar 100% sama halnya dengan realisasi tahun 2019. Hasil ini menunjukkan semua tahapan intervensi Desa Pangan Aman sesuai dengan target tahapan pada juknis pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

- c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 38. Perbandingan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah sebanyak 5 (lima) kelurahan. Hasil ini telah sesuai dengan target intervensi Desa Pangan Aman yang telah ditetapkan. Begitu pula halnya dengan realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Pontianak berturut-turut sebanyak 5 (lima), 4 (empat), dan 4 (empat) desa.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi *progress* tahapan program Desa Pangan Aman tahun 2020 ialah 100%. Adanya PSBB karena pandemi Covid-19 ini menyebabkan beberapa tahapan intervensi Desa Pangan Aman ini terhambat khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tahapan Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Keamanan Pangan mengharuskan adanya visitasi oleh petugas BBPOM di Jakarta ke

sarana-sarana produksi dan pengolahan pangan komunitas di kelurahan. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah minimal petugas dan Kader Keamanan Pangan yang turun ke lapangan setelah pemberlakuan PSBB dan situasi penyebaran Covid-19 dapat terkendali.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu. Selain itu, koordinasi langsung ke kelurahan juga dilakukan dengan jumlah minimal petugas Balai Besar POM di Jakarta terutama dalam pelaksanaan Fasilitasi Keamanan Pangan. Perlunya penjelasan mekanisme pengisian *checklist* fasilitasi secara langsung untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan pengisian dan observasi serta mengingat latar belakang dari Kader Keamanan Pangan yang terdiri dari Ibu Rumah Tangga, Remaja, dan Masyarakat yang bervariasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan koordinasi hanya melalui media *Whatsapp* atau pertemuan virtual saja, tetapi dibutuhkan pendekatan secara tatap muka langsung dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Desa Pangan Aman dapat dijabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sebagai berikut:

1) Faktor pendukung Program GKPD

- a) Komitmen Lurah beserta Tim Keamanan Pangan Desa untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

- b) Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa/kelurahan dan pengawasan keamanan pangan di desa/kelurahan.
 - c) Adanya dukungan OPD terkait terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di desa/kelurahan.
 - d) Tersusunnya dokumen rencana program keamanan pangan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
 - e) Adanya peningkatan komunitas usaha pangan desa/kelurahan dengan pemberian SPPIRT oleh Sudinkes.
- 2) Faktor penghambat Program GKPD
- a) Koordinasi antara Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa perlu ditingkatkan.
 - b) Sistem pertemuan dan bimtek yang dilakukan secara *daring*, sehingga peserta yang mengikuti kurang fokus dan materi kurang dapat dipahami dengan baik.
 - c) Adanya kondisi Pandemi Covid 19 yang membatasi kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan yang membutuhkan interaksi tatap muka, sehingga pendampingan implementasi keamanan pangan oleh komunitas belum tercapai secara optimal.

17. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 25 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1	1	100	Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh Perumda Pasar Jaya sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Kegiatan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilakukan berupa Advokasi, Survei Pasar, Pelatihan Fasilitator Bimtek Petugas Pasar, Monitoring Evaluasi (Sampling dan Pengujian) Tahap 1, Penyuluhan, Kampanye, Monev Tahap 2, serta Lomba Pasar Aman. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- 2) Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- 3) Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah 1 (satu) pasar. Pasar yang dimaksud ialah Pasar Kramat Jati.

Realisasi Kegiatan Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dihitung berdasarkan *progress* tahapan:

1. Advokasi (bobot 20%)
2. Survei Pasar (bobot 5%)
3. Bimtek Pengelola Pasar dan Materi Pelatihan Fasilitator (bobot 15%)
4. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (bobot 20%)
5. Penyuluhan (bobot 5%)
6. Kampanye (bobot 5%)
7. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 2 Pasar (bobot 20%)
8. Lomba Pasar Aman (bobot 10%).

Kegiatan Survei Pasar telah dilaksanakan pada 18 Mei 2020, selanjutnya kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu yang dilaksanakan secara virtual pada 23 Juni 2020 sudah dilakukan koordinasi dan penggalangan komitmen pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya oleh OPD terkait dan Perumda Pasar Jaya sebagai Pengelola Pasar.

Kegiatan Bimtek Pengelola Pasar telah dilakukan pada 3 Juli 2020 dilanjutkan dengan Penyuluhan Pedagang Pasar pada 29 Juli 2020. Monev Tahap 1 telah dilaksanakan pada Juni-Juli oleh Petugas Pasar secara mandiri meliputi sampling dan pengujian sampel terhadap 45 sampel untuk 4 BB (Boraks, Formalin, Rhodamin B dan Methanil yellow) dan 5 sampel terhadap parameter Mikrobiologi yang telah selesai pada bulan September. Demikian pula dilaksanakan tahapan yang sama pada Monev Tahap 2 yang terlaksana pada September - Oktober.

Kegiatan Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilaksanakan pada 14 Oktober 2020 di Pasar Kramat Jati dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara khusus kepada masyarakat sebagai konsumen. Sama halnya dengan Lomba Desa Pangan Aman, Lomba

Pasar Aman juga dilaksanakan pada Januari 2021 dengan persiapan dan sesuai juknis yang telah dikeluarkan oleh Direktorat PMPU sebagai penyelenggara pada Desember 2020. BBPOM di Jakarta ikut serta dalam Lomba Pasar Aman dengan mengajukan Proposal Profil Pasar Kramat Jati.

Berdasarkan pembobotan progress tahapan kegiatan, Realisasi Kegiatan Intervensi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 ini ialah 100% yang artinya semua tahapan kegiatan intervensi tahun 2020 di wilayah kerja BBPOM di Jakarta telah dilaksanakan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

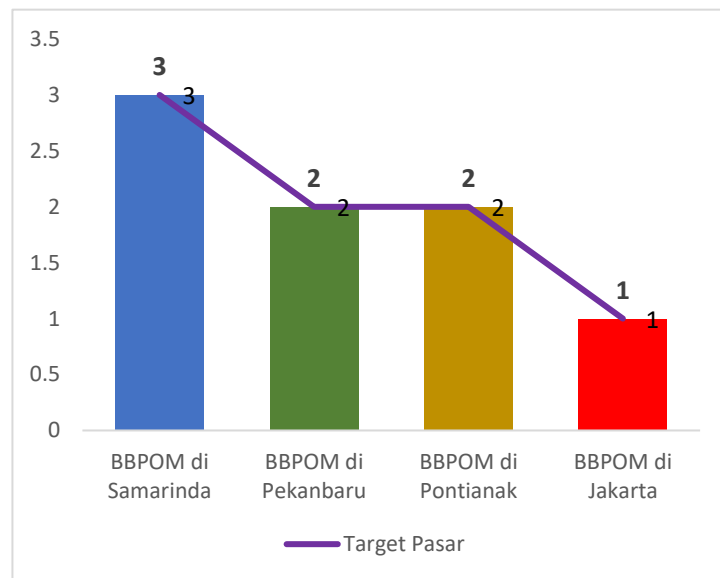


Gambar 39. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2019 dan 2020

Realisasi target intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2019 ialah sebanyak 8 (delapan) pasar. Sedangkan realisasi pada tahun 2020 ialah sebanyak 1 (satu) pasar. Hasil ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi presentase capaian tahapan intervensi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 sebesar 100% sama

halnya dengan capaian realisasi tahun 2019. Hasil ini menunjukkan semua tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sesuai dengan target tahapan pada juknis pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 40. Perbandingan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah sebanyak 1 (satu) pasar. Hasil ini sesuai dengan target intervensi yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Pontianak berturut-turut sebanyak 3 (tiga), 2 (dua), dan 2 (dua) pasar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan tahapan kegiatan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ini sudah sesuai *timeline* yang ditetapkan. Kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana. Pada pelaksanaan Monev Pasar terdapat kendala seperti pengujian yang tidak sesuai dengan parameter seharusnya karena adanya *gap* kemampuan petugas pengelola pasar yang melakukan pengujian dan sampling. Koordinasi dan supervisi yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta yang dilakukan secara terus-menerus ditujukan untuk meminimalisasi *gap* kemampuan petugas pasar yang ada. Supervisi dilakukan melalui media *Whatsapp* sehingga komunikasi berjalan efektif dan cepat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan kegiatan advokasi secara *daring*, terdapat kendala jaringan, sehingga tidak dapat dilakukan secara maksimal.
- 2) Kegiatan Bimbingan teknis, penyuluhan dan kampanye dilaksanakan dengan peserta yang terbatas dan menerapkan protocol kesehatan karena pandemi Covid-19.
- 3) Jumlah sampel yang diuji berkurang 50% dari target awal tahun.

- 4) Petugas pasar sudah memahami cara sampling dan pengujian Rapid Test sehingga kedepannya dapat dilakukan pengawasan secara mandiri.
- 5) Pedagang pada tahap 1 menjual produk mengandung Bahan berbahaya diberikan bimbingan dan pengetahuan tentang bahan berbahaya oleh petugas pasar didampingi BBPOM Jakarta, dan diberi arahan untuk tidak menjual produk tersebut.
- 6) Hasil uji Rapid Test tahap 2 di Pasar Kramat Jati: tidak terdapat produk yang mengandung Bahan Berbahaya.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 5, yang dinyatakan dalam bentuk progress, maka belum dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4}{4}$$

$$NPS = \frac{104.27 + 100.00 + 100.00 + 100.00}{4}$$

$$NPS = 101.07\%$$

Dengan NPS 101.07%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

BADAN POM

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

18. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 20. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	92,29	102,55	Baik

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/ *SOP*.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

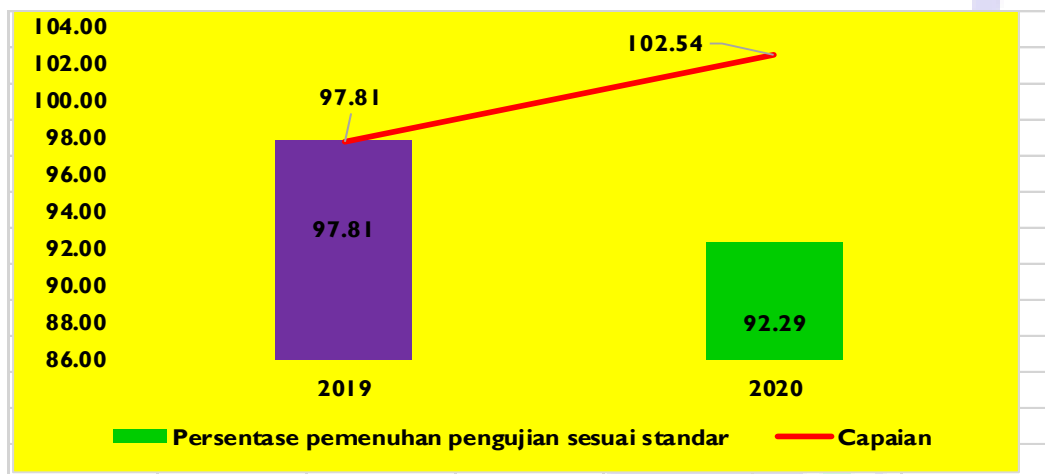
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

2

A = $\frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,29% dengan kriteria “**Baik**”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

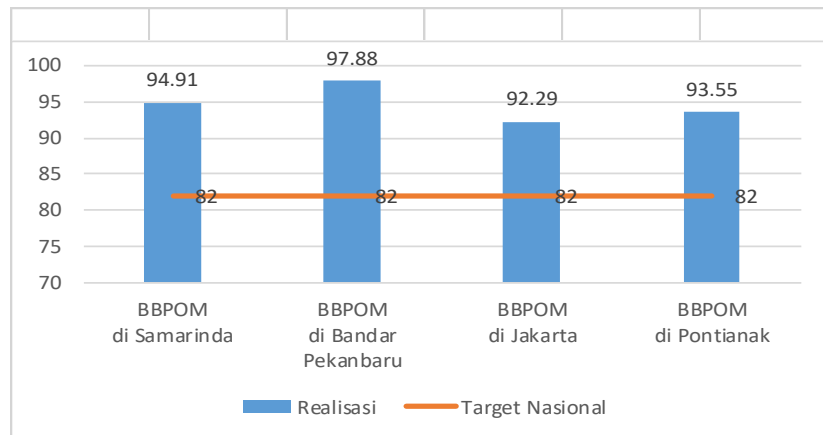


Gambar 26. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020

Realisasi persentase persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 **meningkat**, hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta **berhasil** meningkatkan kualitas pengujian laboratorium untuk selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM.

1) *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/ setara*

Berdasarkan **Gambar 27** diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta **berada** di atas target nasional bersama tiga balai lainnya yang setara.



Gambar 27. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2020 adalah 92,29 %, sudah melebihi target yang ditetapkan (90 %). Dari 1570 sampel yang diujikan di laboratorium, 1325 sampel diuji dengan parameter uji kritis yang lengkap sesuai Pedoman *Sampling* dan masuk timeline (sesuai standar) dan 1571 sampel diperiksa sesuai standar dari target sampel satu tahun 1568

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12

metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan dari laboratorium obat

- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
 - Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
 - Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
 - Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Kendala operasional laboratorium untuk program pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena sudah dilaksanakannya program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor). sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya. Program ini diharapkan dapat terlaksana untuk tahun tahun yang akan datang

19. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 21. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	81,03	91,04	Baik

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

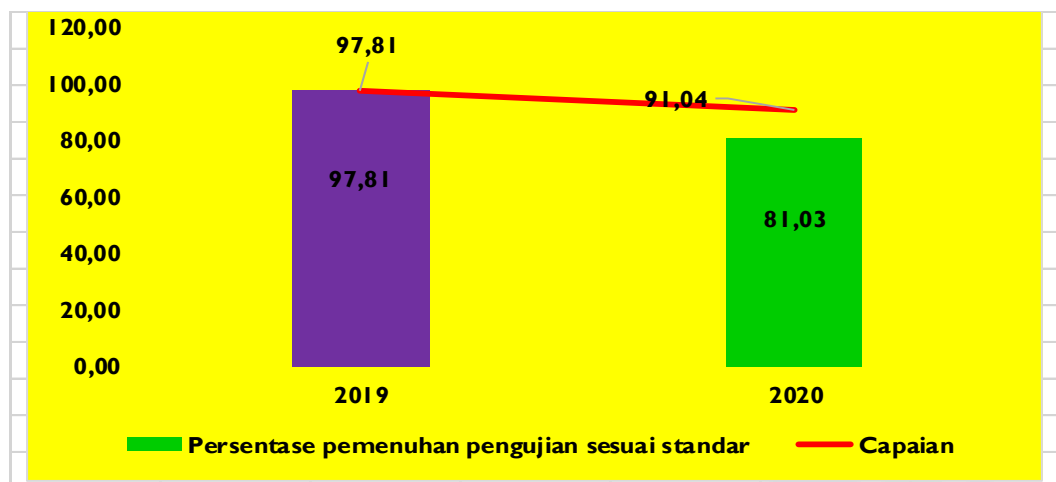
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan satu tahun}} \times 100\%$$

Capaian persentase pemenuhan pengujian makanan sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,04% dengan kriteria **“Baik”**. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM yaitu memenuhi parameter kritis dan memenuhi *timeline*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019



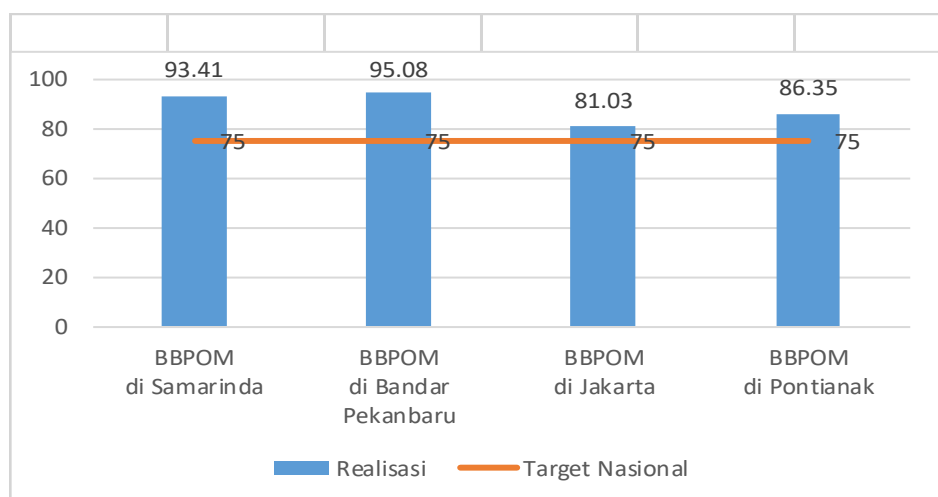
Gambar 28. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020

Realisasi persentase persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 **meningkat**, hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta **berhasil** meningkatkan kualitas pengujian laboratorium untuk selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berdasarkan **Gambar 29** diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta **berada di** atas target nasional bersama tiga balai lainnya yang setara.

BADAN POM



Gambar 29. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2020 yaitu 91,04% dengan kriteria “baik”. Dari 741 sampel yang diujikan di laboratorium, 530 sampel diuji dengan parameter uji kritis yang lengkap sesuai Pedoman *Sampling dan masuk timeline* (sesuai standar). Dan 650 sampel diperiksa sesuai standar. Beberapa hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya standar parameter uji kritis adalah belum tersedianya baku pembandingan. Untuk pengujian yang tidak masuk timeline karena selama masa pandemi COVID-19 beberapa pengujian ditangguhkan sehingga pelaporan sampel di luar *timeline*.

e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.

- melakukan Verifikasi Metode Analisa yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 25 metode.
 - Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
 - Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
 - Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Kendala operasional laboratorium untuk program pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena sudah dilaksanakannya program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor). sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya. Program ini diharapkan dapat terlaksana untuk tahun tahun yang akan datang

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{102,55\% + 91,04\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 96,79\%$$

Dengan NPS 96,79%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

20. Tingkat Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 22. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Tingkat Persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	32	54,37	169,91%	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan perhitungan sesuai formulasi di atas, capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 **sebesar 169,91%** dengan kriteria "**tidak dapat disimpulkan**".

Realisasi tersebut merupakan gambaran kinerja bidang Penindakan yang meliputi penyelesaian perkara tahun 2020 dan perkara *carry over*. Dari formulasi untuk pengukuran efektivitas kinerja penindakan tersebut, proses yang sepenuhnya bisa dikontrol oleh PPNS mendapatkan poin yang cukup besar, yakni 55% meliputi tahapan perkara mulai dari SPDP sampai dengan tahap 1 atau penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti. Selanjutnya dari tahap 1 sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap, terhadap faktor diluar kendali PPNS yang melibatkan koordinasi utamanya dengan Jaksa Peneliti, pada tahap ini

kinerja PPNS mendapatkan porsi 30% hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti tersebut. Jika Jaksa Peneliti memberikan petunjuk P19 kepada PPNS, maka tahapan ini masih diperhitungkan sebagai tahap 1. Proses terakhir dari rangkaian penilaian kinerja adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa atau tahap 2, dimana pada tahap ini pelaksanaannya melibatkan Jaksa, Korwas PPNS Polda Metro Jaya, dan tersangka yang akan diserahkan. Poin yang ditetapkan pada tahap ini sebesar 15% dari keseluruhan proses. Pelaksanaan tahap 2 tidak selalu mulus karena umumnya tersangka tidak ditahan selama proses penyidikan berlangsung, sehingga kooperatif atau tidaknya tersangka juga berperan penting.

Rincian capaian kinerja penindakan pada tahun 2020 termasuk perkara tahun 2020 dan perkara *carry over* adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian realisasi

Tahapan Kinerja	Tahun 2020	Carry Over
SPDP	3	18
Tahap 1	2	1
P19 (diperhitungkan sebagai tahap 1)	2	16
P21	-	7
Tahap 2	-	3
DPO	-	5
SP3	-	12
Total jumlah perkara	7	47*

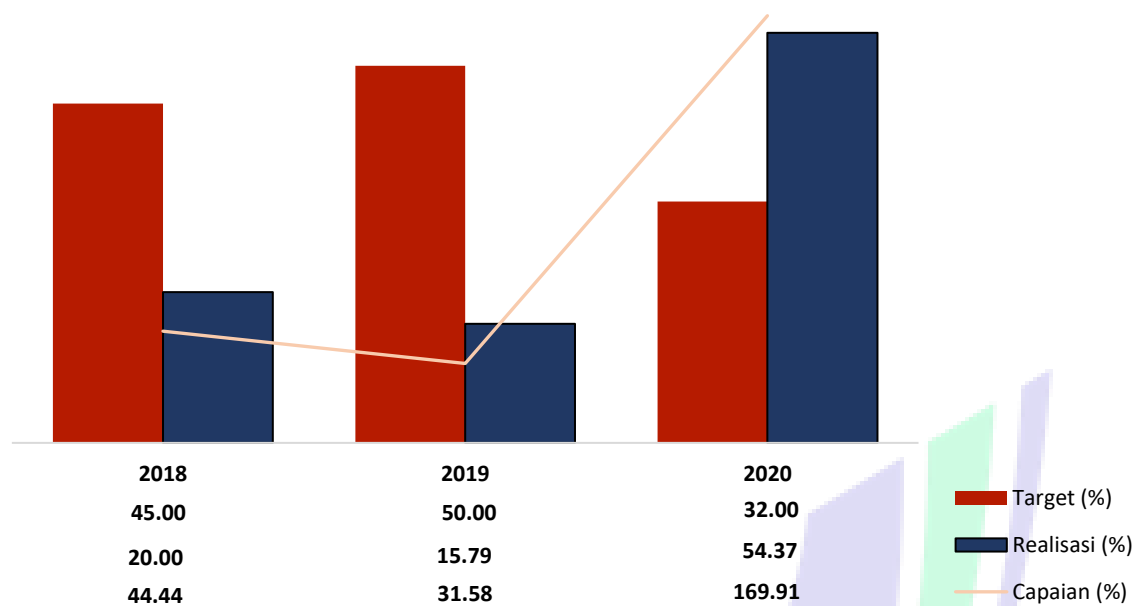
*Catatan untuk perkara *carry over*, di akhir 2020 kasus yang masih aktif sebanyak 47 perkara.

b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya

Terdapat perbedaan metode perhitungan kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan indikator kinerja tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan di atas mengukur tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan pembobotan yang berbeda pada tiap tahapan penyidikan. Perhitungan kinerja tahun sebelumnya adalah persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap kedua.

Berdasarkan perhitungan kinerja di tahun 2018, dengan target sebesar 45% dan realisasi sebesar 20%, maka capaian yang diperoleh sebesar 44,44%. Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun 2018, yakni hanya 31,58% yang diperoleh dari realisasi sebesar 15,79% terhadap target sebesar 50%. Sedangkan pada tahun 2020, capaian indikator kinerjanya sebesar 169,91% yang diukur dari realisasi sebesar 54,37% dibandingkan terhadap target 32%. Jika dibandingkan capaian kinerja 3 tahun terakhir dengan tanpa memperhitungkan perbedaan metode perhitungan kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja tahun 2020 meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

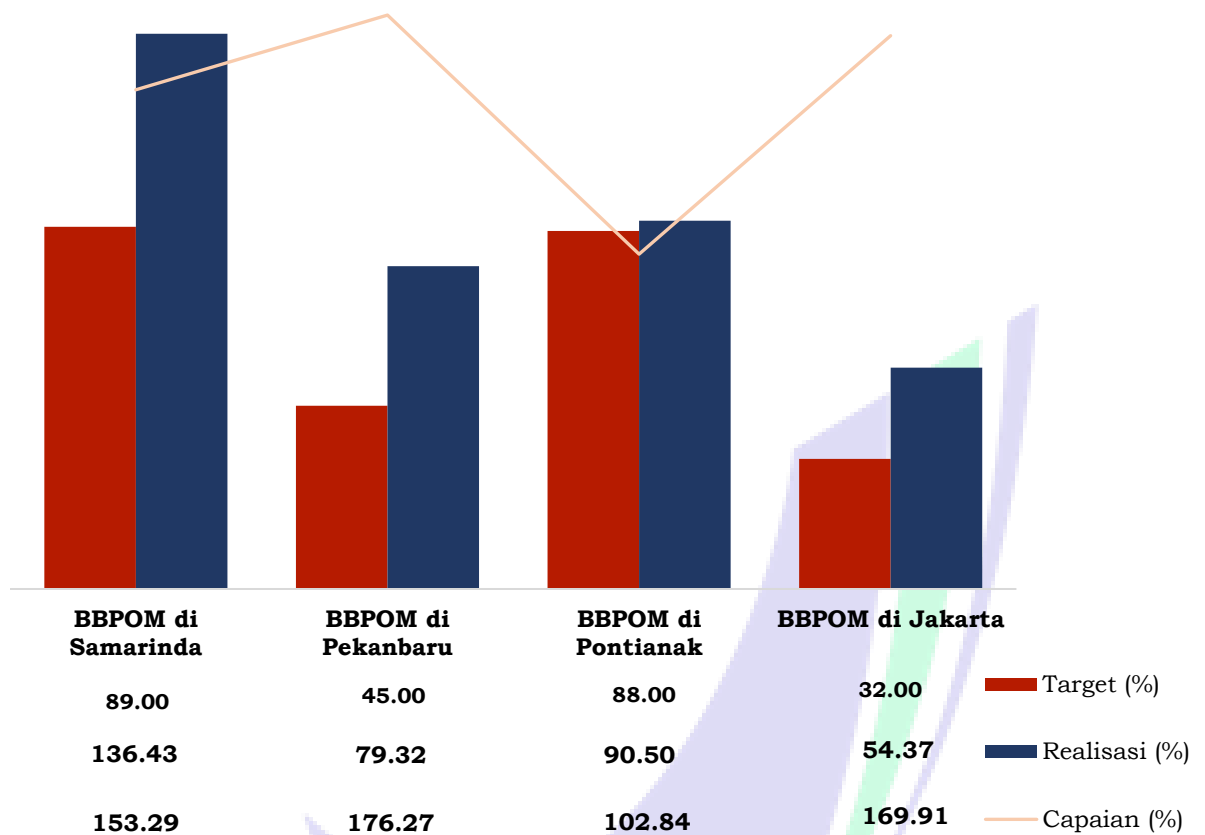
BADAN POM



Gambar 48. Capaian kinerja tahun 2018-2020

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang setara*

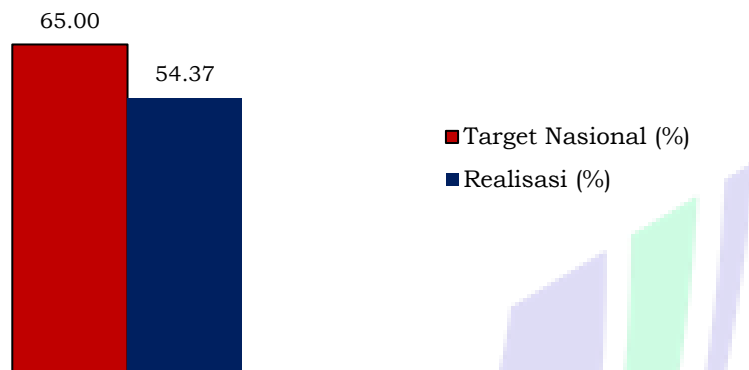
Perbandingan persentase realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 antara BBPOM di Jakarta dengan Balai lain yang setara tergambar pada grafik. Capaian BBPOM di Jakarta dibandingkan terhadap BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Pontianak. Dari perbandingan di bawah ini, capaian 3 dari 4 Balai Besar POM yang dibandingkan, menunjukkan realisasi jauh di atas target yang ditetapkan sehingga capaiannya berada pada kategori "**tidak dapat disimpulkan**". Balai tersebut adalah BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Jakarta. Sedangkan capaian kinerja BBPOM di Pontianak digolongkan dalam kategori "**baik**" yakni dengan capaian sebesar 102,84% berdasarkan perbandingan realisasi terhadap target.



Gambar 30. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2020 dengan Balai lain.

BADAN POM

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara capaian kinerja BBPOM di Jakarta dibandingkan terhadap target nasional adalah sebagai berikut:



Gambar 31. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2020 dibandingkan target nasional.

Berdasarkan penetapan target, terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan secara nasional dan target yang ditetapkan untuk BBPOM di Jakarta. Target kinerja untuk BBPOM di Jakarta ditetapkan sebesar 32, di bawah target nasional sebesar 65. Capaian kinerja tahun 2020 dengan realisasi sebesar 54,37% jika dibandingkan dengan target nasional 65% adalah **83,65%** sehingga masuk kategori **cukup**.

Penetapan target untuk BBPOM di Jakarta salah satunya disebabkan kondisi penanganan perkara BBPOM di Jakarta. Adanya kendala pada penyelesaian beban perkara *carry over* menyebabkan penetapan target tahun berjalan ditetapkan berada di bawah target nasional.

Capaian di triwulan keempat yang sudah melebihi target tahun 2020 menunjukkan adanya upaya PPNS untuk lebih berkinerja dan optimal dalam menyelesaikan tunggakan perkara selain perkara tahun 2020. Meskipun dalam hal ini, penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS sangat dinamis sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas perkara.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Analisis penyebab keberhasilan Bidang Penindakan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Penyesuaian sistem kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

Tahun 2020 dilalui dengan beberapa penyesuaian sistem kerja akibat pandemi Covid-19. Sejak pertengahan Maret hingga awal Juni, diterapkan sistem kerja WFH (*Work From Home*) terkait kondisi tanggap darurat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020. Kondisi ini mengakibatkan disrupti dalam sistem kerja yakni terkait dengan kegiatan pendalaman informasi dan penelusuran intelijen hingga penyelesaian berkas perkara oleh PPNS.

Adanya telegram dari Kapolda Metro Jaya selaku CJS dan Korwas PPNS menyebutkan bahwa saat situasi tanggap darurat, ditetapkan skala prioritas terhadap semua kegiatan yang melibatkan Polda Metro Jaya. Pada periode tersebut prioritas utama dari Polda Metro Jaya adalah kegiatan pengamanan dan percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini mengakibatkan beberapa proses penyelesaian berkas perkara tertunda selama masa tanggap darurat tersebut. Hal yang sama diberlakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang membatasi proses penyelesaian berkas perkara yang ditangani oleh PPNS. Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah DKI Jakarta juga membuat ruang gerak tim menjadi terbatas.

Dengan situasi tersebut, tim intel merespon situasi tersebut dengan mengintensifkan kegiatan patroli siber sebagai bentuk pengumpulan dan pendalaman informasi hingga penelusuran informasi intelijen. Sementara PPNS menggiatkan sistem koordinasi secara daring/*online* baik dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya maupun dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya ketika sebagian besar kegiatan sudah mulai dilakukan secara kombinasi antara WFH dan WFO (*Work From Office*), kegiatan pendalaman informasi dan operasi intelijen dilakukan secara kombinasi antara kegiatan di lapangan dengan patroli siber. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengoptimalkan kegiatan pengumpulan dan penelusuran informasi. Berdasarkan evaluasi, kegiatan tersebut cukup efektif dan efisien dari segi pemanfaatan anggaran dan pemenuhan target. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan penindakan yang sebagian besar merupakan hasil dari patroli siber.

2. Kerja sama tim yang solid

Pencapaian target kinerja juga ditentukan oleh soliditas kerja sama tim mengingat sebagian besar kinerja di Bidang Penindakan merupakan hasil dari kerja sama seluruh personil. Kegiatan penindakan yang berujung pada proses penegakan hukum diawali dengan informasi intelijen yang didalami oleh tim intelijen. Proses verifikasi informasi tidak bisa dilakukan hanya oleh 1 orang melainkan perlu dikonfirmasi dan dianalisa oleh tim secara keseluruhan sehingga informasi tersebut bisa dinilai sebagai informasi A1.

Selanjutnya informasi A1 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana operasi penindakan yang juga melibatkan tim baik intelijen maupun PPNS untuk menentukan waktu dan strategi penindakan yang tepat. Setelah pelaksanaan operasi penindakan, dilaksanakan proses gelar perkara untuk menganalisa apakah telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang diperlukan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jika dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka ditunjuk minimal 2 orang PPNS sesuai tingkat kesulitan perkara untuk menyelesaikan berkas perkara.

Rangkaian kegiatan sejak pengumpulan informasi hingga penyelesaian perkara yang diuraikan di atas memerlukan kerja sama seluruh personel yang solid, profesional, dan kredibel.

3. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang optimal

Salah satu faktor pendukung tercapainya kinerja tahun 2020 adalah pelaksanaan koordinasi secara optimal dengan CJS yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Penyesuaian pelaksanaan koordinasi dari yang tadinya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi sebagian besar dilakukan secara daring tidak mengurangi efektivitas dan intensitas koordinasi dengan CJS terkait. Pada situasi pandemi saat ini, proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 merupakan salah satu kendala yang dihadapi penyidik, sehubungan adanya kebijakan Rutan Kejaksaan Negeri tidak menerima tahanan sebelum putusan Pengadilan. Dalam hal ini, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya sehingga proses penyerahan tersangka dan barang bukti dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan koordinasi juga diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi PPNS secara daring dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Direktorat Penyidikan BPOM, Balai Besar POM di Bandung, serta Balai Besar POM di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas koordinasi PPNS dengan CJS, berbagi informasi terkait penanganan perkara dan pemenuhan unsur-unsur pidana sehingga dapat mendukung kinerja Bidang Penindakan BPOM.

4. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja

Peningkatan kinerja selama tahun 2020 ini menunjukkan implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang secara konsisten diterapkan. Pendisiplinan sistem pelaporan internal, meliputi Laporan Koordinasi, Rencana Penyidikan, Laporan Informasi dan *update* Monitoring Penyelesaian Perkara secara berkala menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja perlahan mulai dijalankan secara elektronik dengan skema berbagi file melalui Google Drive sehingga memudahkan pengisian atau *update* pekerjaan secara berkala. Situasi kerja yang merupakan kombinasi antara WFO dan WFH mengakselerasi perubahan tersebut. Kemudahan yang dirasakan dengan sistem ini membuka peluang untuk pengembangan fitur-fitur lain yang dirasa perlu, antara lain integrasi antar beberapa sistem pelaporan internal.

5. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Sehubungan dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki PPNS BPOM, kerja sama dengan lintas sektor adalah salah satu strategi yang harus dilakukan dan sejauh ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Kegiatan penelusuran dan pendalaman informasi peredaran obat dan makanan ilegal melalui situs daring/elektronik yang melibatkan kerja sama dengan aparat berwenang terkait Sistem Komunikasi dan Informasi, pihak *marketplace*, dan jasa pengiriman, dapat menghasilkan informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan. Kerja sama ini menghasilkan 4 (empat) kegiatan penindakan yang ditindaklanjuti menjadi 3 (tiga) perkara pada tahap SPDP.

Selain penerapan sanksi pidana, Bidang Penindakan BBPOM di Jakarta juga masih menerapkan sanksi administratif berupa *take down* terhadap akun toko daring yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain akun toko daring mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar, diduga palsu, atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk.

e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

1. Forum Koordinasi PPNS

Forum ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan. Tahun 2020 fokus dari kegiatan ini adalah upaya pemenuhan petunjuk Jaksa yang seringkali menjadi kendala dalam penyelesaian berkas perkara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Asisten Pidana Umum

(Aspidum) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyampaikan tentang unsur-unsur penting dalam pembuktian tindak pidana terkait obat dan makanan. Materi lainnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat menguraikan tentang proses pembuktian di pengadilan dan pelaksanaan pemusnahan yang seringkali terkendala oleh keputusan Pengadilan Negeri yang tidak bersedia mengeluarkan Surat Ketetapan Pemusnahan.

Selain penyampaian materi, forum tersebut juga menjadi sarana untuk menyampaikan usulan atau evaluasi terhadap koordinasi antara PPNS di bawah Korwas Polda Metro Jaya dan CJS terkait. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya target yang ditetapkan.

2. Inovasi **Laron Baja**

Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan dalam masa pandemi Covid-19, Bidang Penindakan membuat inovasi terkait verifikasi pemasukan barang kiriman melalui jasa pengiriman pos untuk keperluan penggunaan pribadi. Inovasi yang diberi nama **Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta)** ini merupakan sistem yang diimplementasikan agar petugas tetap dapat melakukan verifikasi terhadap impor barang yang ditujukan untuk penggunaan pribadi melalui jasa pengiriman Kantor Pos Pasar Baru. Kerja sama dengan KPP Pratama Bea dan Cukai Pasar Baru menghasilkan output berupa verifikasi dokumen terkait lartas BPOM, yakni sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PerBPOM Nomor 29 dan 30 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PerBPOM Nomor 14 dan 15 Tahun 2020.

Inovasi ini memanfaatkan Google Forms sebagai form elektronik yang diisi oleh penerima barang, yang terdiri atas unggahan identitas penerima barang, uraian detil barang kiriman, dan data dukung lainnya berupa resep dokter/rekomendasi rumah sakit, bukti pembelian, dan data dukung lainnya. Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen oleh petugas bidang Penindakan yang ditugaskan di setiap

hari kerja mulai pukul 08.00 - 16.30 WIB. Komunikasi dan konfirmasi dilakukan melalui *email* atau saluran layanan ULPK BBPOM di Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi program **Laron Baja**, sejak diterapkan pada tanggal 17 Maret 2020 hingga 31 Desember 2020, petugas BBPOM di Jakarta telah mendapatkan respon sebanyak 805 (delapan ratus lima) dokumen impor barang kiriman melalui jasa kiriman pos. Akibat pandemi Covid-19, terdapat peningkatan volume impor barang kiriman untuk penggunaan pribadi dikarenakan adanya larangan bepergian/terbang menuju Indonesia ataupun ke luar Indonesia.

Program **Laron Baja** ini dirasakan menunjang kegiatan utamanya selama masa tanggap darurat, karena data yang diperoleh dari hasil verifikasi dokumen impor tersebut menjadi informasi intelijen yang dapat ditindaklanjuti oleh petugas BBPOM di Jakarta. Salah satu dampak implementasi **Laron Baja** adalah penegahan importasi suplemen kesehatan merk Lianhua Qingwen Jiaonang yang meningkat cukup drastis yang penggunaannya diduga bukan untuk pemakaian pribadi. Kemudian terdapat informasi awal intelijen terkait dugaan pemasukan impor kosmetik untuk tujuan komersil di toko daring.



Gambar 51. Infografis Batasan Jumlah Barang Kiriman Sesuai Perka BPOM 15/2020

3. Program Pengembangan Kompetensi PPNS dan staf Bidang Penindakan

Kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan baik oleh PPNS maupun staf non-PPNS juga berperan dalam kesuksesan dalam capaian indikator kinerja. Selama tahun 2020, berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dapat diikuti dengan lebih mudah mengingat sebagian besar dilaksanakan secara daring. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Penindakan merupakan faktor utama atas profesionalisme personel untuk mencapai target yang ditetapkan.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja yang dibuat di tahun 2019 adalah mengintensifkan koordinasi dengan CJS dan pihak terkait dalam upaya penyelesaian berkas, serta peningkatan efektivitas patroli siber.

Sesuai dengan uraian di atas, koordinasi dengan CJS telah diintensifkan melalui Aspidum dan Kasi TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakselerasi penyelesaian tunggakan perkara dan penanganan berkas perkara lain yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Jakarta. Selain itu, koordinasi vertikal dengan Deputi Bidang Penindakan dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya juga rutin dilakukan melalui kegiatan gelar perkara secara rutin dan pendampingan dalam penanganan perkara penindakan obat dan makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Koordinasi sebagian besar dilakukan melalui pertemuan daring menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan gelar kasus.

Pelaksanaan patroli siber telah diterapkan dengan penerapan sanksi administratif berupa *take down* terhadap situs atau akun yang mengedarkan obat dan makanan ilegal melalui daring. Strategi terkait patroli siber ini akan disinergikan dengan upaya tindak lanjut yang dapat menimbulkan efek jera bagi pemilik akun yang mengedarkan obat dan makanan ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya untuk pencapaian yang lebih baik di tahun berikutnya, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan penyelesaian perkara *carry over* dengan lebih optimal melalui koordinasi dengan CJS terkait,
- 2) Peningkatan kapasitas personel untuk mengungkap modus baru dalam kejahatan bidang obat dan makanan serta peningkatan pemahaman dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap pelaku tindak kejahatan,
- 3) Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kinerja menjadi lebih optimal, dan
- 4) Mengembangkan jaringan (*networking*) dengan pihak-pihak yang dapat mendukung kinerja, antara lain dengan ahli pidana, ahli digital forensik, dan lintas sektor lain yang terkait.

Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan per sasaran kegiatan

Bidang Penindakan memiliki 2 output anggaran dimana realisasi masing-masing output adalah sebesar **99,49%** untuk output Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di DKI Jakarta (perkara) dan **99,79%** untuk output Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan (laporan).

Pada tahun 2020 ini terdapat beberapa penyesuaian target dan anggaran terkait adanya kebijakan *refocussing* anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Bidang Penindakan juga mengajukan justifikasi penyesuaian target dari semula 15 perkara menjadi 7 perkara karena adanya beberapa kendala terkait penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta yang membatasi pergerakan seluruh personel Bidang Penindakan baik untuk kegiatan intelijen maupun untuk kegiatan penyidikan. Selain itu juga terdapat kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya misalnya untuk pelatihan PPNS baru dan beberapa pelatihan teknis lainnya, dan juga

adanya perubahan sistem pelatihan dari yang tadinya direncanakan secara luring berubah menjadi daring.

Analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya

Hasil penilaian tingkat efisiensi anggaran di Bidang Penindakan adalah sebesar **0,94** atau capaian masuk ke dalam kategori **efisien (88%)**. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya lain yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2020.

Terkait pengelolaan anggaran, selama tahun 2020 juga telah memanfaatkan *spreadsheet* dan *sharing file* di Google Drive. Implementasi sistem tersebut juga dirasakan memberikan kemudahan antar tim pengelola anggaran. Berdasarkan evaluasi terkait anggaran yang dapat dimaksimalkan adalah monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan antara rencana dan implementasi serta pencapaian target di sisa tahun berjalan.

Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optima

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

21. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 23. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	REALISASI	REALISASI
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	80,17	91,10	Baik

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

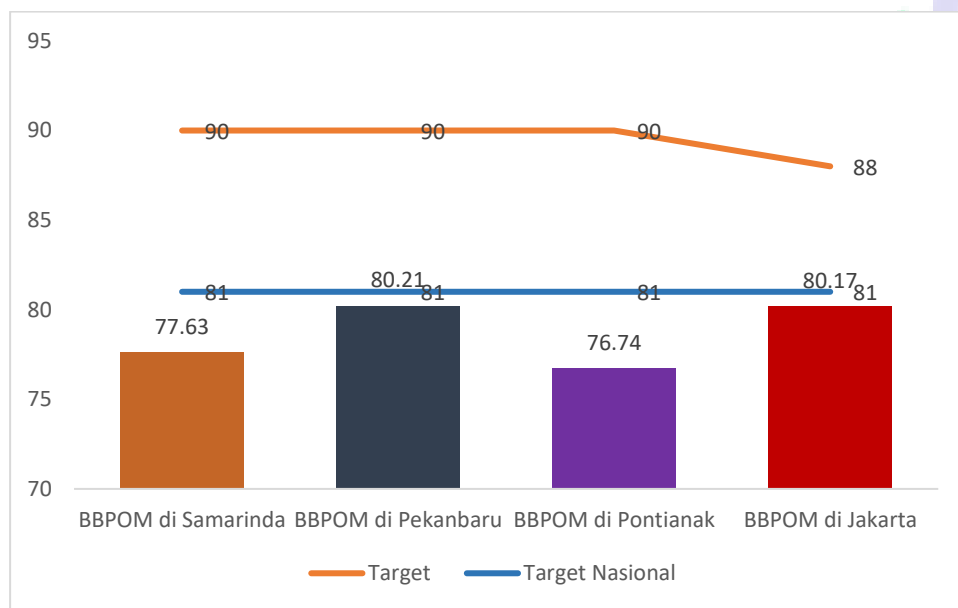
No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Nilai indeks dihitung dari Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama, dan indeks RB Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020 adalah 80,17, meskipun masih di bawah target tetapi telah memenuhi kriteria Baik. Hal tersebut juga didukung dengan terpilihnya Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu instansi berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2020.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019*

Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta yang optimal belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode renstra 2020-2024.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang setara*



Gambar 40. Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi nilai Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta dan balai lain yang setara belum mencapai target. Namun demikian, Balai Besar POM di Jakarta telah secara konsisten berupaya meningkatkan nilai Indeks RB di tahun 2020.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Balai Besar POM di Jakarta belum berhasil mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2020 karena keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung oleh keenam komponen

pengungkit. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana keenam komponen tersebut dapat mendukung komponen hasil pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Di tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menginternalisasi reformasi birokrasi bagi seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyebaran informasi melalui media sosial secara berkala, komunikasi berbasis elektronik untuk koordinasi dan FGD perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi di bulan Desember 2020.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta yang optimal belum dapat dievaluasi dan dianalisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode renstra 2020-2024.

22. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Tabel 24. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	78,08	96,39	Baik

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 25. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

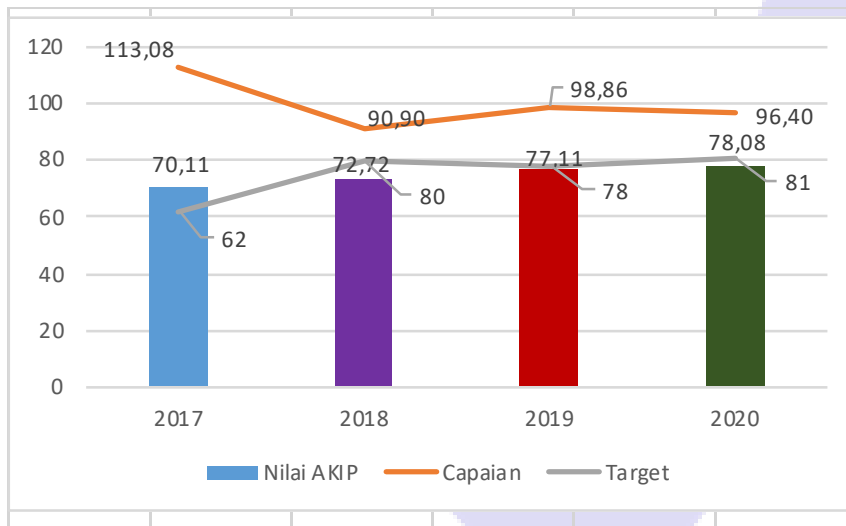
Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- (2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- (3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- (4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- (5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60

- (6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- (7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Jakarta pada tahun 2020 adalah 78,08, meskipun masih di bawah target tetapi telah memenuhi kriteria Baik dan termasuk kategori BB.

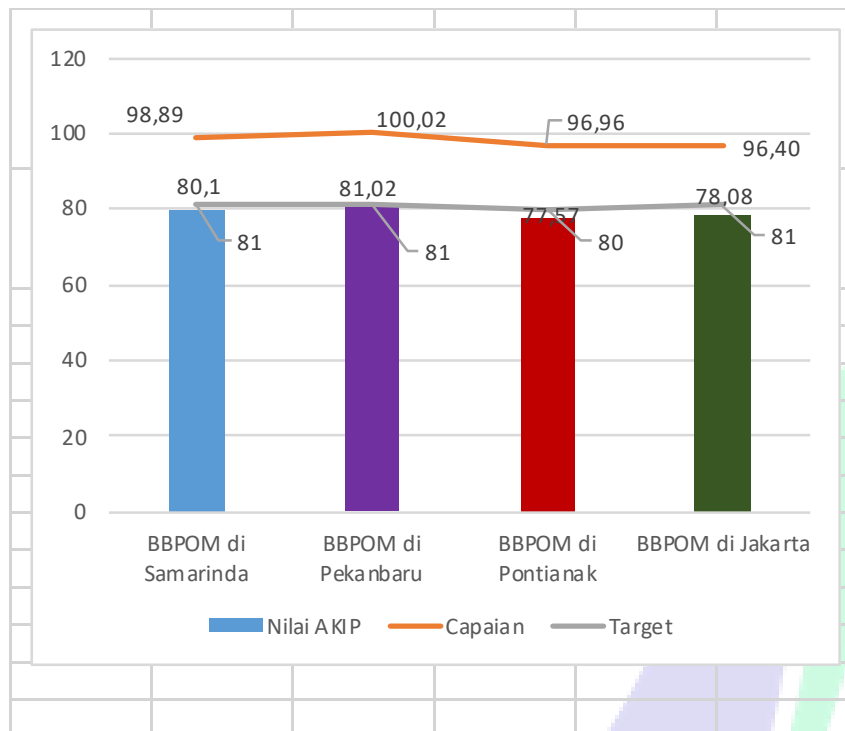
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019/2018/2017



Gambar 32. Realisasi Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas realisasi Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Capaian terlihat fluktuatif disebabkan karena meningkatnya target yang ditetapkan di tahun 2017 dan tahun 2020. Hal ini mencerminkan adanya upaya Balai Besar POM di Jakarta yang berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara*



Gambar 33. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta dan balai lain yang setara belum mencapai target. Namun demikian, Balai Besar POM di Jakarta telah secara konsisten berupaya meningkatkan nilai AKIP di tahun 2019 dan 2020.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Hal-hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP dari tahun sebelumnya antara lain:

- Pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan yang berdasarkan *Balance Score Card* dan pengukuran kinerja *cascading* dari pejabat eselon 2 di Balai Besar POM di Jakarta hingga pejabat

eselon 3 dan 4. Pengukuran ini telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu.

- Konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta memperbarui sertifikat ISO 9001:2015 dengan SOTK lama menjadi sertifikat ISO 9001:2015 sesuai SOTK baru melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD pada tahun 2018
- Balai Besar POM Jakarta telah menetapkan Renstra 2020-2024 sesuai SOTK baru dengan metode *Balance Score Card*, memakai 4 perspektif (*customer, stakeholder, internal proses, dan learning & growth*) menghasilkan 11 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja utama.
- Evaluasi kinerja secara rutin dilakukan dengan membahas pencapaian indikator secara berkala, kendala dan solusinya.

e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Pencapaian sasaran indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat

Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan gambaran tentang kinerja pelayanan publik Balai Besar POM di Jakarta. Survei dilaksanakan oleh Inspektorat BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan.

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara nasional berdasarkan 5 (lima) indikator pembentuk indeks yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy, maka diperoleh nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat secara nasional 72,54 yang merupakan gabungan dari nilai indeks kepuasan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Khusus untuk provinsi DKI Jakarta, nilai indeks kepuasan masyarakat adalah 73,30

Indeks Kepuasan Langsung diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pengawasan Obat dan Makanan yang menggunakan fasilitas publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan terhadap kepuasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat oleh BPOM melalui fasilitas website BPOM, HALOBPOM-1500533, media massa dan penyuluhan

2) Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja dihitung berdasarkan PerKa BPOM No 20 tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2020 dilakukan pengadaan alat laboratorium, pengadaan meubelair, dan pengadaan alat pengolah data berupa komputer, printer, dll

3) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi

yang dilaporkan tepat waktu. Dokumen yang telah dilaporkan tepat waktu pada tahun 2020 meliputi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2020, Laporan Kinerja tahun 2019, Laporan kinerja triwulan I, Laporan kinerja triwulan II, Laporan kinerja triwulan III, Laporan kinerja triwulan IV, Laporan Tahunan tahun 2019, Laporan Keuangan tahun 2019, Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2020, dan Renstra 2020-2024. Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf Balai Besar POM di Jakarta
- Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Pada tahun 2018, Badan POM telah mengembangkan aplikasi e-preformance yang berdasarkan *Balance Score Card* dan pengukuran kinerja *cascading* dari pejabat eselon 2 di Balai Besar POM di Jakarta hingga pejabat eselon 3 dan 4. Pengukuran ini telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu. Pengembangan aplikasi *e-performance* ini jauh lebih baik dari versi tahun 2017 yang hanya mengukur kinerja pejabat eselon 2. Diharapkan perkembangan ini dapat menaikkan nilai SAKIP di tahun berikutnya.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 8, maka belum dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{91,10\% + 96,40\%}{2}$$

Dengan NPS 93,75%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil dalam mencapai sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optimal.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

23. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Tabel 26. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	83,94	111,92	Sangat Baik

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

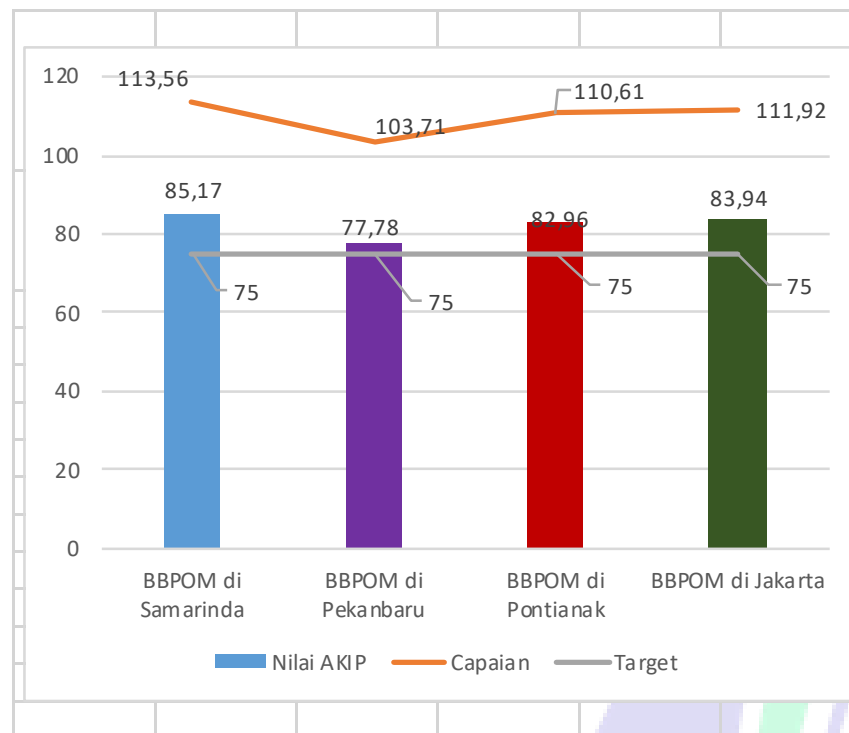
- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks profesionalitas Balai Besar POM di Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Utama, dan indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 adalah 83,94 telah melampaui target yang ditetapkan 75, dengan nilai pencapaian sasaran 111,92 dengan kriteria “Sangat Baik”

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Indeks profesionalitas Balai Besar POM di Jakarta yang optimal belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode renstra 2020-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan balai setara lainnya



Gambar 43. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di Jakarta tahun 2020 dengan Balai lain.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks Profesionalitas Balai Besar POM di Jakarta dan balai lain yang setara sudah mencapai target nasional dan target Balai yang telah ditetapkan. Namun demikian, Balai Besar POM di Jakarta selalu berupaya secara konsisten untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN di tahun yang akan datang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indeks profesionalitas adalah karena kualifikasi pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebagian besar adalah sarjana yang menjadi modal dasar pengembangan kompetensi, prestasi kerja dan disiplin.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung oleh banyaknya kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai Balai Besar POM di Jakarta yang memiliki bobot tertinggi (40%) dalam penilaian.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya

Pengembangan kompetensi individu selalu menjadi target untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pegawai, meskipun di tahun 2020 hanya mengukur jumlah jam pelajaran yang diikuti. Diharapkan perkembangan ini pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat menaikkan nilai indkes professional ASN di tahun berikutnya.

Dengan NPS 111,92%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil dalam mencapai sasaran terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal.

BADAN POM

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

24. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 27. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar *GLP* tahun 2020

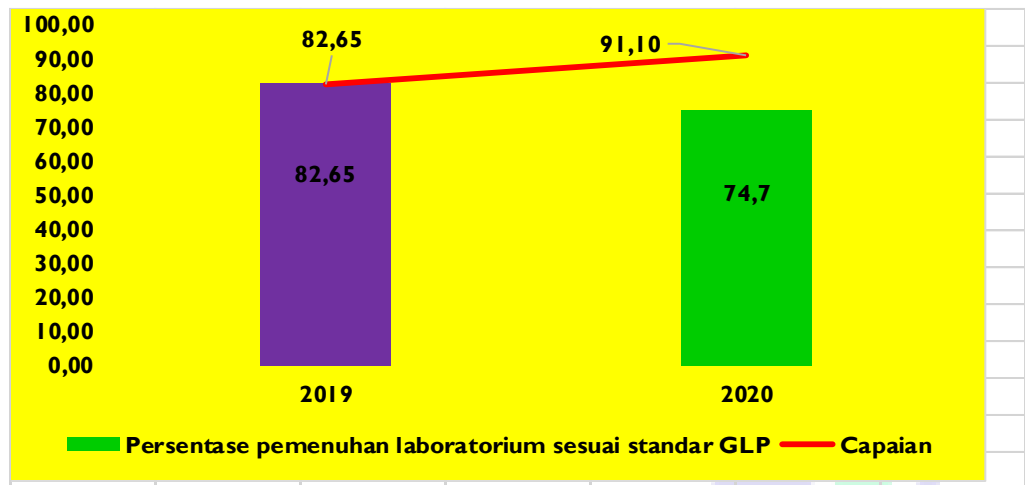
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82	74.70	91.10	Baik

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup ≥ 65 ,
- Standar Kompetensi personel laboratorium ≥ 75 ,
- Standar Alat Laboratorium ≥ 70

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

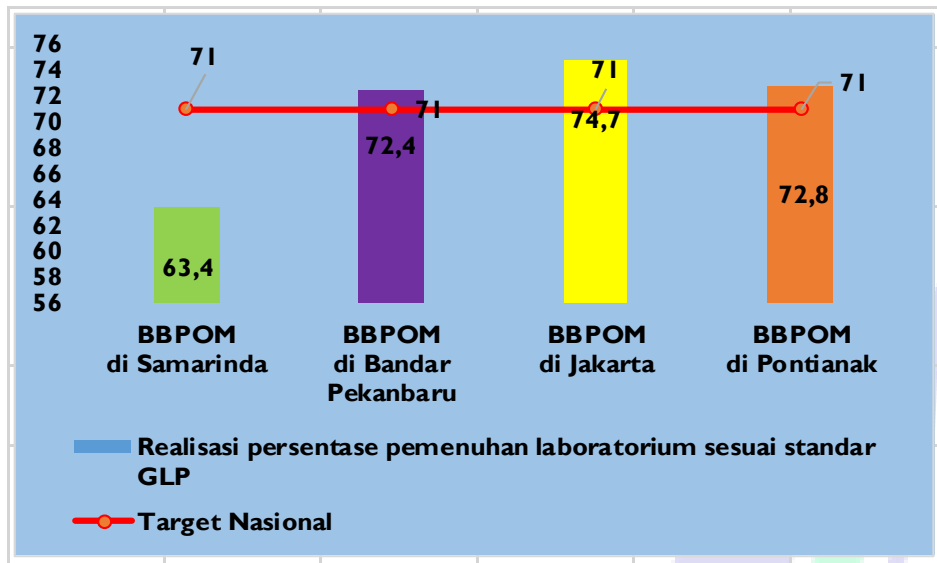


Gambar 34. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019.

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2020 berdasarkan hasil asesmen GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) di Balai Besar POM di Jakarta adalah 74.70%. Nilai ini masih berada di bawah target 82%. meskipun telah memenuhi kriteria “Baik”.

BADAN POM

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 35. Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan laboratorium sesuai standar GLP di Balai Besar POM di Jakarta dan dua Balai Besar POM yang setara berada di atas target nasional, sedangkan 1 balai lainnya yang setara berada di bawah target nasional 71%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penetapan target Realisasi persentase pemenuhan laboratorium sesuai standar GLP di BBPOM di Jakarta adalah 82%. Nilai ini lebih tinggi dari target nasional (71%), namun penetapan target tahun 2020 ini sudah didasarkan pada hasil asesmen GLP tahun 2019 yaitu 82,65%. Meskipun target lebih tinggi dari target nasional, namun capaiannya masih dalam kriteria baik (91,10%).

Kegagalan pencapaian target ini disebabkan perubahan penilaian kemampuan laboratorium di tahun 2020 dengan standar yang lebih tinggi dibanding standar yang digunakan di tahun 2019. Perubahan

standar tersebut meliputi perubahan standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan dan standar kompetensi personil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan Badan POM di masa depan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi prosentase pemenuhan laboratorium sesuai standar GLP antara lain ketersediaan baku pembanding, ketersediaan alat laboratorium dan kompetensi personil.

Dengan semakin bervariasinya parameter uji dalam Standar Ruang Lingkup yang ditetapkan di PPPOMN, maka pengadaan baku pembanding yang tidak tersedia di PPPOMN harus diprioritaskan untuk dilakukan secara mandiri oleh Balai Besar POM di Jakarta.

Terdapat standar jumlah peralatan laboratorium yang belum terpenuhi disebabkan ada alat yang dipakai bersama antara laboratorium Kosmetik, Obat tradisional, dan Laboratorium Pangan. Jika masing masing laboratorium mengadakan alat sendiri maka pengadaan tidak efisien karena jumlah pengujiannya juga tidak banyak.

Kompetensi personel ditingkatkan dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal bagi seluruh staf laboratorium.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Untuk meningkatkan persentase pemenuhan laboratorium sesuai standar GLP maka beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

Perencanaan pengadaan baku pembanding, verifikasi metode analisis, pengadaan peralatan laboratorium dan pengembangan kompetensi personil yang lebih baik dan dilaksanakan lebih awal.

25. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 28. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2,08	137,74	Tidak dapat disimpulkan

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di *BCC (BPOM Command Centre)*
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *BCC* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - *BCC* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu

juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem *BCC* yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - (1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - (2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai: *email, sharing folder, dashboard BCC*, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat: *email dan dashboard BCC*

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

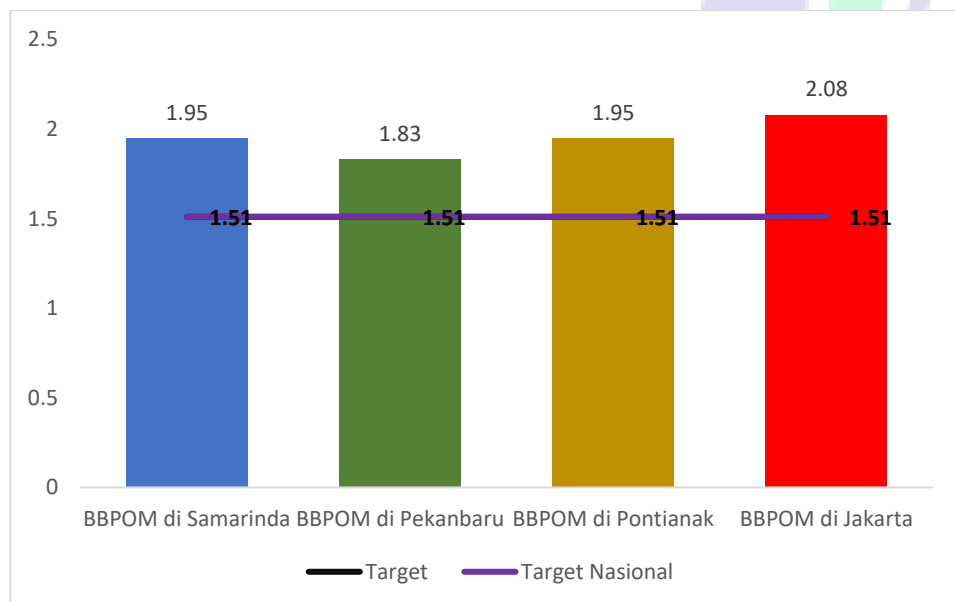
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi di triwulan keempat sebesar 2,08 dengan kriteria “sangat baik”. Artinya selama periode Januari sampai Desember 2020, jumlah akses data dalam satu bulan Balai

Besar POM di Jakarta telah memenuhi untuk SIPT, SPIMker, *e-mail*, *sharing folder*, *dashboard BCC* dan berita aktual.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode renstra 2020-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 44. Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Perbandingan realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2020 antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang setara tergambar pada grafik di atas. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Jakarta berada di atas target nasional, demikian juga dengan realisasi Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Pekanbaru dan Balai Besar POM di Pontianak.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil mencapai target Indeks pengelolaan data dan informasi karena pemanfaatan *email* instansi dan literasi teknologi informasi telah mulai optimal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi telah dilaksanakan pada triwulan kedua untuk seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta. Kegiatan ini diharapkan semakin meningkatkan literasi teknologi dan informasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta. Selanjutnya, Sebagian besar pegawai diharapkan mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan mudah yang pada akhirnya telah meningkatkan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dibandingkan dengan indeks di triwulan IV.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rekomendasi terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Kerjasama semua pegawai terkait dalam pengelolaan akun sosial media telah memberikan dampak positif untuk menjangkau pegawai senior agar lebih *melek* teknologi.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, pendekatan dan sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun berikutnya.

Sasaran strategis 10 dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{91,10\% + 137,75\%}{2}$$

2

$$\text{NPS} = 114,42\%$$

Dengan NPS 114,42%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah dinyatakan berhasil dalam mencapai sasaran terwujudnya menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

26. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Tabel 29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	89,264	95,98	Baik

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran,

kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian *Output*

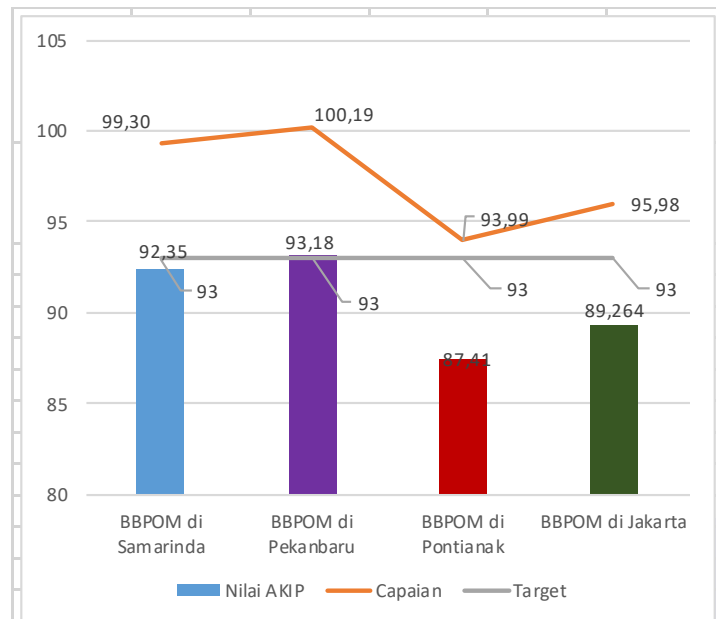
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Realisasi nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta adalah 88,858% meskipun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93% sehingga masuk kriteria “baik”

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Nilai Indeks kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta yang optimal belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode renstra 2020-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 45. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2020 antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang setara tergambar pada grafik di atas.

Hanya Balai Besar POM di Pekanbaru yang berhasil melampaui target di tahun 2020. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Jakarta berada di bawah target nasional, demikian juga dengan realisasi dua balai lainnya. Kondisi ini menjadi motivasi untuk peningkatan nilai kinerja anggaran di Balai Besar POM di Jakarta di tahun yang akan datang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator pada tahun 2020 meskipun masih jauh di bawah target tahun 2020, sudah masuk kategori Baik. Penyebab belum berhasilnya pencapaian target terutama disebabkan oleh rendahnya nilai EKA dari smart DJA. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh rendahnya konsistensi RPD awal dan RPD akhir meskipun penyesuaian RPD telah dilakukan pada saat revisi DIPA. Penyesuaian RPD yang dibuat seharusnya dibuat berdasarkan data dari realisasi OMSPAN, bukan berdasarkan realisasi dari aplikasi SAS.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 telah dilakukan pendekatan untuk memenuhi semua ketentuan 13 indikator IKPA antara lain dengan melakukan revisi DIPA hanya sekali setiap triwulan, melakukan penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA, melakukan *revolving* uang persediaan 2 kali dalam sebulan, rekon LPS bendahara tepat waktu, melaporkan data kontrak sebelum batas 5 hari kerja, memastikan kebenaran rekening tujuan supaya tidak ada retur SP2D. Namun karena terjadi pandemi COVID-19 pada Maret 2020, nilai mulai direaktivasi pada 1 Juli 2020. Nilai IKPA dapat diakses melalui spanint.kemenkeu.go.id. Pengelolaan keuangan secara lebih optimal terus diupayakan agar ke-tiga belas indikator IKPA dapat mencapai hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rekomendasi terkait nilai kinerja anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Kerjasama untuk konsisten dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana penarikan terus dilakukan. Selain itu, telah dilakukan koordinasi untuk kontrak agar data dapat dilaporkan sesuai ketentuan. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun selanjutnya.

27. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2020*

Tabel 30. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	KRITERIA
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26%	Baik

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian *input*, dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1. Standar efisiensi (SE) adalah 1

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien, dengan kriteria:

- (1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- (2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- (1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- (2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- (3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- (4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- (5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- (6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- (7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- (8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- (9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- (10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)
- (11) < 0 : 75% (Tidak Efisien)

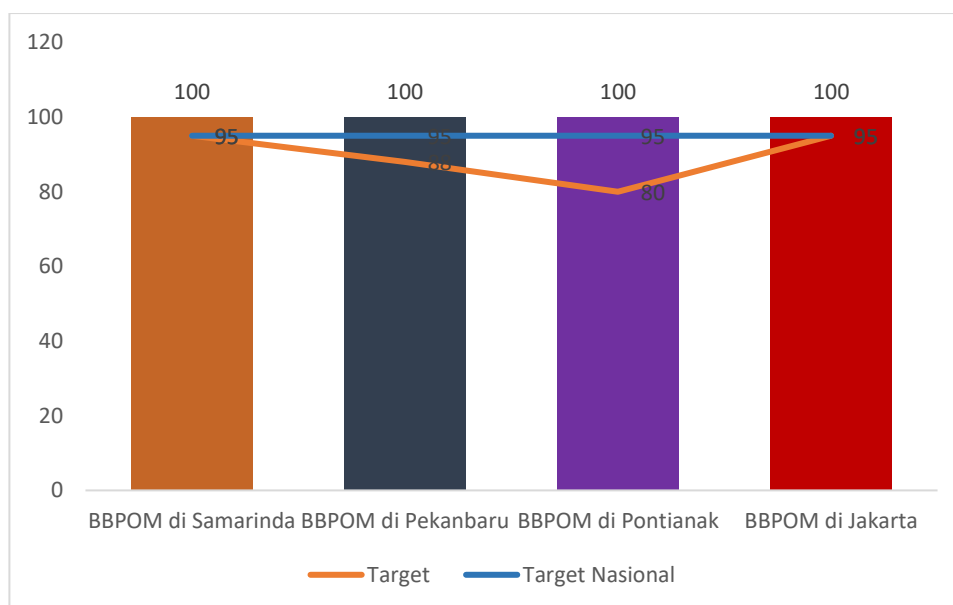
Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Jakarta telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “baik”, meskipun terjadi pandemi COVID-19.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Perbandingan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Bear POM di Jakarta Balai Besar POM di Jakarta yang optimal belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode renstra 2020-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Balai lain yang sejenis/setara

BADAN POM



Gambar 46. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.

Perbandingan realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2020 antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang setara tergambar pada grafik di atas. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan 3 balai lainnya berada di atas target nasional sudah melebihi target. Kondisi ini menjadi motivasi untuk peningkatan efisiensi penggunaan anggaran di Balai Besar POM di Jakarta di tahun 2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Perubahan struktur anggaran akibat pandemi COVID-19 menyebabkan revisi optimalisasi anggaran untuk biaya penanggulangan COVID-19, yang mengakibatkan penyesuaian *output*. Prioritas anggaran untuk penanganan COVID-19 melalui revisi anggaran meskipun berkontribusi dalam penurunan kinerja, tetapi tetap dapat mencapai target tingkat efisiensi anggaran. Hal ini antara lain dengan adaptasi kegiatan melalui media jarak jauh serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pelaporan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Selama masa pandemi COVID-19, Balai Besar POM di Jakarta berupaya tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Adaptasi pola pelaksanaan sebagian besar kegiatan menjadi daring. Antisipasi perubahan kondisi selama masa pandemi COVID-19 yang bertumpu pada kegiatan daring berdampak positif pada pencapaian *output*. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi tetap efisien dan kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2020 sesuai dengan target yang diharapkan.

- f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Rekomendasi terkait tingkat efisiensi anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Usulan penurunan target sebagai penyesuaian ketersediaan anggaran sebagai dampak dari pandemi COVID-19 perlu dilaksanakan. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja tingkat efisiensi anggaran dapat memenuhi target di tahun 2021.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 11, maka belum dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

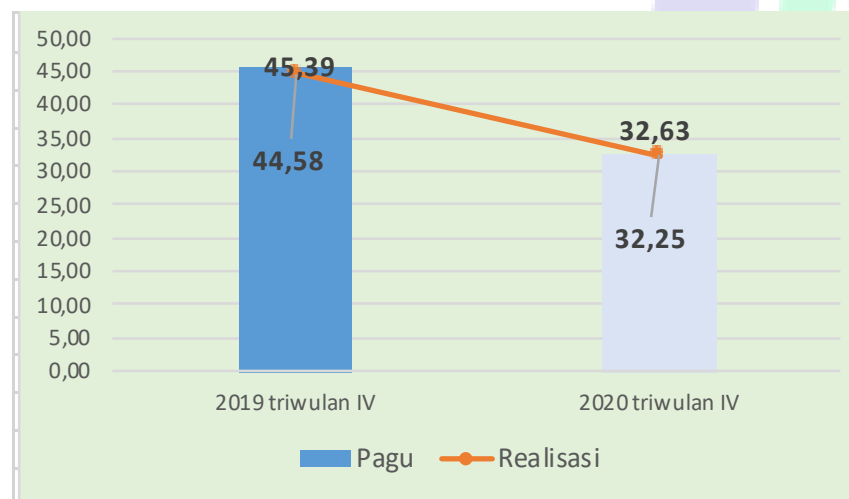
$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{95,54\% + 105,26\%}{2}$$

Dengan NPS 148,17, maka Balai Besar POM di Jakarta dapat dinyatakan berhasil dalam mencapai sasaran Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tanggal 2 Maret 2019 terjadi penambahan pagu DIPA menjadi Rp 44.553.826.000,00 karena adanya penambahan anggaran untuk kegiatan KIE. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 disahkan revisi kedua yang merupakan implementasi dari APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) karena kondisi darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pagu DIPA revisi APBN-P yang berkurang menjadi Rp32.626.736.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp32.248.238.440 atau 98,84%.



Gambar 36. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2019

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.049.183.800	1.033.618.314	98,52%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	112.120.800	109.132.393	97,33%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.859.862.800	1.842.364.090	99,06%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah	802.363.400	796.863.952	99,31%

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
	kerja Balai Besar POM di Jakarta			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2.036.654.000	2.019.714.614	99,17%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	449.650.200	442.979.277	98,52%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.036.012.000	1.030.978.877	99,51%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	342.755.000	338.211.691	98,67%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	23.184.820.000	22.901.275.271	98,78%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1.410.559.000	1.394.888.270	98,89%

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	342.755.000	338.211.691	98,67%

Rendahnya capaian anggaran di sasaran 2 “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” terdampak kebijakan penanganan Pandemi COVID-19 (*physical distancing*, PSBB, dan *WFH*) sehingga *penguji dan inspektur* menghadapi kendala dalam proses pengujian dan pemeriksaan sarana. Menyikapi kondisi terkini terkait penyebaran COVID-19, seluruh instansi Pemerintah, termasuk Balai Besar POM di Jakarta, telah melakukan berbagai upaya antisipasi, khususnya dengan melakukan pembatasan sosial yang diantaranya dilakukan melalui mekanisme *Work From Home (WFH)*.

WFH berdampak terhadap proses kegiatan pengujian, pemeriksaan sarana, penindakan, KIE dan layanan pengawasan terhadap obat dan makanan, khususnya dalam hal penyampaian dokumen, pembahasan dan *meeting* lainnya yang diperlukan dalam proses kegiatan. Perubahan pola kerja karena WFH mungkin berdampak pada diperlukannya waktu tambahan, di samping peralatan dan sistem yang perlu dioptimalkan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai rencana yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau

penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing- masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \underline{IE - SE}$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 32. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2020

NO	Program/ <i>Output</i> /Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		<i>input</i>	<i>output</i>				
1	3165.002 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di DKI Jakarta (perkara)	99,29	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
2	3165.003 Sampel Makanan yang Diperiksa (sampel)	97,13	102,37	1,05	1,00	0,05	Efisien
3	3165.004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	99,53	104,40	1,05	1,00	0,05	Efisien
4	3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	99,02	119,72	1,21	1,00	0,21	Efisien
5	3165.011 Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan (laporan)	99,79	100,00	1,00	1,00	0,00	Tidak Efisien
6	3165.012 Laboratorium pengawasan Obat dan	98,65	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien

NO	Program/ <i>Output</i> /Kegiatan	Persen capaian rata- rata		IE	SE	TE	Kategori
		<i>input</i>	<i>output</i>				
	Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (laboratorium)						
7	3165.081 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa (sampel)	99,32	100,19	1,01	1,00	0,01	Efisien
8	3165.085 Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (sekolah)	99,17	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
9	3165.087 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (jenis keputusan)	98,13	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
10	3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman (KIE)	99,11	117,24	1,18	1,00	0,18	Efisien
11	3165.089 Desa Pangan Aman (desa)	99,29	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
12	3165.090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)	99,33	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien

NO	Program/ <i>Output</i> /Kegiatan	Persen capaian rata- rata		IE	SE	TE	Kategori
		<i>input</i>	<i>output</i>				
13	3165.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	99,65	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
14	3165.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	98,06	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
15	3165.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	98,82	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien

Pada tahun 2020 Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis yang sebagian besar termasuk kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 0,21. Dalam hal ini, semakin rendah TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. “Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa” mempunyai TE tertinggi karena *output* yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian *output* mencapai 119,72% dengan *input* hanya sebesar 99,02%. Tingginya efisiensi *output* sarana distribusi yang diperiksa, karena anggaran yang direncanakan telah sejalan dengan pencapaian *output*. *Output* tercapai dengan anggaran yang ada dengan mengefisienkan beberapa belanja bahan dan perjalanan dinas yang banyak dialihkan menjadi kegiatan daring.

Berdasarkan data Tabel 32 dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai Besar POM di Jakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan

dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 33. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		<i>input</i>	<i>output</i>				
		1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta				
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	97,33%	110,04%	1,13	1,00	0,13	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	99,06%	101,92%	1,03	1,00	0,03	Efisien

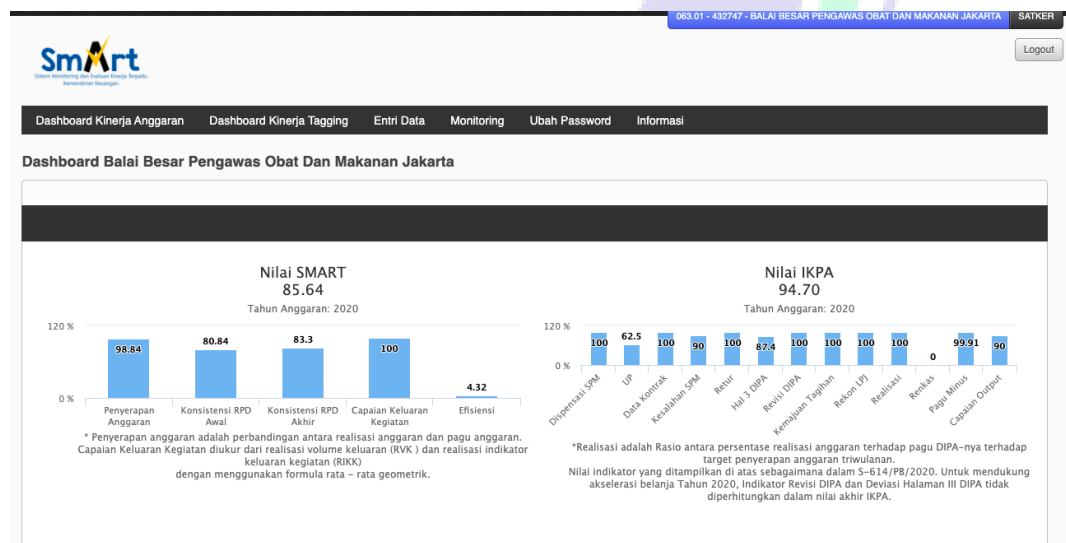
No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,31%	115,73%	1,17	1,00	0,17	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,17%	101,07%	1,02	1,00	0,02	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	98,52%	96,79%	0,98	1,00	-0,02	Tidak Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,51%	169,91%	1,71	1,00	0,71	Efisien

No	Sasaran Strategis	Persen capaian		IE	SE	TE	Kategori
		rata-rata					
		input	output				
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	98,67%	93,75%	0,95	1,00	-0,05	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	98,78%	111,92%	1,13	1,00	0,13	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	98,89%	114,42%	1,16	1,00	0,16	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	98,67%	105,26%	1,07	1,00	0,07	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa sebagian besar sasaran strategis memiliki nilai $TE > 1$ dengan kriteria efisien. Nilai efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, tetapi terdapat dua sasaran strategis dengan nilai efisiensi negatif atau tidak efisien.

Berdasarkan besarnya anggaran untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan (selain gaji) di Balai Besar POM di Jakarta dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Proporsi capaian anggaran tertinggi adalah untuk pencapaian sasaran ke 9 yaitu “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke-9 sebesar Rp22.901.275.271,00 atau 71,02% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan antar lain untuk melaksanakan kegiatan meningkatkan indeks profesionalitas Balai Besar POM di Jakarta dengan target 75 di akhir tahun 2020
- b. Proporsi capaian anggaran terkecil adalah untuk pencapaian sasaran kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”. Anggaran yang direalisasikan untuk Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke-3 sebesar Rp109.132.393,00 atau sebesar 0,34% dari pagu anggaran yang tersedia.



Gambar 37. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id per tanggal 15 Februari 2021 jam 10:48 diperoleh nilai kinerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 sebesar 94,70 untuk IKPA dan 85,64 untuk EKA. Kurangnya konsistensi terhadap rencana penarikan dana dan keterlambatan *revolving* UP berkontribusi negatif terhadap nilai kinerja anggaran tersebut. Nilai kinerja pada aplikasi monev ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev

yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Kemudian dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



BADAN POM

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2020-2024. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 28 indikator kinerja utama.

1. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator mencapai target dengan kriteria “**sangat baik**”, 17 (tujuh belas) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**”, target dengan 2 (dua) indikator mencapai kategori “cukup”
2. Hasil capaian empat sasaran strategis terbaik dari adalah sebagai berikut:
 - Nilai pencapaian pada sasaran strategis ke-dua sebesar 110,04% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan Balai Besar POM di Jakarta telah sangat berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - Nilai pencapaian pada sasaran strategis ke-empat sebesar 110,78% dengan kriteria SANGAT BAIK menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - Nilai pencapaian pada sasaran strategis ke-tujuh sebesar 120% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan Balai Besar POM di Jakarta telah sangat berhasil dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - Nilai pencapaian pada sasaran strategis ke-sembilan sebesar 111,92% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan Balai Besar POM di Jakarta telah sangat berhasil dalam mewujudkan SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

3. Dari 15 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, sebagian besar kegiatan telah masuk kategori efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,00 hingga 0,21 (Kegiatan sarana distribusi yang diperiksa)

4.2. Saran

1. Sampai dengan tahun 2020, kegiatan banyak terkendala disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja BBPOM di Jakarta selama 9 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2020 dan ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan pilihan utama selama masa pandemi.
2. Rencana yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun 2021.

BADAN POM

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun
2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78	80	83	86
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
		Internal Process					
	Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)

BADAN POM

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Pihak Pertama



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	88,5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	82%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

Kegiatan

Anggaran

1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp 32.626.736.000

Jakarta, 2 Juni 2020

Kepala Badan POM



Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Jakarta



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86%	86%	86%	86%	331.779.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	78%	78%	78%	192.812.900
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	86%	86%	86%	331.779.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	78%	78%	78%	192.812.900
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				75	122.037.300
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				82	83.176.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja				72	122.037.300

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				88,5	1.592.766.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	87%	87%	87%	207.941.250
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	207.941.250
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	83%	83%	181.250.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	46%	46%	46%	82.056.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	55%	250.650.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				3,51	125.735.400
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		89,21	89,21	89,21	780.180.000
		Jumlah sekolah dyangengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15%	40%	60%	16	256.976.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	15%	40%	60%	4	659.498.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	40%	60%	1	85.000.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	90%	284.382.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	89%	165.268.200
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8%	16%	24%	32%	1.176.427.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				88	176.250.500
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				81	182.398.500
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				75	23.246.822.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				82	1.026.016.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal		1,51	1,51	1,51	204.094.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	14	37	56	93	176.250.500
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	182.398.500

Jakarta, 2 Juni 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
1	Stakeholder	12. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	76,74%	89,23	89,23	CUKUP
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95,26%	122,13	120,00	SANGAT BAIK
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	71,12%	82,70	82,70	CUKUP
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80,75%	103,53	103,53	BAIK
		13. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja	75	82,53	110,04	110,04	SANGAT BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		kerja Balai Besar POM di Jakarta	Balai Besar POM di Jakarta					
		14. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	85,53	104,30	104,30	BAIK
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	73,30	101,81	101,81	BAIK
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	88,19	99,65	99,65	BAIK
		15. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	87	85,24%	97,98	97,98	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,50	75,49%	136,02	120,00	SANGAT BAIK
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00	77,00%	92,77	92,77	BAIK
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	55,94%	121,61	120,00	SANGAT BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	72,61%	132,02	120,00	SANGAT BAIK
			Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4,00	113,96	113,96	SANGAT BAIK
2	Internal Process	16. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	93,02	104,27	104,27	BAIK
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	12	100,00	100,00	BAIK
			Jumlah desa pangan aman	4	5,0	100,00	100,00	BAIK
			Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	100,00	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		17. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	92,29%	102,54	102,54	BAIK
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	81,03%	91,04	91,04	BAIK
		18. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54,37%	163,30	120,00	SANGAT BAIK
3	Learning and Growth	19. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	80,17	91,10	91,10	BAIK
			Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	78,08	96,40	96,40	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		Besar POM di Jakarta yang optimal						
		20. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	83,94	111,92	111,92	SANGAT BAIK
		21. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	74,70%	91,10	91,10	BAIK
			Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2,08	137,75	120,00	SANGAT BAIK
		22. Terkelolanya Keuangan UPT Balai	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	90	89,264	95,98	95,98	BAIK

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Penyesuaian (%)	Kriteria
		Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26	105,26	BAIK

*) Dihitung terhadap target sesuai target APBN-P

BADAN POM

Lampiran 4. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2020

No	Program/Kegiatan/ Output	Output (volume)			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	3165.002 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di DKI Jakarta (perkara)	7	7	100,00	569.582.000	565.548.679	99,29	1,01	0,01	100%
2	3165.003 Sampel Makanan yang Diperiksa (sampel)	718	735	102,37	550.894.000	535.057.258	97,13	1,05	0,05	100%
3	3165.004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	250	261	104,40	179.432.000	178.597.000	99,53	1,05	0,05	100%
4	3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	872	1044	119,72	732.093.000	724.919.865	99,02	1,21	0,21	95%
5	3165.011 Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan (laporan)	3	3	100,00	466.430.000	465.430.198	99,79	1,00	0,00	100%
6	3165.012 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i> (laboratorium)	1	1	100,00	1.894.532.000	1.868.864.040	98,65	1,01	0,01	100%
7	3165.081 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa (sampel)	1568	1571	100,19	947.940.000	941.540.333	99,32	1,01	0,01	100%
8	3165.085 Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (sekolah)	12	12	100,00	125.870.000	124.821.300	99,17	1,01	0,01	100%
9	3165.087 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (jenis keputusan)	6	6	100,00	491.060.000	481.876.549	98,13	1,02	0,02	100%

No	Program/Kegiatan/Output	Output (volume)			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			TE
10	3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman (KIE)	29	34	117,24	1.323.986.000	1.312.231.574	99,11	1,18	0,18	100%
11	3165.089 Desa Pangan Aman (desa)	5	5	100,00	501.798.000	498.232.240	99,29	1,01	0,01	100%
12	3165.090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)	1	1	100,00	85.000.000	84.429.500	99,33	1,01	0,01	100%
13	3165.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100,00	1.204.264.000	1.200.005.684	99,65	1,00	0,00	100%
14	3165.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	100,00	1.240.258.000	1.216.231.052	98,06	1,02	0,02	100%
15	3165.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100,00	22.313.597.000	22.050.453.168	98,82	1,01	0,01	100%
Jumlah		3.475	3683	102,93	32.626.736.000	32.248.238.440	98,84	1,04	0,04	100%

BADAN POM

Sasaran Strategis		Indikator		TAHUN 2020								
				Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,00%	76,74%	89,23%	331.779.000	329.539.117	99,32%	0,90	- 0,10	75 %
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	95,26%	122,13%	192.812.900	187.270.040	97,13%	1,26	0,26	95 %
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	71,12%	82,70%	331.779.000	329.539.117	99,32%	0,83	- 0,17	75 %
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00%	80,75%	103,53%	192.812.900	187.270.040	97,13%	1,07	0,07	100 %
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	75	82,53	110,04%	112.120.800	109.132.393	97,33%	1,13	0,13	100 %

Sasaran Strategis		Indikator		TAHUN 2020								
				Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	85,53	104,30%	59.505.000	59.250.243	99,57%	1,05	0,05	100 %
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	73,3	101,81%	112.120.800	109.132.393	97,33%	1,05	0,05	100 %
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	88,19	99,65%	1.688.237.000	1.673.981.454	99,16%	1,00	0,00	100 %
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	85,24%	97,98%	148.762.500	148.125.608	99,57%	0,98	- 0,02	75 %
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56%	75,49%	136,02%	148.762.500	148.125.608	99,57%	1,37	0,37	95 %

Sasaran Strategis		Indikator		TAHUN 2020								
				Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
BBPOM di Jakarta	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00%	77,00%	92,77%	151.300.000	151.172.328	99,92%	0,93	- 0,07	75 %	
	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	55,94%	121,61%	60.910.800	60.856.800	99,91%	1,22	0,22	95 %	
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	72,61%	132,02%	177.109.200	176.144.173	99,46%	1,33	0,33	95 %	
	14	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4	113,96%	115.518.400	112.439.435	97,33%	1,17	0,17	100 %	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	93,02	104,27%	1.323.986.000	1.312.231.574	99,11%	1,05	0,05	100 %
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	12	12	100,00%	125.870.000	124.821.300	99,17%	1,01	0,01	100 %
		17	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00%	501.798.000	498.232.240	99,29%	1,01	0,01	100 %
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00%	85.000.000	84.429.500	99,33%	1,01	0,01	100 %

Sasaran Strategis		Indikator		TAHUN 2020								
				Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90%	92,29%	102,54%	284.382.000	282.462.100	99,32%	1,03	0,03	100 %
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89%	81,03%	91,04%	165.268.200	160.517.177	97,13%	0,94	-0,06	75 %
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32%	54,37%	169,91%	1.036.012.000	1.030.978.877	99,51%	1,71	0,71	90 %
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Jakarta	88	80,17	91,10%	177.155.500	173.803.240	98,11%	0,93	-0,07	75 %
		23	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	81	78,08	96,40%	165.599.500	164.408.451	99,28%	0,97	-0,03	75 %

Sasaran Strategis		Indikator		TAHUN 2020								
				Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	75	83,94	111,92%	23.184.820.000	22.901.275.271	98,78%	1,13	0,13	100 %
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00%	74,70%	91,10%	951.016.000	937.689.670	98,60%	0,92	-0,08	75 %
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	1,51	1,19	78,59%	459.543.000	457.198.600	99,49%	0,79	0,21	75 %
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	93	89,264	95,98%	177.155.500	173.803.240	98,11%	0,98	0,02	75 %
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jakarta	95%	100%	105,26%	165.599.500	164.408.451	99,28%	1,06	0,06	100 %

BADAN POM

Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Januari												Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji	TMK Penandaan dan MS Uji	TMK Penandaan dan TMS uji	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Obat		90	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Obat Tradisional		101		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	
	Total Suplemen Kesehatan		17		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	
	Total Kosmetik		144		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	
	Jakarta		352	Targeted	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos		352		22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	
	Total Obat		359	Random	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	
	Total Obat Tradisional		235		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	
	Total Suplemen Kesehatan		95		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	
	Total Kosmetik		527		50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	
	Jakarta		1216	Random	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos		1216		98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		1568		120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Pangan		171	Targeted	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0		
	Total Pangan		547	Random	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0		
	TOTAL PANGAN		718		35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0		

BADAN POM

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Februari														
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MS (MK Penandaan dan MS uji lab) **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan MS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Obat	90	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total Obat Tradisional	101		16	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0		
	Total Suplemen Kesehatan	17		2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0		
	Total Kosmetik	144		24	0	0	0	0	34	2	1	0	1	0	1	32	2		
	Jakarta	352	Targeted	42	0	0	0	0	64	2	1	0	1	0	1	62	2		
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	352		42	0	0	0	0	64	2	1	0	1	0	1	62	2		
	Total Obat	359	Random	48	0	0	0	0	66	33	33	0	0	0	0	33	33		
	Total Obat Tradisional	235		43	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0		
	Total Suplemen Kesehatan	95		20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0		
	Total Kosmetik	527		99	0	0	0	0	149	28	10	0	18	0	18	121	28		
	Jakarta	1216	Random	210	0	0	0	0	308	61	43	0	18	0	18	247	61		
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216		210	0	0	0	0	308	61	43	0	18	0	18	247	61		
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568		252	0	0	0	0	372	63	44	0	19	0	19	309	63		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Pangan	171	Targeted	28	0	0	0	0	40	12	8	2	0	2	4	28	12		
	Total Pangan	547	Random	44	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0			
	TOTAL PANGAN	718		72	0	0	0	0	107	12	8	2	0	2	4	95	12		

BADAN POM

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Maret														
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Obat	90	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total Obat Tradisional	101		24	0	0	0	0	50	10	9	0	1	0	0	1	40	10	
	Total Suplemen Kesehatan	17		1	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	3	2	
	Total Kosmetik	144		18	0	0	0	0	50	8	5	0	2	1	0	3	42	8	
	Jakarta	352	Targeted	43	0	0	0	0	105	20	16	0	3	1	0	4	85	20	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	352		43	0	0	0	0	105	20	16	0	3	1	0	4	85	20	
	Total Obat	359	Random	50	0	0	0	0	83	45	45	0	0	0	0	38	45		
	Total Obat Tradisional	235		39	0	0	0	0	102	20	20	0	0	0	0	0	82	20	
	Total Suplemen Kesehatan	95		20	0	0	0	0	50	10	10	0	0	0	0	0	40	10	
	Total Kosmetik	527		86	0	0	0	0	207	39	20	0	19	0	0	19	168	39	
	Jakarta	1216	Random	195	0	0	0	0	442	114	95	0	19	0	0	19	328	114	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216		195	0	0	0	0	442	114	95	0	19	0	0	19	328	114	
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568		238	0	0	0	547	134	111	0	22	1	0	23	413	134		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Pangan	171	Targeted	26	0	0	0	0	54	3	3	0	0	0	0	51	3		
	Total Pangan	547	Random	72	0	0	0	0	139	23	23	0	0	0	0	116	23		
	TOTAL PANGAN	718		98	0	0	0	193	26	26	0	0	0	0	167	26			

BADAN POM

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	April											Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
						TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****				TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Obat	90	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total Obat Tradisional	101		0	0	0	0	0	40	13	12	0	1	0	0	1	27	13	
	Total Suplemen Kesehatan	17		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
	Total Kosmetik	144		4	0	0	0	0	46	4	3	0	1	0	0	1	42	4	
	Jakarta	352	Targeted	4	0	0	0	0	89	17	15	0	2	0	0	2	72	17	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total targeted Obat, OT, SK dan Kos	352		4	0	0	0	0	89	17	15	0	2	0	0	2	72	17	
	Total Obat	359	Random	0	0	0	0	0	38	36	36	0	0	0	0	0	2	36	
	Total Obat Tradisional	235		0	0	0	0	0	82	34	34	0	0	0	0	0	48	34	
	Total Suplemen Kesehatan	95		0	0	0	0	0	40	8	8	0	0	0	0	0	32	8	
	Total Kosmetik	527		0	0	0	0	0	168	49	32	0	17	0	0	17	119	49	
	Jakarta	1216	Random	0	0	0	0	0	328	127	110	0	17	0	0	17	201	127	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216		0	0	0	0	0	328	127	110	0	17	0	0	17	201	127	
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568	4	0	0	0	0	417	144	125	0	19	0	0	19	273	144		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Pangan	171	Targeted	0	0	0	0	0	51	25	19	3	2	1	0	6	26	25	
	Total Pangan	547	Random	0	0	0	0	0	116	22	22	0	0	0	0	0	94	22	
	TOTAL PANGAN	718		0	0	0	0	0	167	47	41	3	2	1	0	6	120	47	

BADAN POM

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Mei														
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				TMS							
												MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai																			
	Total Obat	90	Targeted	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0		
	Total Obat Tradisional	101		0	0	0	0	0	27	2	2	0	0	0	0	25	2		
	Total Suplemen Kesehatan	17		0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3		
	Total Kosmetik	144		0	0	0	0	0	42	38	23	0	14	1	0	15	4	38	
	Jakarta	352	Targeted	7	0	0	0	0	79	43	28	0	14	1	0	15	36	43	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	352		7	0	0	0	0	79	43	28	0	14	1	0	15	36	43	
	Total Obat	359	Random	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1		
	Total Obat Tradisional	235		0	0	0	0	0	48	3	3	0	0	0	0	45	3		
	Total Suplemen Kesehatan	95		0	0	0	0	0	32	11	11	0	0	0	0	21	11		
	Total Kosmetik	527		0	0	0	0	0	119	119	63	1	55	0	0	56	0	119	
	Jakarta	1216	Random	0	0	0	0	0	201	134	78	1	55	0	0	56	67	134	
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216		0	0	0	0	0	201	134	78	1	55	0	0	56	67	134	
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568		7	0	0	0	0	280	177	106	1	69	1	0	71	103	177	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Pangan	171	Targeted	39	0	0	0	0	65	26	21	3	0	2	5	39	26		
	Total Pangan	547	Random	0	0	0	0	0	94	93	83	7	2	1	10	1	93		
	TOTAL PANGAN	718		39	0	0	0	0	159	119	104	10	2	3	15	40	119		

BADAN POM

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Juni												Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
					Jumlah sampel 9	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai																			
	Total Obat		90	Targeted	22	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	
	Total Obat Tradisional		101		14	0	0	0	0	0	39	19	19	0	0	0	0	20	19
	Total Suplemen Kesehatan		17		2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1
	Total Kosmetik		144		10	0	0	0	0	0	14	4	0	4	0	0	0	4	10
	Jakarta		352	Targeted	48	0	0	0	0	84	24	20	4	0	0	0	4	60	24
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos		352		48	0	0	0	0	0	84	24	20	4	0	0	0	4	60
	Total Obat		359	Random	27	0	0	0	0	28	13	13	0	0	0	0	0	15	13
	Total Obat Tradisional		235		30	0	0	0	0	0	75	7	7	0	0	0	0	68	7
	Total Suplemen Kesehatan		95		11	0	0	0	0	0	32	20	20	0	0	0	0	12	20
	Total Kosmetik		527		70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0
	Jakarta		1216	Random	138	0	0	0	0	205	40	40	0	0	0	0	0	165	40
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos		1216		138	0	0	0	0	0	205	40	40	0	0	0	0	0	165
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		1568		186	0	0	0	0	289	64	60	4	0	0	0	4	225	64
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	Total Pangan		171	Targeted	3	0	0	0	0	42	17	12	1	3	1	0	5	25	17
	Total Pangan		547	Random	82	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	83	0
	TOTAL PANGAN		718		85	0	0	0	0	125	17	12	1	3	1	0	5	108	17

BADAN POM

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Juli													Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji								
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
	Total Obat	90			Targeted	13	0	0	0	0	42	16	16	0	0	0	0	0	26	16	
	Total Obat Tradisional	101				18	0	0	0	0	38	8	8	0	0	0	0	0	0	30	8
	Total Suplemen Kesehatan	17				1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Total Kosmetik	144				10	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
	Jakarta	352			Targeted	42	0	0	0	0	102	24	24	0	0	0	0	0	0	78	24
	-	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	352				42	0	0	0	0	102	24	24	0	0	0	0	0	0	78	24
	Total Obat	359			Random	43	0	0	0	0	58	24	23	0	1	0	0	1	34	24	
	Total Obat Tradisional	235				24	0	0	0	0	92	42	31	1	9	1	0	11	50	42	
	Total Suplemen Kesehatan	95				10	0	0	0	0	22	1	1	0	0	0	0	0	21	1	
	Total Kosmetik	527				70	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	
	Jakarta	1216			Random	147	0	0	0	0	312	67	55	1	10	1	0	12	245	67	
	-	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216				147	0	0	0	0	312	67	55	1	10	1	0	12	245	67	
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568				189	0	0	0	0	414	91	79	1	10	1	0	12	323	91	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
	Total Pangan	171			Targeted	38	0	0	0	0	63	22	15	1	0	6	0	7	41	22	
	Total Pangan	547				85	0	0	0	0	168	8	8	0	0	0	0	0	160	8	
	TOTAL PANGAN	718				123	0	0	0	0	231	30	23	1	0	6	0	7	201	30	

BADAN POM

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Agustus													Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji								
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
	Total Obat	90		Targeted	0	0	0	0	0	26	4	4	0	0	0	0	0	22	4		
	Total Obat Tradisional	101			30	0	0	0	0	60	2	2	0	0	0	0	0	0	58	2	
	Total Suplemen Kesehatan	17			3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
	Total Kosmetik	144			0	0	0	0	0	20	10	4	0	6	0	0	0	6	10	10	
	Jakarta	352		Targeted	33	0	0	0	0	111	16	10	0	6	0	0	6	95	16		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	352			33	0	0	0	0	111	16	10	0	6	0	0	6	95	16		
	Total Obat	359		Random	61	0	0	0	0	95	27	27	0	0	0	0	0	68	27		
	Total Obat Tradisional	235			18	0	0	0	0	68	7	7	0	0	0	0	0	61	7		
	Total Suplemen Kesehatan	95			9	0	0	0	0	30	2	2	0	0	0	0	0	28	2		
	Total Kosmetik	527			0	0	0	0	0	140	71	34	0	37	0	0	37	69	71		
	Jakarta	1216		Random	88	0	0	0	0	333	107	70	0	37	0	0	37	226	107		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216			88	0	0	0	0	333	107	70	0	37	0	0	37	226	107		
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568			121	0	0	0	0	444	123	80	0	43	0	0	43	321	123		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
	Total Pangan	171		Targeted	2	0	0	0	0	43	2	2	0	0	0	0	0	41	2		
	Total Pangan	547			Random	72	0	0	0	0	232	71	66	3	2	0	0	5	161	71	
	TOTAL PANGAN	718			74	0	0	0	0	275	73	68	3	2	0	0	5	202	73		

BADAN POM

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	September													Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji								
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																					
	Total Obat	90		Targeted	2	0	0	0	0	24	1	1	0	0	0	0	0	23	1		
	Total Obat Tradisional	101			5	0	0	0	0	63	20	17	0	3	0	0	3	43	20		
	Total Suplemen Kesehatan	17			3	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	7	1		
	Total Kosmetik	144			35	0	0	0	0	45	20	17	0	3	0	0	3	25	20		
	Jakarta	352		Targeted	45	0	0	0	0	140	42	36	0	6	0	0	6	98	42		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	352			45	0	0	0	0	140	42	36	0	6	0	0	6	98	42		
	Total Obat	359		Random	59	0	0	0	0	127	34	34	0	0	0	0	0	93	34		
	Total Obat Tradisional	235			16	0	0	0	0	77	23	21	0	2	0	0	2	54	23		
	Total Suplemen Kesehatan	95			13	0	0	0	0	41	8	8	0	0	0	0	0	33	8		
	Total Kosmetik	527			101	0	0	0	0	170	23	21	0	2	0	0	2	147	23		
	Jakarta	1216		Random	189	0	0	0	0	415	88	84	0	4	0	0	4	327	88		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1216			189	0	0	0	0	415	88	84	0	4	0	0	4	327	88		
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1568			234	0	0	0	0	555	130	120	0	10	0	0	10	425	130		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
	Total Pangan	171		Targeted	10	0	0	0	0	51	33	26	5	2	0	0	7	18	33		
	Total Pangan	547		Random	33	0	0	0	0	194	61	56	1	4	0	0	5	133	61		
	TOTAL PANGAN	718			43	0	0	0	0	245	94	82	6	6	0	0	12	151	94		

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Oktober														
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji				Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)
													IKK (Penandaan dan IMS uji lab)	IMK (Penandaan dan MS Uji Lab)	IMK (Penandaan dan IMS uji lab)				
	Total Obat		90	Targeted	11	0	0	0	0	19	5	5	0	0	0	0	14	5	
	Total Obat Tradisional		101		15	0	0	0	0	39	19	15	0	4	0	0	4	20	19
	Total Suplemen Kesehatan		17		0	0	0	0	0	7	6	6	0	0	0	0	0	1	6
	Total Kosmetik		144		25	0	0	0	0	63	12	5	0	7	0	0	7	51	12
	Jakarta		352	Targeted	51	0	0	0	0	128	42	31	0	11	0	0	11	86	42
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk		352		51	0	0	0	0	128	42	31	0	11	0	0	11	86	42
	Total Obat		359	Random	49	0	0	0	0	119	53	51	0	2	0	0	2	66	53
	Total Obat Tradisional		235		23	0	0	0	0	73	34	26	0	8	0	0	8	39	34
	Total Suplemen Kesehatan		95		0	0	0	0	0	33	24	20	2	2	0	0	4	9	24
	Total Kosmetik		527		30	0	0	0	0	132	75	49	0	26	0	0	26	57	75
	Jakarta		1216	Random	102	0	0	0	0	357	186	146	2	38	0	0	40	171	186
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk		1216		102	0	0	0	0	357	186	146	2	38	0	0	40	171	186
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		1568		153	0	0	0	0	485	228	177	2	49	0	0	51	257	228
sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan	Jakarta	171	Targeted	8	0	0	0	0	26	17	16	0	0	1	0	1	9	17
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	Jakarta	547	Random	64	0	0	0	0	161	86	86	0	0	0	0	0	75	86
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Pangan		171	Targeted	8	0	0	0	0	26	17	16	0	0	1	0	1	9	17
	Total Pangan		547	Random	64	0	0	0	0	161	86	86	0	0	0	0	0	75	86
	TOTAL PANGAN		718		72	0	0	0	0	187	103	102	0	0	1	0	1	84	103

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	November														
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandasan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/ illegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK (Penandaan dan IMS uji lab) **	IMK (Penandaan dan MS Uji Lab) ***	IMK (Penandaan dan IMS uji lab) ****	IMS Uji (Khusus Pengawasan Purposive)			
	Total Obat		90	Targeted	35	0	0	0	0	49	13	12	0	1	0	0	1	36	13
	Total Obat Tradisional		101		2	0	0	0	0	22	11	9	0	2	0	0	2	11	11
	Total Suplemen Kesehatan		17		1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	Total Kosmetik		144		5	0	0	0	0	56	23	6	0	17	0	0	17	33	23
	Jakarta		352	Targeted	43	0	0	0	0	129	48	28	0	20	0	0	20	81	48
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk		352		43	0	0	0	0	129	48	28	0	20	0	0	20	81	48
	Total Obat		359	Random	0	0	0	0	0	66	47	46	0	1	0	0	1	19	47
	Total Obat Tradisional		235		7	0	1	0	0	45	22	19	0	3	0	0	4	23	23
	Total Suplemen Kesehatan		95		2	0	0	0	0	11	7	6	0	1	0	0	1	4	7
	Total Kosmetik		527		18	0	0	0	0	75	27	12	0	15	0	0	15	48	27
	Jakarta		1216	Random	27	0	1	0	0	197	103	83	0	20	0	0	21	94	104
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk		1216		27	0	1	0	0	197	103	83	0	20	0	0	21	94	104
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		1568		70	0	1	0	0	326	151	111	0	40	0	0	41	175	152
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan	Jakarta	171	Targeted	25	0	0	0	0	34	2	2	0	0	0	0	0	32	2
	0	-								0	0						0	0	0
	0	-								0	0						0	0	0
	0	Jakarta	547	Random	65	0	0	0	0	140	22	20	2	0	0	0	2	118	22
	0	-								0	0						0	0	0
	0	-								0	0						0	0	0
	Total Pangan		171	Targeted	25	0	0	0	0	34	2	2	0	0	0	0	0	32	2
	Total Pangan		547	Random	65	0	0	0	0	140	22	20	2	0	0	0	2	118	22
	TOTAL PANGAN		718		90	0	0	0	0	174	24	22	2	0	0	0	2	150	24

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember													Hasil perhitungan					
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	RAPK s.d TVV IV			
						TIE/ illegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK (Penandaan dan MS uji lab) **	IMK (Penandaan dan MS Uji Lab) ***	IMK (Penandaan dan MS uji lab) ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				pembilang	Penyebut	capaian	
	Total Obat		90	Targeted	0	0	0	0	0	36	36	36	0	0	0	0	0	0	36				
	Total Obat Tradisional		101		0	0	0	0	0	11	11	9	0	2	0	0	2	0	11				
	Total Suplemen Kesehatan		17		1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2				
	Total Kosmetik		144		2	0	0	0	0	35	35	17	1	17	0	0	18	0	35				
	Jakarta		352	Targeted	3	0	0	0	0	84	84	64	1	19	0	0	20	0	84				
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total targeted Obat, OT, &k		352		3	0	0	0	0	84	84	64	1	19	0	0	20	0	84	261	367	71,12%	
	Total Obat		359	Random	5	0	0	0	0	24	24	24	0	0	0	0	0	24					
	Total Obat Tradisional		235		1	0	0	0	0	24	24	16	1	6	1	0	8	0	24				
	Total Suplemen Kesehatan		95		1	0	0	0	0	5	5	4	0	1	0	0	1	0	5				
	Total Kosmetik		527		3	0	0	0	0	51	51	22	0	29	0	0	29	0	51				
	Jakarta		1216	Random	10	0	0	0	0	104	104	66	1	36	1	0	38	0	104				
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total Random Obat, OT, &k		1216		10	0	0	0	0	104	104	66	1	36	1	0	38	0	104	924	1204	76,74%	
	TOTAL Obat, OT, &k dan Kos		1568		13	0	0	0	0	188	188	130	2	55	1	0	58	0	188	1185	1571	75,43%	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																							
1	Pangan	Jakarta	171	Targeted	0	0	0	0	0	32	25	23	0	2	0	0	2	7	25	151	187	80,75%	
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	0	Jakarta	547	Random	10	0	0	0	0	128	129	126	2	1	0	0	3	-1	129	522	548	95,26%	
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total Pangan		171	Targeted	0	0	0	0	0	32	25	23	0	2	0	0	2	7	25	151	187	80,75%	
	Total Pangan		547	Random	10	0	0	0	0	128	129	126	2	1	0	0	3	-1	129	522	548	95,26%	
	TOTAL PANGAN		718		10	0	0	0	0	160	154	149	2	3	0	0	5	6	154	673,00	735,00	91,56%	

Lampiran 6. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan Triwulan IV tahun 2020

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan												Total	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
OBAT	Iklan	MK	16	6	12	16	14	15	31	20	25	16	14	6	191
		Jakarta	16	6	12	16	14	15	31	20	25	16	14	6	191
		-													0
		-													0
		TMK	3	3	8	14	15	15	9	0	3	1	2	1	74
		Jakarta	3	3	8	14	15	15	9	0	3	1	2	1	74
		-													0
	-													0	
	Label	MK	11	42	41	0	7	49	54	59	57	58	35	5	440
		Jakarta	11	42	41	0	7	49	54	59	57	58	35	5	440
		-													0
		-													0
		TMK	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	8
		Jakarta	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	8
-														0	
-													0		
-													0		
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	5	3	4	0	1	1	0	0	0	1	2	0	17
		Jakarta	5	3	4	0	1	1	0	0	0	1	2	0	17
		-													0
		-													0
	Label	TMK	14	20	23	60	61	63	49	10	5	2	3	7	317
		Jakarta	14	20	23	60	61	63	49	10	5	2	3	7	317
		-													0
		-													0
MK	29	58	55	0	0	30	39	20	17	31	7	1	287		

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	Jakarta	29	58	55	0	0	30	39	20	17	31	7	1	287
	-													0
	-													0
	TMK	1	1	8	0	0	14	3	10	4	7	2	0	50
	Jakarta	1	1	8	0	0	14	3	10	4	7	2	0	50
	-													0
	-													0
SUPLEMEN KESEHATAN	MK	5	10	2	2	0	0	0	0	0	2	5	0	26
	Jakarta	5	10	2	2	0	0	0	0	0	2	5	0	26
	-													0
	-													0
	TMK	17	48	8	9	3	2	3	5	3	1	0	4	103
	Jakarta	17	48	8	9	3	2	3	5	3	1	0	4	103
	-													0
	-													0
	MK	12	22	20	0	0	13	8	10	14	0	3	1	103
	Jakarta	12	22	20	0	0	13	8	10	14	0	3	1	103
	-													0
	-													0
TMK	0	0	1	0	0	0	3	2	2	0	0	0	8	
Jakarta	0	0	1	0	0	0	3	2	2	0	0	0	8	
-													0	
	-													0
KOSMETIK	MK	75	112	38	79	100	6	15	0	28	0	6	28	519
	Jakarta	75	112	38	79	100	6	15	0	28	0	6	28	519
	-													0
	-													0
	TMK	54	118	17	63	48	338	62	32	0	9	15	22	746

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	Jakarta	54	118	17	63	48	338	62	32	0	9	15	22	746
	-													0
	-													0
	MK	23	82	51	0	0	84	80	81	23	29	10	2	433
	Jakarta	23	82	51	0	0	84	80	81	23	29	10	2	433
	-													0
	-													0
	TMK	37	41	53	0	0	0	0	0	35	26	11	5	240
	Jakarta	37	41	53	0	0	0	0	0	35	26	11	5	240
	-													0
	-													0
	-													0
	MK	29	22	121	42	85	20	10	10	2	25	5	5	361
	Jakarta	29	22	121	42	85	20	10	10	2	25	5	5	361
	-													0
	-													0
	TMK	36	44	81	193	95	10	20	20	28	25	25	25	607
	Jakarta	36	44	81	193	95	10	20	20	28	25	25	25	607
	-													0
	-													0
	-													0
	MK	35	69	94	0	29	83	98	74	33	84	85	10	709
	Jakarta	35	69	94	0	29	83	98	74	33	84	85	10	709
	-													0
	-													0
	TMK	0	3	4	0	10	2	5	1	0	1	1	0	32
	Jakarta	0	3	4	0	10	2	5	1	0	1	1	0	32
	-													0
	-													0
	-													0
	MK	5	4	2	8	5	3	4	1	1	0	2	1	36

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
ROKOK	Iklan	Jakarta	5	4	2	8	5	3	4	1	1	0	2	1	36
		-													0
		-													0
		TMK	25	26	28	32	25	27	26	4	4	5	3	6	211
		Jakarta	25	26	28	32	25	27	26	4	4	5	3	6	211
	Label	-													0
		-													0
		MK	9	1	6	6	8	9	6	8	7	7	5	5	77
		Jakarta	9	1	6	6	8	9	6	8	7	7	5	5	77
		-													0
		-													0
		TMK	16	14	9	9	7	6	9	7	8	8	10	10	113
		Jakarta	16	14	9	9	7	6	9	7	8	8	10	10	113
		-													0
		-													0
													0		
TOTAL	Iklan	MK	135	157	179	147	205	45	60	31	56	24	34	40	1.150
		Jakarta	135	157	179	147	205	45	60	31	56	24	34	40	1.150
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TMK	149	259	165	371	247	455	169	71	43	43	48	65	2.058
	Label	Jakarta	149	259	165	371	247	455	169	71	43	43	48	65	2.058
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total Iklan	284	416	344	518	452	500	229	102	99	67	82	105	3.208
		MK	119	274	267	6	44	268	285	252	151	209	145	24	2.049
		Jakarta	119	274	267	6	44	268	285	252	151	209	145	24	2.049
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	TMK	54	59	75	9	17	22	21	21	52	44	24	15	451
	Jakarta	54	59	75	9	17	22	21	21	52	44	24	15	451
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	173	333	342	15	61	290	306	273	203	253	169	39	2.500



BADAN POM

Lampiran 7.Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi
Tahun 2020

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	57	47	96	34	36	118	221	150	144	145	225	137	1410
														0
2	Layanan pengaduan b)	5	2	2	0	1	2	0	2	4	2	5	3	28
														0
														0
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	0	4	3	1	3	6	3	0	0	6	2	5	33
														0
														0
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	0	11
														0
														0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	0	14	5	5	10	0	0	0	1	1	0	3	39
														0
														0
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	9	5	19	37	14	19	18	7	10	23	12	15	188
														0
														0
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
														0
														0
8	Sebagai Narasumber h)	0	0	3	0	0	2	7	0	3	4	7	1	27
														0
														0
Total		71	72	131	77	64	147	249	159	162	184	258	164	1738
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71	72	131	77	64	147	249	159	162	184	258	164	1738

Keterangan

- a) Jumlah layanan informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Sempel LPK
- b) Jumlah layanan pengaduan yang diterima oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Sempel LPK
- c) Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Balai/Loka POM (status tindak lanjut pada Aplikasi Sempel LPK berubah menjadi "SUDAH")
- d) Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan termasuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR)
- e) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya
- f) KIE yang dilakukan melalui jumlah postingan di media sosial (Instagram/Triwulanitter/Facebook) per bulan
- g) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
- h) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang menggunakan anggaran DIPA Badan POM
- i) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR
- j) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR/permintaan dari media
- k) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/undangan dari stakeholder

BADAN POM

Lampiran 8. Layanan Informasi yang Dilaksanakan BBPOM di Jakarta

Triwulan IV tahun 2020

No	Sarana yang digunakan	BULAN												Total
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Langsung	46	38	52	0	0	26	75	43	48	37	50	43	458
2	Telepon	10	5	22	4	0	17	64	35	40	41	38	18	294
3	Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	E-mail	1	3	10	6	9	13	27	15	4	9	9	6	112
6	SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak saran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0	0	9	24	27	50	54	57	52	58	129	69	529
10	Aplikasi Lain*	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
	JUMLAH	57	45	95	34	36	118	220	150	144	145	226	136	1407

BADAN POM

Lampiran 9. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,00%	76,74%	89,23%	331.779.000	329.539.117	99,32%
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	95,26%	122,13%	192.812.900	187.270.040	97,13%
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	71,12%	82,70%	331.779.000	329.539.117	99,32%
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00%	80,75%	103,53%	192.812.900	187.270.040	97,13%
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	05-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	82,53	110,04%	112.120.800	109.132.393	97,33%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	85,53	104,30%	59.505.000	59.250.243	99,57%
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	73,3	101,81%	112.120.800	109.132.393	97,33%
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	88,19	99,65%	1.688.237.000	1.673.981.454	99,16%
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	85,24%	97,98%	148.762.500	148.125.608	99,57%
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56%	75,49%	136,02%	148.762.500	148.125.608	99,57%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00%	77,00%	92,77%	151.300.000	151.172.328	99,92%
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	55,94%	121,61%	60.910.800	60.856.800	99,91%
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	72,61%	132,02%	177.109.200	176.144.173	99,46%
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4	113,96%	115.518.400	112.439.435	97,33%
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	93,02	104,27%	1.323.986.000	1.312.231.574	99,11%
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	12	12	100,00%	125.870.000	124.821.300	99,17%
		17-Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00%	501.798.000	498.232.240	99,29%
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00%	85.000.000	84.429.500	99,33%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90%	92,29%	102,54%	284.382.000	282.462.100	99,32%
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89%	81,03%	91,04%	165.268.200	160.517.177	97,13%
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32%	54,37%	169,91%	1.036.012.000	1.030.978.877	99,51%
8	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	80,17	91,10%	177.155.500	173.803.240	98,11%
		23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	78,08	96,40%	165.599.500	164.408.451	99,28%
9	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	83,94	111,92%	23.184.820.000	22.901.275.271	98,78%
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	82,00%	74,70%	91,10%	951.016.000	937.689.670	98,60%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
	data dan informasi pengawasan obat dan makanan	dan Makanan sesuai standar GLP						
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	1,19	78,59%	459.543.000	457.198.600	99,49%
11	11-Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	89,258	95,98%	177.155.500	173.803.240	98,11%
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	95%	100%	105,26%	165.599.500	164.408.451	99,28%

*) Realisasi dihitung terhadap target APBN-P

BADAN POM



BADAN POM





BALAI BESAR POM DI JAKARTA

📍 Jalan As'syafiiyah No.133, Cilangkap, Jakarta Timur

☎️ 021 843-04-047 / 843-04-049

📄 021 843-04-046 / 843-04-048

✉️ bpom_jakarta@pom.go.id / bbpomjkt@gmail.com



 [BBPOMJakarta](https://www.facebook.com/BBPOMJakarta)

 [@BPOMJakarta](https://twitter.com/BPOMJakarta)

 [@BPOMJakarta](https://www.instagram.com/BPOMJakarta)

 [Balai Besar POM Jakarta](https://www.youtube.com/Balai Besar POM Jakarta)